

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari dua tahapan analisis dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan empat *frame* besar Media Indonesia yaitu :

1. Golkar memang lebih baik berpisah dengan Demokrat.
2. Media Indonesia menginginkan koalisi JK-Mega terwujud.
3. Demokrat digambarkan sebagai pihak yang tidak pantas diperebutkan.
4. PDIP digambarkan sebagai pihak yang bertentangan dengan Demokrat dan tidak akan mungkin terjadi koalisi antara keduanya.

Dari keempat framing di atas dapat ditarik satu kesimpulan besar untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada BAB I, yaitu Media Indonesia mendukung Golkar untuk berpisah dengan Demokrat. Koalisi besar antara Golkar dan PDIP harus terwujud karenanya wacana koalisi antara Demokrat dengan PDIP dinilai hanya akan memberi efek negatif.

Bingkai berita yang dibentuk Media Indonesia lebih karena pengaruh adanya Surya Paloh sebagai pemilik Media Indonesia yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan bagaimana sikap medianya terhadap suatu isu. Ini terlihat sejalan dengan keinginan Surya Paloh yang lebih mendukung JK untuk maju sebagai capres tunggal Golkar. Begitu juga dengan faktor rutinintitas media yang memiliki andil dalam proses pembentukan bingkai berita. Kebijakan di meja redaksi menjadi batasan bagi para wartawan dalam menghimpun dan menuliskan

berita. Wartawan tidak memiliki pengaruh besar dalam proses pengkonstruksian realitas karena berada dibawah naungan intstitusi media.

## **B. SARAN**

Dalam proses penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan. Proses penelitan yang terlalu lama mengakibatkan proses wawancara dengan para narasumber mengalami sedikit hambatan. Narasumber tidak menjawab secara maksimal pertanyaan yang peneliti ajukan karena tidak lagi mengingat secara detail peristiwa mengenai koalisi partai. Hambatan lainnya, karena topik yang diangkat menyangkut kepemilikan media, para narasumber terlihat hati-hati dalam memberikan pernyataan. Kekurangan lainnya dalam proses wawancara adalah wawancara yang peneliti lakukan belum terlalu mendalam karena keterbatasan jarak dengan narasumber sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk dapat sewaktu-waktu bertemu dan melakukan wawancara.

Dari kekurangan di atas, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah dalam melakukan penelitian sebaiknya jangan terlalu lama untuk mengantisipasi keterbatasan narasumber dalam mengingat sesuatu hal atau peristiwa. Wawancara juga hendaknya dilakukan lebih dari satu atau dua kali agar informasi atau data yang didapat lebih maksimal. Selanjutnya adalah menambah referensi dari buku atau data pustaka lainnya untuk menambah kekurangan dan mendapatkan informasi yang tidak disampaikan oleh narasumber terkait hal-hal yang dianggap sensitif oleh narasumber.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. 1994. *Penulisan Berita Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Birowo, M Antonius (ed). 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta : Gitanyali.
- Budyatna, Muhammad. 2005. *Jurnalistik – Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Djojosoekarto, Agung (ed). 2008. *Transformasi Demokratis Partai Politik di Indonesia*. Jakarta : Kemitraan bagi Tata Pembaruan Pemerintahan di Indonesia.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*, Yogyakarta : LkiS
- Hamad, Ibnu.2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa ; Studi Pesan Politikal dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999*.Jakarta.FISIP UI
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Tekhnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana
- Keller, Annet. 2009. *Tantangan dari Dalam – Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional : Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Jakarta : FES Indonesia Office
- Najib, Mohammad (ed). 2005. *Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*. Yogyakarta : Komisi Pemilihan Umum DIY.
- Rahzen, Taufik. 2007. *Tanah Air Bahasa – Seratus Jejak Pers di Indonesia*. Jakarta Pusat : I : BOEKOE
- Reese, Stephen D.,Gandy, Oscar H dan Grant, Augus E (ed). 2001. *Framing Public Life*. London : Lawrence Elbaum
- Saptono, Irawan.2005. *Pemilu di Layar Kaca*. Jakarta : ISAI
- Shoemaker, Pamela J ; Reese, Stephen D. 1996. *Second Edition Mediating The Message : Theories of Influences On Mass Media Content*. New York : Longman Publishers.

Scheufele, Dietram A. 1999. "Framing as a Theory of Media Effects" dalam *Journal of Communication*. Madison : Inform Global.

Sudibyo, Agus. 2004. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta : LKiS

**Sumber yang tidak diterbitkan :**

Siregar, Monalisa Pertiwi. 2010. *Profiling Surya Paloh dalam SKH Media Indonesia (Analisis Framing Profiling Surya Paloh dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia Terkait dengan Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Golkar ke VIII)*. Fakultas Ilmu Sosialk dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi

Sasangka, Danarka. 2006. "Coding Sheet Analisis Framing Pan dan Kosicki"  
Bahan kuliah Analisis Isi dan Framing, Semester Genap.Yogyakarta : UAJY

Tim Penyusun.*Data Internal Media Indonesia*.Jakarta.

**Internet :**

Mawardi, Dedy. 2009. *Wacana Koalisi Pasca Pemilu* (online). (Akses 26 April 2009) dan tersedia dalam World Wide Web : Lampungpost.com

Dwiwedhaswary, Inggried. 2008. *KPU tetapkan 34 Parpol peserta Pemilu* (online). (Akses 14 Juli 2009) dan tersedia dalam World Wide Web : <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/07/23065788/KPU.Tetapkan.34.Parpol.Peserta.Pemilu>

Dwiwedhawary, Inggried. 2008. *Prosentase persyaratan Capres berubah* (online). (Akses 16 Juli 2008) dan tersedia dalam World Wide Web : <http://nasional.kompas.com/read/2008/12/11/23066012/Prosentase.Persyaratan.Capres.Berubah>

Haposan. 2009. *Bisnis dan Pentas Politik* (online). (Akses 28 Mei 2009) dan tersedia dalam World Wide Web : <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/surya-paloh/biografi/02.shtml>

**Terbitan berkala :**

"Peta Koalisi Mulai Jelas", SKH Kompas edisi 13 April 2009

"Demokrat-PKS Sudah Solid", SKH Kompas edisi 27 April 2009

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 28 April 2009

SKH Kedaulatan Rakyat edisi 14 Mei 2009

"PKS akhirnya menyerah pada Boediono", SKH Media Indonesia edisi 16 Mei 2009

"Soetrisno Bachir ke SBY, Amien dukung JK", SKH Media Indonesia edisi 17 Mei 2009

"Membangun Koalisi Kelembagaan", Editorial Media Indonesia Edisi : 25 April 2009

"Koalisi Besar dengan Figur Baru", Editorial Media Indonesia Edisi 1 Mei 2009



## “PDIP PASTIKAN KOALISI ; dengan TIGA PARTAI”

12 April 2009

	UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
<b>SELEKSI</b>	1. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah PDIP memastikan akan menggalang koalisi dengan tiga partai yaitu PPP, Gerindra dan Hanura.</p> <p>Pelibat wacana :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Megawati (Ketua Umum PDIP), megawati tidak memberikan pernyataan mengenai koalisi yang sedang dibentuknya, namun dalam pertemuannya dengan Prabowo, Megawati mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu kali ini mengecewakan masyarakat karena banyaknya aduan (par.13).</li><li>2. Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra), tidak memberikan pernyataan mengenai koalisi partai-partai, tetapi justru memberikan pernyataan mengenai keprihatinan mengenai kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang terjadi dimana-mana. (par.14)</li></ol> <p>Pelantun wacana :</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Taufiq Kiemas (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP). Taufiq memegang jabatan penting dalam struktur organisasi PDIP dengan begitu wacana tentang PDIP akan berkoalisi dengan tiga partai menjadi kuat kebenarannya. Taufiq berani memastikan koalisi tersebut sesuai Megawati bertemu dengan Prabowo dan sebelumnya juga bertemu dengan Wiranto, <b>“Dengan Gerindra dan Hanura pasti,” kata Taufiq. Dan saat ditanya mengenai kemungkinan berkoalisi dengan Golkar yang dalam hal ini diluar tiga partai yang disebutkan sebelumnya, Taufiq mengelak. “ Besoklah, Rabu (15/4) sudah jadi koalisinya.”</b> (par.3). Ini lebih memastikan bahwa sejauh ini, PDIP memang baru memutuskan untuk berkoalisi dengan tiga partai yang disebut diatas.</li><li>2. Pramono Anung (Sekjen PDIP). Pernyataan Pramono semakin menguatkan adanya koalisi PDIP dengan Gerindra, Hanura dan PPP. <b>“ Dengan Gerindra pasti, Hanura pasti, serta PPP”.</b> (par. 4)</li><li>3. Wiranto (Ketua Umum Hanura), lain lagi dengan Wiranto. Beliau menyampaikan bahwa PDIP dan Hanura sama-sama menginginkan perubahan di negri ini. Pernyataan Wiranto menggambarkan</li></ol>
--	--

	<p>keinginan partai Hanura yang ingin menjalin koalisi dengan PDIP (par.7)</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1016 405 1926 655">4. Suryadharma (Ketua Umum PPP), dalam pernyataannya Suryadharma justru mewacanakan koalisi besar antara PDIP, Golkar dan PPP atau disebut <i>Golden Triangle</i>.(par.6) Hal ini menunjukkan bahwa sepertinya PPP tidak terlalu ingin menjalin koalisi dengan Gerindra dan Hanura seperti yang direncanakan oleh PDIP.</li><li data-bbox="1016 676 1926 874">5. Irgan Chairul Mahfiz (Sekjen PPP), di lain pihak menyatakan bahwa PPP lebih realistis jika merapat ke Demokrat. (par.11) Pernyataan ini merujuk pada konflik internal yang ada dalam tubuh PPP untuk menentukan dengan siapa PPP akan berkoalisi.</li><li data-bbox="1016 895 1926 1193">6. Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) hanya memberikan pernyataan bahwa partainya akan menjalin hubungan komunikasi dengan partai lain. SBY menambahkan bahwa koalisi harus dinyatakan dalam kontrak politik secara tertulis dan dijelaskan kepada masyarakat sehingga public bisa mengontrolnya.(par.13).</li></ol>
--	---

	2. Tematis	<p>Wacana: Koalisi PDIP, Gerindra, Hanura dan PPP ini sudah kuat baik untuk bertarung Pilpres maupun untuk menjadi oposisi. (par.8-10)</p> <p>Wacana: Meskipun memperoleh suara besar dalam Pemilu, Demokrat tetap memerlukan koalisi untuk mengajukan calon presiden karena persyaratan dalam UU memang seperti itu. (par.12)</p> <p>Wacana: Megawati dan Prabowo juga membicarakan soal keprihatinan penyelenggaraan Pemilu kali ini dalam komunikasi politiknya. <b>“Kami mempunyai keprihatinan yang sama, bahwa proses demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prabowo didampingi Megawati sesuai pertemuan.”Ini adalah pemilu terburuk dan paling kacau.”</b> (par.14)</p>
SALIANSI	3. Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead: Setelah hasil Pemilu 2009 diketahui, partai-partai politik bergerak membangun komunikasi sekaligus menjajaki koalisi. PDIP sebagai salah satu dari tiga partai papan atas menggalang koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua pendatang baru, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura.</li> <li>• Body: PDIP aktif mengadakan komunikasi politik dengan beberapa</li> </ul>

partai politik untuk menggalang koalisi.

**Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas memastikan koalisi tersebut kemarin di Jakarta seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subiyanto. Sebelumnya, Jumat (10/4), Megawati juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Hanura, Wiranto. (par.2)**

Saat ini PDIP juga sedang melakukan komunikasi dengan beberapa parpol lain. Bahkan dalam waktu dekat ada pertemuan dengan Golkar.(5)

**Pada pertemuan 12 Maret lalu, Megawati dan Kalla sepakat membentuk pemerintahan yang kuat. Pertemuan Megawati dengan Prabowo berlangsung pada 18 Maret dan Megawati dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada 19 Maret 2009....(par.6)**

**...Hanura juga sudah membicarakan langkah politik yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik bersama itu.(par.7)**

Sebelum diakhir paragraph penutup, ditulis mengenai Demokrat dengan perolehan suaranya yang mayoritas namun tetap memiliki

keharusan untuk menjalin koalisi dengan partai lain. Seakan ingin membandingkan bahwa PDIP telah gencar melakukan komunikasi politik dengan beberapa parpol, sedangkan Demokrat belum melakukan itu.

- Penutup : Megawati dan Prabowo tidak hanya membahas mengenai persoalan kepentingan partai, tetapi mereka juga merasa prihatin dengan penyelenggaraan Pemilu kali ini. Pernyataan ini dapat dianggap sebagai kritikan terhadap pemerintah, mengingat PDIP yang selalu berada pada posisi oposisi.

**Megawati dan Prabowo juga membicarakan soal keprihatinan penyelenggaraan Pemilu kali ini dalam komunikasi politiknya.**

**“ Kami mempunyai keprihatinan yang sam, bahwa proses demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” kata Prabowo didampingi Megawati se usai pertemuan.”Ini adalah pemilu terburuk dan paling kacau.” (par.14)**

**Hal senada diungkapkan Megawati. Menurut dia pemilu yang tadinya diharapkan berjalan lebih baik ternyata dengan persoalan daftar pemilih tetap. “Banyak aduan yang masuk dan rasa ketidakpuasan masyarakat karena tidak bisa memilih,”**

tukasnya.(par.15)

Pada bagian ini merepresentasikan penekanan isu dimana hal yang disorot paling utama adalah mengenai PDIP yang terkesan gencar mendekati beberapa partai politik untuk menggalang kekuatan. Bahkan, dibagian tengah atau body berita disisipkan mengenai rencana koalisi PDIP dengan Golkar mengingat selama ini Golkar adalah bagian dari partai pemerintah dan penguasa. Sebelum akhir berita, wartawan menuliskan mengenai keharusan sebuah partai politik menjalin koalisi dengan partai politik lain dan Demokrat digunakan sebagai contoh seolah-olah ingin menyindir, karena perolehan suara sementara yang di dapat oleh Demokrat mampu menembus presentase untuk maju tahap Pilpres tanpa bantuan presentase suara dari parpol lain. Wartawan seolah ingin membandingkan dimana sebelumnya menceritakan tentang PDIP yang aktif melakukan pendekatan untuk koalisi, dengan Demokrat yang sepertinya masih belum melakukan pendekatan untuk menggalang kekuatan. Pada bagian penutup masalah yang diangkat justru tidak lagi mengenai PDIP yang sedang gencar menjalin

	<p>koalisi, tetapi justru menekankan mengenai keprihatinan Megawati dan Prabowo akan penyelenggaraan Pemilu 2009 kali ini yang dinilai paling buruk. Jika dilihat, pada paragraph penutup ini dapat dilihat suatu hubungan antara paragraph sebelumnya mengenai keharusan berkoalisi dalam hal ini untuk Demokrat, dengan pernyataan kecewa Megawati dan Prabowo tentang Pemilu 2009. Wartawan bisa saja tidak menuliskan di bagian penutup mengenai keprihatinan Megawati dan Prabowo karena inti berita yang ingin disampaikan adalah mengenai koalisi. Tetapi berita ini ditutup dengan cerita mengenai keprihatinan Megawati dan Prabowo menjadi suatu penguatan bahwa wartawan ingin menyampaikan bahwa antara PDIP dan Demokrat adalah dua partai politik yang memang saling bersebrangan.</p>
<p>4. Retoris</p>	<p>Judul : PDIP Pastikan Koalisi ; dengan Tiga Partai</p> <p>Keywords : <b>‘pastikan’, ‘sudah pasti’, ‘memastikan’</b>. Kata pasti digunakan dalam judul dan sebagian besar paragraph dalam teks. Kata ‘pasti’ sendiri artinya sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu. Dalam PDIP pastikan Koalisi dengan tiga Partai, kata pastikan mengarah pada pengertian</p>

PDIP sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan berkoalisi dengan tiga partai lain. Kata memastikan dalam par.2, menguatkan lagi bahwa pihak PDIP aktif dan berhak mengambil keputusan yang pasti untuk berkoalisi dengan tiga partai lain. Selain itu kata 'memastikan' dapat juga menimbulkan kesan gerak cepat yang dilakukan PDIP padahal hasil penghitungan suara belum lama dilakukan.

Catchphrases :

Dalam par.14, "**Ini adalah pemilu terburuk dan paling kacau**". Kalimat ini tergolong sebagai kalimat yang menonjol dan menarik, karena penilaian Prabowo yang menyatakan bahwa pemilu tahun ini paling buruk dan kacau selama beberapa kali Indonesia mengadakan pemilu. Padahal yang menyelenggarakan Pemilu itu adalah pemerintah dan pemerintah dalam hal ini lebih mengacu ke SBY selaku Presiden.

Elemen Depiction dalam teks:

'Pertemuan elite partai politik **sudah berlangsung** sebelum Pemilu 9 April.'(par.6)

Frase ini menunjukkan bahwa elite parpol khususnya PDIP telah gencar

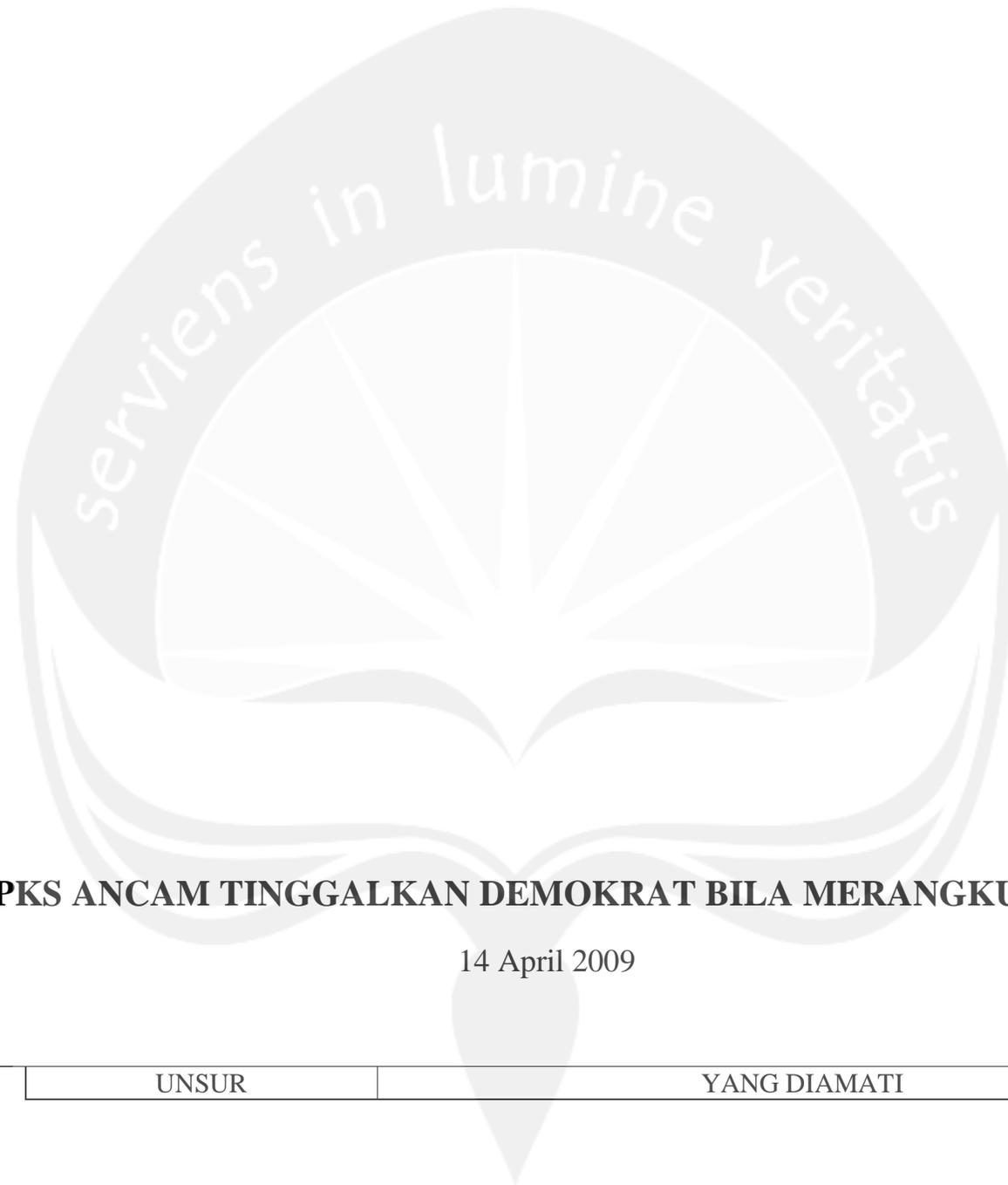
	<p>melangsungkan komunikasi politik sebelum Pileg.</p> <p>‘...jika Golkar ikut bergabung <b>sesuai komitmen awal</b>’ (par.10)</p> <p>Komitmen awal yang dimaksud disini adalah sebelum Pileg kepastian koalisi PDIP dengan tiga parpol ini disampaikan, PDIP dan Golkar pernah berkomitmen untuk sepakat membentuk pemerintahan yang kuat.</p> <p>Elemen metafora :</p> <p>‘PDIP sebagai salah satu dari tiga <b>partai papan atas</b> menggalang koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)...’(par.1 kalimat 2)</p> <p>Frase ‘partai papan atas’ dapat diartikan sebagai partai yang memiliki banyak pengikut atau pemilihnya, partai yang besar dan PDIP dimasukkan dalam golongan partai besar.</p> <p>Paragraf akhir, “Menurut dia, Pemilu yang tadinya sangat diharapkan berjalan lebih baik <b>ternoda</b> dengan persoalan daftar pemilih tetap.” Kata ‘ternoda’ artinya terkena sesuatu yang kotor. Kotor dalam konteks ini adalah perbuatan yang kotor atau kecurangan. Jadi menurut Megawati Pemilu kali ini terdapat banyak kecurangan.</p>
--	---

Frame Seleksi : Dalam teks ini terlihat pihak-pihak yang dilibatkan adalah PDIP dalam hal ini Megawati, Prabowo, Wiranto, Suryadharma Ali, Chairul Mahfiz dan SBY. Keterlibatan Megawati, Prabowo dan Wiranto serta Suryadharma Ali

disini ingin memperlihatkan bahwa hubungan diantara ketiga partai ini sudah terjalin akrab dan memiliki satu visi untuk membangun pemerintahan. Koalisi yang terbentuk ini digambarkan sebagai sebuah koalisi yang kuat. Walaupun kemudian ditengah-tengah alur teks terdapat wacana konflik internal dalam tubuh PPP karena ternyata belum semua pihak setuju untuk berkoalisi dengan PDIP tetapi lebih memilih merapat ke Demokrat. Sedang di akhir teks, wacana yang diangkat kemudian tidak lagi mengenai kepastian koalisi namun tentang keprihatinan penyelenggaran Pileg. Wacana ini diletakkan setelah paragraph sebelumnya menyebutkan tentang Pernyataan SBY yang mengatakan bahwa partainya tetap akan menjalin komunikasi dengan partai lain. Ini seakan memberi kesan bahwa Demokrat masih jual mahal dan belum memiliki hubungan yang dekat dengan partai lain (tidak seperti PDIP) karena merasa mendapatkan perolehan suara tertinggi dalam Pilleg. Disisi lain dapat dilihat juga bahwa kritik mengenai keprihatinan yang diletakkan diakhir teks ingin menyampaikan bahwa PDIP dan Demokrat adalah dua partai yang memang bersebrangan.

Frame Saliansi : Dalam teks ini digambarkan PDIP melakukan gerak cepat dengan berbagai kata 'pasti' yang muncul baik di judul, lead maupun body berita. PDIP juga digambarkan sebagai partai besar yang dekat dengan partai-partai kecil lain dan tidak segan bergabung untuk koalisi membentuk suatu pemerintahan. Disini juga Demokrat (yang notabene adalah saingan terbesar PDIP) digambarkan sebagai partai yang seakan-akan tidak memerlukan koalisi. Selain itu Mega dan Prabowo mengkritik Pemilu tahun ini karena dianggap banyak kecurangan..

Media Frame : Apa yang digambarkan oleh Media Indonesia cenderung melihat PDIP sebagai partai besar yang melakukan gerak cepat dengan membina komunikasi politik yang baik bahkan sudah menjalin hubungan yang mengarah ke koalisi dengan partai-partai pendatang baru. PDIP juga tetap digambarkan sebagai pihak yang berlawanan dengan Demokrat.



**PKS ANCAM TINGGALKAN DEMOKRAT BILA MERANGKUL JK**

14 April 2009

	UNSUR	YANG DIAMATI
--	-------	--------------

<b>SELEKSI</b>	<b>FRAMING</b>	
	1. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah PKS mengancam akan meninggalkan Demokrat jika SBY merangkul JK karena dianggap hanya akan mengulang kegagalan dan kekecewaan.</p> <p>Pelibat wacana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKS Dimunculkan dalam wacana ini karena PKS menjadi pihak yang melakukan ancaman jika Susilo Bambang Yudoyono merangkul Jusuf Kalla untuk kedua kalinya.</li> <li>2. Demokrat Dimunculkan karena Demokrat adalah partai yang mendapat ancaman dalam wacana ini.</li> <li>3. Susilo Bambang Yudhoyono Dimunculkan karena SBY adalah Calon Presiden partai Demokrat dan pada Pemilu sebelumnya pernah berpasangan dengan Jusuf Kalla</li> <li>4. Jusuf Kalla Dimunculkan karena JK adalah pihak yang diisukan akan dipasangkan lagi dengan SBY.</li> </ol>

Pelantun wacana :

1. Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid  
**“Seharusnya bukan koalisi daur ulang yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan,” kata ketua MPR itu.(par.3)**
2. Sekjen PKS Anis Matta.  
**“Koalisi yang kuat dan permanen akan sulit dibangun jika setiap orang bisa sesuka hati datang dan pergi dari koalisi tanpa komitmen yang jelas,” katanya.(par.4)**
3. Ketua Umum Partai Demokrat Hadi.  
**Ketua Umum Partai Demokrat enggan menanggapi ancaman PKS. “Itu belum terjadi,” ujar Hadi se usai rapat tertutup membahas koalisi DPP Partai Demokrat.(par. 5)**
4. Gandung Pardiman (Ketua DPD Golkar Yogyakarta).  
**“DPD Golkar akan boikot,” kata Ketua DPD Golkar Yogyakarta Gandung Pardiman, kemarin. (par.9)**  
**Gandung mengingatkan DPP jangan terlalu bernafsu mempertahankan SBY-JK. Berdasarkan pengalaman koalisi selama ini, kata dia, Demokrat tidak memperlakukan Golkar**

secara adil. “ Kalau kita pertahankan duet SBY-JK kita hanya jadi budak politik,” katanya. (par.10).

Pernyataan ini muncul menyusul adanya wacana mengenai rencana menduetkan lagi SBY-JK.

5. Cyrilus Bau Engo (Sekertaris DPD Golkar NTT).

**Golkar NTT juga menolak duet SBY-JK. Sekertaris DPD Golkar NTT Cyrilus Bau Engo mnejelaskan hingga kini pihaknya tetap konsisten mengusung JK sebagai capres.** (par.11)

6. Max Lumintang (Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara).

**Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengingatkan DPP untuk tidak mengemis pada Demokrat. Sekalipun kalah dalam Pemilu Golkar tidak boleh mengemis untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden.**(par.12)

7. Uu Rukmana (Jubir DPD Golkar se-Indonesia).

**“Kita bukan partai pengemis,. Kita tetap konsisten mendukung JK sebagai capres,”** katanya.(par.13)

8. M Qadari (Direktur Eksekutif Indo Barometer).

	<p><b>Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari juga menyarankan agar JK tetap maju sebagai capres untuk menyelamatkan partai.(par.14)</b></p>
<p>2. Tematis</p>	<p>Wacana: Pihak Demokrat tidak terlalu menanggapi ancaman PKS dan tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan Golkar.</p> <p><b>Ketua Umum Partai Demokrat enggan menanggapi ancaman PKS...(par.5)</b></p> <p><b>Namun, Hadi tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan Golkar. (par.6)</b></p> <p>Wacana: Rencana Golkar untuk berbalik haluan dan merapat ke Demokrat mendapat perlawanan dari DPD Partai Golkar dan Direktur Eksekutif Indo Barometer.</p> <p><b>Akan tetapi, rencana menduetkan lagi SBY-JK justru mendapat</b></p>

	<p>perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. <b>“DPD Golkar akan boikot”</b>(par.9)</p> <p><b>“Kalau kita pertahankan duet SBY-JK kita hanya jadi budak politik”</b> (par.10)</p> <p><b>Golkar NTT juga menolak duet SBY-JK</b> (par.11)</p> <p><b>“...Golkar tidak boleh mengemis untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden”</b> (par.12)</p> <p><b>“Golkar bukan partai pengemis, kita tetap konsisten mendukung JK sebagai capres”</b> (par.13)</p> <p><b>Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari juga menyarankan agar JK tetap maju sebagai capres untuk menyelamatkan partai. (par.14)</b></p>
<p>3. Sintaksis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam akan meninggalkan partai Demokrat bila Susilo Bambang Yudhoyono merangkul Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Duet SBY-JK dinilai PKS sebagai koalisi daur ulang yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan.</li> <li>• Body: Pernyataan dari petinggi PKS yang menunjukkan penolakan jika Demokrat berkoalisi dengan Golkar. Kemudian dilanjutkan</li> </ul>

## SALIANSI

dengan konfirmasi dari pihak Demokrat bahwa partai Demokrat belum memastikan koalisi dengan Golkar walaupun Demokrat juga tidak menampik peluang berkoalisi dengan Golkar. Sementara itu dari pihak Golkar sendiri tidak setuju jika Golkar akhirnya kembali merapat ke Demokrat karena dianggap menjual harga diri. Karenanya DPD tetap mengukung JK sebagai capres Golkar.

- Penutup : Sementara itu, Ketua Umum partai Golkar Jusuf Kalla bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Kawasan Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, pada pukul 22.00. Setelah bertemu selama 40 menit, JK meninggalkan Cikeas tanpa memberikan keterangan pers sedikitpun.

Dalam berita ini, ancaman PKS kepada Demokrat jika SBY berduet kembali dengan JK diletakkan dibagian paling awal atau lead. Wartawan menyorot dan mengangkat isu ini sebagai sesuatu yang penting untuk disampaikan. Dan dibagian body berita, pernyataan dalam lead didukung dengan pernyataan dari petinggi PKS mengenai ancaman tersebut. Namun setelah menampilkan pernyataan para petinggi PKS, ditampilkan pula konfirmasi dari

	<p>pihak terkait dalam hal ini adalah Demokrat yang menyatakan belum memastikan koalisi dengan Golkar. Masih dalam bagian body berita, dicantumkan juga pernyataan sebaliknya dari Golkar. Bahwa Golkar sebenarnya juga tidak ingin berkoalisi dengan Demokrat. Hal ini dapat dilihat sebagai penggambaran posisi Demokrat yang seakan ‘direndahkan’. Karena disatu sisi PKS (yang sebenarnya sebagai salah satu partai pendukung Demokrat yang semestinya tidak berhak mengancam Demokrat), mengancam agar SBY jangan sampai berkoalisi ulang dengan Golkar. Tetapi di sisi lain, Golkar sendiri sebenarnya tidak ingin berkoalisi dengan Demokrat.</p> <p>Bahkan diakhir berita ditutup dengan JK selaku Ketua Umum Pusat Golkar yang belum menyampaikan tanggapan apapun atas isu diatas padahal beliau baru saja bertemu dengan SBY di Cikeas.</p>
4. Retoris	<p>Judul : PKS Ancam Tinggalkan Demokrat bila Merangkul JK.</p> <p>Keywords :</p> <p>“<b>PKS Ancam Tinggalkan</b> Demokrat bila Merangkul JK” pada judul merupakan kata kunci dalam wacana ini. Kata ini menggambarkan</p>

penolakan dan gambaran tidak setuju atas isu mengenai duet SBY-JK untuk yang kedua kalinya

**‘ancam’, ‘mengancam’**. Kata ini terdapat dalam Judul berita dan bagian lead berita. Kata ini berarti menyatakan maksud atau niat yang merugikan, menyulitkan pihak lain. Kata ini digunakan untuk menekankan niat atau maksud PKS yang akan meninggalkan Demokrat bila SBY merangkul JK dalam koalisi. Kata ini secara tidak langsung merendahkan Demokrat, karena pemakaian kata ‘ancam’ menggambarkan PKS partai kecil tapi berani mengancam Demokrat yang notabene jumlah suaranya lebih besar.

**‘berpikir ulang mendukung..’** (par.3)

Kata ini dalam teks berarti PKS mengancam meninggalkan atau kemungkinan besar meninggalkan Demokrat. Ini juga semakin menegaskan image Demokrat yang direndahkan. Karna sebenarnya kalau terjadi Demokrat kembali menggandeng Golkar dan PKS mundur, jumlah suara kedua partai ini jauh melampaui jika Demokrat bersdama PKS.

Elemen Depiction dalam teks:

**‘petinggi partai’** pada par.2. Frase ini untuk menegaskan bahwa pernyataan ancaman yang disampaikan oleh PKS atas Demokrat adalah

sesuatu hal yang serius karena disampaikan oleh para petinggi PKS.

**‘tidak menampik’** pada par.6. tidak menampik bisa saja dianggap sebagai pernyataan membenarkan sesuatu. Dalam hal ini Demokrat tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan Golkar atau secara tidak langsung membenarkan wacana kembali berkoalisi dengan Golkar.

**‘Golkar’** ‘...menanggapi keinginan Golkar untuk balik kanan merapat ke Demokrat’(par.2). Awalnya kata ini pada paragraf 2 dipakai untuk menggambarkan seolah-olah semua elemen dari Golkar memang berkeinginan untuk kembali berduet dengan SBY. Tetapi kata ‘Golkar’ pada kalimat **‘...ternyata elite Golkar lebih cepat berbalik haluan dan merapat ke Demokrat sebagai pemenang pemilu. Rencana koalisi itu akan dibahas dalam rapat DPP Golkar...’** (par.8). Golkar yang dimaksud disini ternyata hanya merujuk pada pengurus DPP saja dan bukan Golkar secara keseluruhan. Ditegaskan lagi dalam pernyataan Gandung Pardiman **‘Gandung mengingatkan DPP jangan terlalu bernafsu...’**(par.10). Jelas sekali bahwa DPP lah yang bersikeras mempertahankan SBY-JK.

Elemen metafora dalam teks:

Par.1 “Duet SBY JK dinilai PKS sebagai **koalisi daur ulang** yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan”. Kata ‘daur ulang’ berarti membuat kembali barang bekas, tidak terpakai atau sampah dan membuat sedemikian rupa agar bisa digunakan kembali. Jadi dapat diartikan ‘koalisi daur ulang’ adalah koalisi yang sebenarnya sudah gagal, sudah pernah namun dipaksakan untuk kembali sehingga hasilnya nanti akan mengecewakan.

“..kita hanya jadi **budak politik**”. Par.10 kalimat 2.

Kata ‘budak politik’ yaitu istilah untuk Golkar yang selama ini dirasa tidak diperlakukan dengan adil oleh Demokrat semasa pemerintahan. Kata ‘budak’ sendiri sudah memiliki konotasi yang buruk yaitu pesuruh, orang yang disuruh untuk melakukan sesuatu oleh majikannya.

Elemen catchphrases dalam teks:

Par.1 dan 3. “**Seharusnya bukan koalisi daur ulang yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan**”. Kalimat ini dengan jelas ingin menyampaikan bahwa koalisi yang pernah terjalin antara SBY-JK yang lalu sebenarnya koalisi yang gagal karena banyak menuai kekecewaan dalam perjalanannya.

Par.4 “**Koalisi yang kuat dan permanen akan sulit dibangun jika setiap**

	<p><b>orang bisa sesuka hati datang dan pergi dari koalisi tanpa komitmen yang jelas“.</b> Kalimat ini ‘terdengar’ sedikit menyindir Golkar yang sebelumnya sudah memutuskan untuk berpisah dengan Demokrat dan mempunyai capres sendiri kemudian berbalik haluan dan berniat kembali lagi dengan SBY. Hal ini dianggap sebagai penghalang terbentuknya sebuah koalisi yang kuat.</p> <p>Par.13 <b>“Golkar bukan partai pengemis. Kita tetap konsisten mendukung JK sebagai capres”.</b> Kata ‘mengemis’ memiliki arti memintaminta, orang yang miskin dan tidak punya apa-apa, meminta sesuatu kepada yang kaya, sedangkan ‘pengemis’ adalah orang yang melakukan, orang rendahan, tidak punya apa-apa. Kalimat ini merupakan kalimat yang menarik dan menonjol yang diletakkan di bagian akhir teks. Ini untuk menegaskan Golkar mampu menjaga harga diri.</p>
--	--

Frame Seleksi :

Dalam unsure seleksi, Media Indonesia justru lebih banyak memberikan porsinya untuk mengangkat wacana tentang penolakan pihak DPD Golkar atas isu duet SBY-JK demi harga diri Golkar. Ada 6 paragraf yang memuat tentang penolakan ini. Sedangkan untuk pembahasan mengenai wacana PKS yang akan mengancam meninggalkan Demokrat

justru hanya dibahas sebanyak 4 paragraf walaupun dijadikan lead dan diletakkan pada awal berita. Dua paragraph lainnya menuliskan mengenai pihak Demokrat yang tidak terlalu menanggapi ancaman PKS tersebut bahkan tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan Golkar. Selain itu 2 paragraf dalam body berita menampikan bahwa setelah penghitungan cepat pemilu 2009, sebagian elite DPP Golkar berbalik haluan dan merapat ke Demokrat. Begitupun dengan jumlah narasumber yang ditampilkan. Narasumber dari PKS hanya 2 orang, Demokrat 1 orang dan Golkar justru berjumlah 4 orang. Narasumber Golkar yang ditampilkan adalah dari DPD Golkar yang semua menyatakan penolakan dan bukan dari DPP Golkar yang berwacana kembali merapat ke Demokrat. Pihak luar yang ditampilkan pun, yang memiliki sikap setuju bila JK maju sebagai capres.

Frame Saliansi :

PKS menolak adanya rencana koalisi ulang SBY-JK karena menganggap koalisi itu hanya akan mengulang kegagalan dan kekecewaan. Kata mengancam yang digunakan berarti merendahkan Demorat karena PKS yang jumlah suaranya jauh dibawah Demokrat berani menyuarakan ancaman. Selain itu Golkar dianggap tidak berkomitmen karena sebelumnya telah memutuskan JK sebagai Capres Golkar. Golkar yang ditekankan disini adalah Golkar dari kalangan DPP yang bersikeras berputar haluan merapat ke SBY. Sedangkan sebagian besar DPD Golkar menolak rencana ini. Di sisi lain, Demokrat tidak menanggapi penolakan dan sikap tegas PKS tetapi justru tidak menampik akan berkoalisi dengan Golkar.

Media Frame : Dalam berita ini Media Indonesia ingin menunjukkan bahwa ancaman PKS terkesan merendahkan Demokrat ditambah lagi dengan penolakan sebagian besar pihak DPD Golkar atas rencana koalisi SBY-JK. Penonjolan mengenai Demokrat yang justru masih membuka peluang untuk bisa berkoalisi dengan Golkar, semakin menggambarkan Demokrat sebagai partai yang tidak terlalu penting untuk diperebutkan.

## **GOLKAR TINGGALKAN DEMOKRAT**

23 April 2009

UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
1. Skrip	Realitas yang diangkat adalah JK resmi berpisah dengan SBY dalam menghadapi pilpres 2009.  Pelibat wacana :

**SELEKSI**

1. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Penasihat Demokrat. Tidak memberi pernyataan secara langsung, namun apa yang disampaikan Anas merupakan mandat dari SBY
2. Jusuf Kalla, Ketua Umum Golkar. Ditampilkan dalam wacana karena JK yang memimpin rapat DPP Golkar.
3. Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar. Ditampilkan dalam teks karena salah satu pihak yang mengikuti rapimnas Golkar.
4. Pengurus Harian DPP Golkar. Ditampilkan karena salah satu yang menghadiri pertemuan pada malam harinya dengan JK se usai rapimnas.
5. Anggota Dewan Penasihat Golkar. Ditampilkan karena juga menghadiri pertemuan pada malam hari dengan JK.
6. Tim Sembilan.

Pelantun wacana :

1. Soemarsono (Sekjen Golkar), Pimpinan DPD I Golkar.  
**“Setelah melakukan komunikasi yang intensif dengan partai Demokrat, ternyata kita tidak menemukan titik temu. Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mencapai mufakat,” kata Sekjen Soemarsono dalam konferensi pers se usai rapat DPP Partai Golkar kemarin.(par.2)**

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1025 304 2074 715">2. Anas Urbaningrum, Ketua DPP Demokrat bid. Politik Partai Demokrat. <b>Anas menjelaskan Demokrat tidak menduga dengan sikap Golkar yang menyatakan tidak berkoalisi dengan Demokrat. SBY, kata Anas, mengarahkan agar masalah yang belum disepakati diendapkan terlebih dahulu untuk dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya.(par.9). “Namun PD menghormati sepenuhnya keputusan partai Golkar. Itu adalah hak politik Golkar meskipun disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak,” kata Anas.(par.10)</b></li><li data-bbox="1025 730 2074 879">3. Pihak Golkar yang tidak ikut dalam Rapimnas khusus Golkar yaitu Icek Baskoro (Ketua DPD II Golkar Grobogan, Jateng). <b>“Keputusan itu merupakan langkah maju.” (par.11)</b></li><li data-bbox="1025 895 2074 1198">4. Purwanto (Ketua DPD II Golkar Kab. Sleman. Keduanya memberikan apresiasi terhadap langkah Golkar memisahkan diri dengan Demokrat. <b>Keputusan DPP Golkar yang bercerai dengan Demokrat terus mendapat dukungan daerah. Ketua DPD II Golkar Kab. Sleman Purwanto menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak nyaman bagi Golkar bila berkoalisi dengan Demokrat.</b></li><li data-bbox="1025 1214 2074 1303">5. PDIP diwakili oleh Taufiq Kiemas. Menyatakan apresiasinya dengan menerima Golkar dengan tangan terbuka untuk berkoalisi. (par.12)</li></ol>
--	--

	<p>6. Hadi Utomo, Ketua Umum Partai Demokrat.</p> <p><b>Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menyatakan, saat ini kedua partai sebenarnya sedang menjajaki kemungkinan untuk melakukan koalisi. Namun dengan keputusan Golkar itu, Demokrat siap berkompetisi dengan Golkar. Ia tetap optimistis SBY menang.(par.13)</b></p>
<p>2. Tematis</p>	<p>Wacana : Golkar berpisah dengan Demokrat karena negosiasi buntu dan tidak menemukan titik temu.</p> <p><b>“Setelah melakukan komunikasi yang intensif dengan Partai Demokrat, ternyata kita tidak menemukan titik temu. Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mencapai mufakat.” (par.2)</b></p> <p><b>“Negosiasi buntu karena Golkar dipaksa mengajukan nama cawapres lima orang” (par.3)</b></p> <p>Wacana: Demokrat sepertinya terkejut dengan keputusan Golkar yang memilih meninggalkan Demokrat. Dan dari pihak demokrat menyayangkan hal tersebut karena dianggap keputusan yang diambil Golkar adalah keputusan sepihak. Namun Demokrat menghormati keputusan Golkar dan siap berkompetisi. Demokrat optimis menang.</p> <p><b>“Anas menjelaskan tidak menduga dengan sikap Golkar yang menyatakan tidak</b></p>

	<p><b>berkoalisi dengan Demokrat. SBY, kata Anas, mengarahkan agar masalah yang belum disepakati diendapkan terlebih dahulu untuk dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya.”(par.9)</b></p> <p><b>“Namun dengan keputusan Golkar itu, Demokrat siap berkompetisi dengan Golkar. Ia tetap optimis SBY menang” (par.13)</b></p> <p>Wacana: Keputusan Golkar meninggalkan SBY mendapat dukungan dari banyak pihak dalam tubuh Golkar itu sendiri maupun dari partai lain. PDIP membuka ‘pintu’ untuk berkoalisi dengan Golkar.</p> <p><b>“Keputusan DPP Golkar yang bercerai dengan Demokrat terus mendapat dukungan daerah.”(par.11)</b></p>
<p>3. Sintaksis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead: Slogan ‘bersama kita bisa’ yang dikumandangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sejak 2004 kini tinggal menjadi kenangan. Sejak kemarin keduanya resmi berpisah. Partai Golkar meninggalkan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2009.</li> <li>• Body: Alasan mengapa Golkar akhirnya meninggalkan Demokrat dipaparkan pada paragraph 3 setelah paragraph 1 dan 2 menyampaikan tentang kepastian berpisahannya Golkar dan Demokrat. Kemudian paragraph selanjutnya (par.5-6)</li> </ul>

**SALIANSI**

berisi tentang siapa saja peserta Rapimnas Khusus Golkar yang diadakan. Tanggapan kekecewaan Demokrat mengenai keputusan Golkar meninggalkan Demokrat diletakkan di paragraph 8-11. Setelah itu disusul dengan pernyataan apresiasi pihak DPD II dan partai lain yang mendukung keputusan Golkar (par11,12).

- Penutup : Pernyataan dari pihak Demokrat bahwa sebenarnya kedua partai masih dalam tahap menjajaki. Namun apapun keputusan Golkar, Demokrat siap untuk menang.(par 13)

Sejarah mencatat tidak ada korelasi antara pemilu legislatif dan pilpres. Presiden terpilih 2004 bukan dari partai pemenang pemilu 2004.(14)

Ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh wartawan dalam teks ini. Keputusan Golkar yang meninggalkan Demokrat diletakkan di lead dan beberapa paragraf awal, menunjukkan bahwa realitas ini yang ingin ditampilkan terlebih dulu. Lalu pada bagian body berita, ditampilkan mengenai Demokrat yang tidak menduga dan menyangkan keputusan Golkar untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat. Setelah itu ditampilkan mengenai dukungan beberapa DPD Golkar mengenai keputusan Golkar ini. Namun, setelahnya ditampilkan lagi pernyataan dari pihak Demokrat bahwa Golkar dan Demokrat

	<p>sebenarnya masih dalam tahap penajajaran. Penempatan pernyataan diakhir paragraph ini seakan ini menggambarkan keadaan Demokrat yang menyesali keputusan Golkar.</p>
<p>4. Retoris</p>	<p>Judul : Golkar tinggalkan Demokrat.</p> <p>Keywords : ada beberapa kata yang maknanya sebenarnya bermuara pada pengertian tidak lagi bersama. Kata itu adalah <b>'tinggalkan'</b> yang tertulis pada judul, <b>'berpisah'</b> (par.1 kalimat 2), <b>'meninggalkan'</b> (par1. Kalimat 3), <b>'tidak berkoalisi'</b> (par 9 kalimat 1), <b>'bercerai'</b> (par.11 kalimat 1).</p> <p>Kata 'tinggalkan' disini dipakai dalam Judul berita dan ingin menyampaikan bahwa berpisahannya Golkar dan Demokrat adalah atas kemauan dari pihak Golkar. Kata 'tinggalkan' sekilas memberi kesan bahwa Golkar tidak membutuhkan Demokrat, maka dari itu Golkar kemudian meninggalkan Demokrat. Begitu pula dengan penggunaan kata 'meninggalkan' yang menggambarkan pihak Golkar yang terkesan secara sepihak mengambil keputusan. Begitu juga dengan 'berpisah' menggambarkan situasi yang tidak lagi bersama.</p> <p>Selain itu ada frase lain juga yang memiliki pengertian yang sama yaitu, <b>'...tidak menemukan titik temu'</b> (par. 1 kalimat 1), <b>'...tidak mencapai mufakat'</b></p>

(par 1 kalimat 2), '**negosiasi buntu..**'(par 3 kalimat 3). Frase-frase ini memiliki pengertian yang hampir sama yaitu tidak ada jalan, tidak mencapai kata sepakat. Frase-frase ini untuk menggambarkan bahwa negosiasi antara Golkar dan Demokrat tidak mencapai persetujuan dikeduanya.

Elemen catchphrases dalam teks:

**Demi martabat partai, 'tidak bersama kita bisa'**.(sub judul)

Kalimat ini ditampilkan di awal berita dan dalam hal ini ingin menegaskan bahwa demi harga diri partai, Golkar tidak lagi berkoalisi dengan Demokrat pun bisa. Kata 'tidak' ditambahkan dalam slogan yang sebelumnya dipakai saat Golkar dan Demokrat masih bersama dalam sebuah koalisi dan seolah terlihat ingin menyindir.

**'..bersama kita bisa..'** (par.1 kalimat 1). Kalimat ini adalah slogan yang dipakai Golkar dan Demokrat saat mereka masih bersama.

Elemen depiction dalam teks:

'Negosiasi **buntu** karena Golkar dipaksa...' (par.3 kalimat 3) Kata 'buntu' artinya tertutup, tidak ada jalan, tertutup salah satu ujungnya.

Jadi negosiasi antara Golkar dan Demokrat tidak menemui jalan apapun karena Golkar dipaksa mengajukan nama cawapres lima orang.

‘Permintaan itu dianggap sebagai **intervensi...**’ (par.3 kalimat 5). Kata ‘intervensi’ artinya campur tangan. Dalam hal ini, beberapa permintaan Demokrat terhadap Golkar, dianggap Golkar sebagai bentuk campur tangan.

‘...Demokrat **tidak menduga** dengan sikap Golkar...’(par.9 kalimat 1). Frase ‘tidak menduga’ dapat juga berarti tidak menyangka, tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Jadi Demokrat tidak menyangka bahwa Golkar menyatakan tidak ingin berkoalisi dengan Demokrat. Keputusan Golkar ini tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

‘...meskipun **disayangkan** karena itu disampaikan secara **sepihak**’ (par.10 kalimat 2). Kata ini ada unsur kekecewaan didalamnya. Dalam konteks ini, Demokrat menyampaikan rasa kecewanya karna keputusan sepihak yang diambil oleh Golkar. Kata sepihak mengacu pada ‘salah satu pihak’. Demokrat kecewa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Elemen metafora dalam teks:

‘...masalah yang belum disepakati **diendapkan** terlebih dahulu...’ (par.9 kalimat 2). Kalimat ini memiliki arti bahwa masalah yang belum disepakati antara Golkar dan Demokrat didiamkan dulu untuk sementara waktu, ditunda pembahasannya untuk dikaji lagi lebih dalam.

Frame Seleksi : Realitas wacana yang dipilih disini adalah Golkar tidak lagi bersama dengan Demokrat. Wacana yang diangkat tidak kemudian seutuhnya mengenai dukungan/kegembiraan dari dalam tubuh Golkar seperti (DPD) yang selama ini memang menginginkan perpisahan. Namun dimunculkan juga tanggapan dari pihak Demokrat sebagai pihak yang 'ditinggalkan'. Ini sepertinya ingin memperlihatkan bagaimana reaksi SBY dan Demokrat pasca keputusan Golkar. Pernyataan Anas Urbaningrum selaku wakil Demokrat, menggambarkan bahwa perpisahan yang terjadi antar Golkar dan Demokrat adalah memang sepenuhnya kemauan Golkar. Ini cenderung ingin menunjukkan bukti bahwa Golkar ternyata berani mengambil keputusan dengan meninggalkan Demokrat secara sepihak dan ada kesan Golkar tidak membutuhkan Demokrat. Selain itu dimunculkan pernyataan Anas yang menyayangkan sikap Golkar ini. Ini dapat diartikan sebagai ungkapan penyesalan Demokrat mengenai keputusan yang diambil Golkar. Pada akhir teks juga dimunculkan pernyataan dari Hadi Utomo Ketua Umum Demokrat ini menyatakan sebenarnya kedua partai ini (Golkar dan Demokrat) sedang dalam posisi saling menjajaki. Pernyataan ini semakin menguatkan kesan penyesalan Demokrat atas keputusan Golkar. Di sisi lain, pernyataan dukungan dari DPD II Golkar atas keputusan ini, hanya digambarkan dalam 2 paragraf saja..

Frame Saliansi : Golkar akhirnya berani meninggalkan Demokrat. Keputusan ini tidak diduga sebelumnya oleh Demokrat dan Demokrat menunjukkan rasa kecewanya dengan menyayangkan keputusan tersebut karena hanya diambil secara sepihak walaupun begitu Demokrat tetap optimis SBY akan menang tanpa Golkar. Kalimat terakhir pada bagian penutup sedikit menyindir keoptimisan pihak Demokrat yang merasa yakin menang dalam pilpres nanti.

Media Frame : Dalam berita ini Media Indonesia menggambarkan Golkar sebagai partai yang akhirnya mampu menjaga martabat partai dengan membuat keputusan besar meninggalkan Demokrat secara sepihak. Demokrat digambarkan sebagai pihak yang menyayangkan keputusan itu dan terkesan masih mengharapkan Golkar.



**JK-MEGA BELUM SEPAKAT**

**SOAL CAPRES-CAWAPRES**

25 April 2009

	UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
<b>SELEKSI</b>	1. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah JK dan Mega belum sepakat soal Capres dan Cawapres walaupun telah ada wacana koalisi diantara keduanya.</p> <p>Pelibat wacana :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Dewan Penasihat, Surya Paloh. Dimunculkan disini karena beliau ikut mendampingi Jusuf Kalla saat mendatangi kediaman Megawati.</li> <li>2. Sekjen, Soemarsono. Dimunculkan karena juga ikut saat pertemuan antara JK dan Megawati.</li> <li>3. Burhan Napitupulu, beliau juga ikut bersama rombongan JK mendatangi kediaman Megawati.</li> <li>4. Ketua Fraksi Golkar DPR, Priyo Budi Santoso pun ikut serta dalam rombongan ini.</li> <li>5. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Taufiq Kiemas. Dimunculkan karena Taufik bersama rekan PDIP lain menyambut kedatangan Jusuf Kalla.</li> <li>6. Puan Maharani juga ikut menyambut Jusuf Kalla</li> <li>7. Sekjen , Pramono Anung dimunculkan karena juga turut menyambut kedatangan Jusuf Kalla.</li> <li>8. Prabowo Subianto. Dimunculkan karena beliau disebut-sebut sebagai figur</li> </ol>

cawapres yang paling kuat dan akan menjadi rebutan.

**« Dari data kita, Prabowo akan menjadi rebutan. Peluangnya 40% baik sebagai cawapresnya JK maupun cawapresnya Megawati »** (par.14)

Pelantun wacana :

1. Ketua Umum PDIP, Megawati.

Megawati menyatakan bahwa masih ada kendala diantara kedua partai untuk mengusung capres-cawapres yang sama. Beliau juga mengakui kesulitan menemukan sosok cawapres. Meskipun begitu, kedua partai sepakat membangun pemerintahan yang kuat. (par 3,6,7)

2. Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla. JK juga mengungkapkan bahwa Golkar dan PDIP sepakat membangun pemerintahan yang kuat dimasa mendatang. JK menyatakan bahwa posisi capres dan cawapres keduanya sedang dibicarakan. (par.8,9)

3. Ketua Umum Hanura, Wiranto.

**“Kita akan bangun koalisi yang lebih besar`lagi agar terbangun pemerintahan yang lebih kuat lagi“** (par.10)

4. Direktur Puskaptis, Husain Yazid.

Husain menyatakan bahwa Prabowo akan menjadi rebutan sebagai cawapres

**SALIANSI**

	<p>baik untuk JK maupun Mega. Sedangkan SBY dikatakan tidak memiliki cawapres yang benar-benar kuat.(par14,15)</p> <p>5. Pakar politik UIN, Bachtiar Effendy.</p> <p>Bachtiar menyatakan bahwa koalisi baru yang dimotori Golkar dengan PDIP berpeluang memenangi pilpres. Menurutnya pertarungan akan menjadi menarik karena kekuatan bisa berimbang. (par16,17)</p>
2. Tematis	<p>Wacana : Prabowo Subianto menjadi cawapres paling kuat untuk berpasangan dengan JK ataupun Mega</p> <p><b>Di blok kebangsaan figure cawapres yang paling kuat adalah Prabowo.</b> (par.14)</p> <p>Wacana : Koalisi baru yang dimotori Golkar dan PDIP berpeluang memenangi pilpres.</p> <p><b>“Pertarungan akan menjadi menarik karena kekeuatan bisa berimbang”</b> (par.17)</p>
3. Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lead: Calon Presiden dari Partai Golkar Jusuf Kalla terus bergerak lebih cepat lebih baik. Setelah kemarin pagi bertemu Ketua Umum Hanura Wiranto, tadi malam JK menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.</li><li>• Body: Berisi pernyataan Megawati mengenai kesepakatan koalisi Golkar dan PDIP walaupun belum menemui kesepakatan mengenai posisi capres-cawapres. Disebutkan juga Megawati kesulitan mencari cawapres. Setelah itu</li></ul>

diisi dengan pernyataan dari Jusuf Kalla yang tidak jauh berbeda, yaitu kesepakatan antara keduanya mengenai koalisi besar namun JK juga tidak memberi kepastian mengenai posisi capres-cawapres. Pernyataan Wiranto mengenai koalisi besar diletakkan setelah pernyataan JK.

- Penutup: Kendati belum ada bahasan mengenai siapa cawapres yang pas pada paragraph sebelumnya, dibagian akhir berita, menyinggung soal keberadaan Prabowo yang akan menjadi rebutan sebagai cawapres siapapun. Teks berita kemudian ditutup dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pertarungan akan menjadi menarik karena kekuatan dalam pertarungan pilpres bisa berimbang.

Dalam teks ini wartawan ingin menyampaikan manuver Golkar, PDIP dan Hanura dalam melakukan komunikasi politik. Untuk lead digambarkan bahwa JK dengan cepat (pasca berpisah dengan Demokrat) bertemu dengan Ketua Umum Hanura dan hari berikutnya langsung bertemu dengan Megawati. Bagian body berisi pernyataan Megawati yang membenarkan bahwa diantara keduanya sedang dalam proses mermbentuk koalisi namun ada kendala karena posisi intrinsik yang berbeda. Begitu juga dengan pernyataan JK yang

	<p>membahas kesepakatan antara Golkar dan PDIP. Lagi-lagi JK juga belum memastikan mengenai posisi capres-cawapres. Namun untuk JK-Wiranto, tidak dibahas mengenai bagaimana posisi capres-cawapres. Hanya membenarkan mengenai kesepakatan koalisi antar keduanya.</p> <p>Pada bagian akhir teks, justru wacana yang diangkat adalah mengenai Prabowo yang memiliki posisi yang kuat untuk menjadi cawapres, baik untuk Golkar maupun PDIP. Bagian ini sepiantas memberi kesan bahwa JK dan Mega yang sama-sama memiliki keinginan besar menjadi capres sehingga sosok Prabowo ditampilkan menjadi pihak yang dapat mengisi posisi cawapres.</p> <p>Berita ditutup dengan pernyataan bahwa pertarungan (pilpres) akan menjadi menarik karena kekuatan bisa berimbang melawan kubu SBY yang tidak memiliki cawapres yang kuat.</p>
4. Retoris	<p>Judul: JK-MEGA Belum Sepakat Soal Capres-Cawapres</p> <p>Keyword: <b>posisi intrinsik yang berbeda</b> (par.3). Menjelaskan mengapa diantara Mega dan JK belum juga sepakat mengenai capres-cawapres padahal telah sepakat membentuk koalisi.</p>

	<p>Elemen catchphrases dalam teks:</p> <p>‘Calon presiden dari Partai Golkar Jusuf Kalla <b>terus bergerak lebih cepat lebih baik.</b>’ (par.1 kalimat1) ‘Lebih cepat lebih baik’ adalah slogan dari JK. Kalimat ini menunjukkan bahwa JK memang bergerak dengan lebih cepat dan lebih baik sesuai dengan slogannya dalam melakukan komunikasi politik pasca berpisah dengan Demokrat. Dan secara tidak langsung membandingkan dengan pola pergerakan SBY (Demokrat) yang lambat dalam proses koalisi.</p> <p>Elemen depiction dalam teks:</p> <p>‘<b>sepakat</b>’. Kata ini banyak digunakan dalam teks. Megawati, JK dan Wiranto menggunakan kata ‘sepakat’ untuk menegaskan adanya kesepakatan dalam membangun koalisi yang terjalin diantara mereka.</p> <p>‘<b>kendala</b>’ (par.3) Kata ‘<b>kendala</b>’ dapat berarti hambatan atau rintangan. Kata ini diucapkan oleh Mega, mengacu pada kondisi intrinsik yang berbeda antara Golkar dan PDIP yang menghambat keduanya mengambil suatu keputusan posisi capres-cawapres.</p> <p>‘<b>pada waktunya...</b>’(par.9) Frase ‘pada waktunya’ yang diungkapkan JK menunjuk pada suatu waktu nanti, merujuk juga pada pengertian bahwa saat ini memang belum</p>
--	---

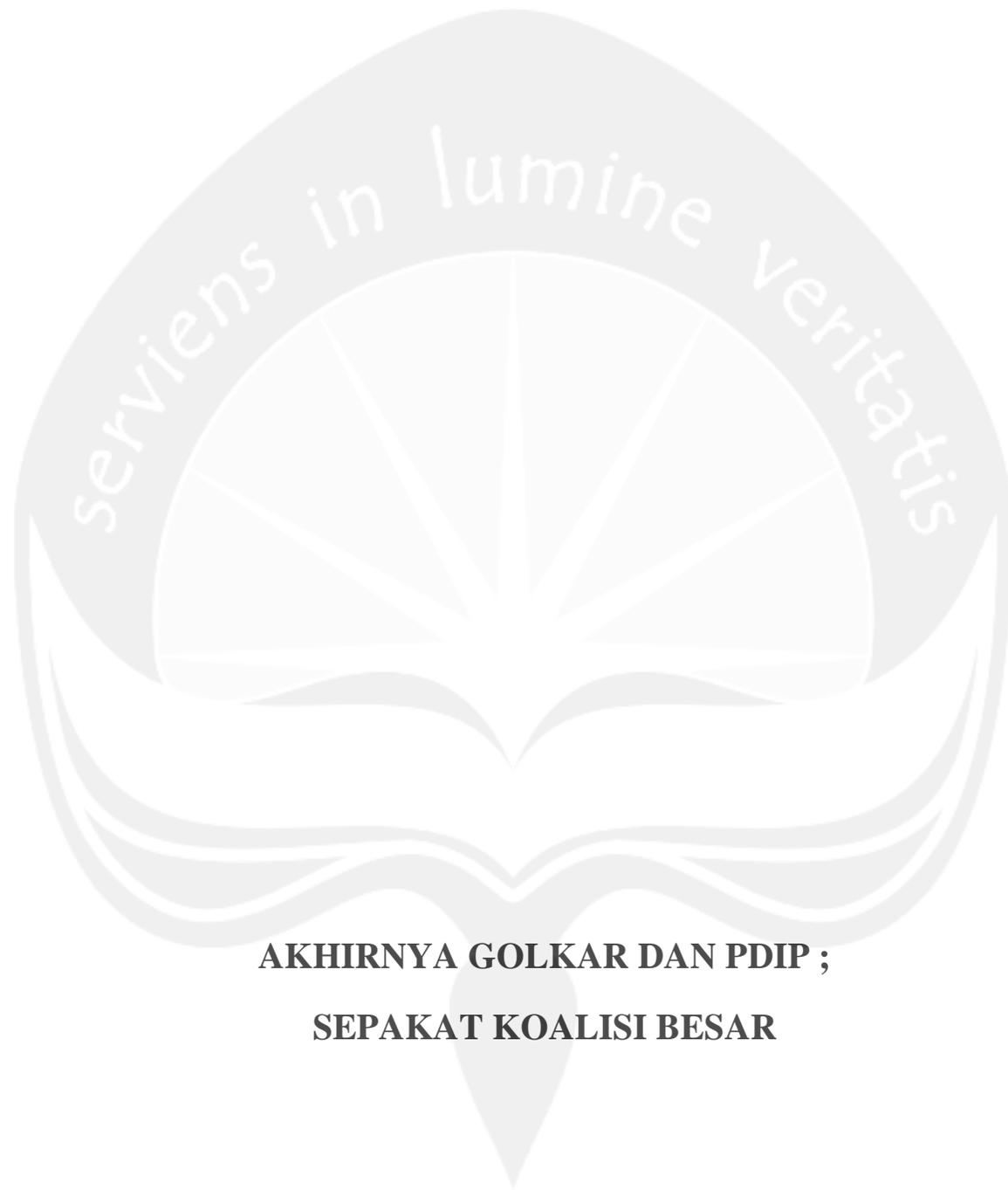
	<p>menemukan suatu kesepakatan antara Mega dan Kalla mengenai posisi capres-cawapres.</p> <p>‘...<i>kesimpulan</i>’ (par.9) merujuk pada suatu keputusan final mengenai posisi capres-cawapres.</p> <p>‘...figur cawapres <b>yang paling kuat</b> adalah Prabowo Subianto’.(par14)</p> <p>Frase ‘yang paling kuat’ dalam kalimat diatas memiliki arti kuat secara perolehan suara dan kuat kemungkinan untuk dipilih menjadi cawapres baik oleh JK atau Mega.</p> <p>Elemen metaphor dalam teks:</p> <p>‘..<b>dimotori</b>..’ (par.16, kalimat1). ‘motor’ artinya mesin penggerak sesuatu yang besar. ‘dimotori’ dalam hal ini memiliki arti koalisi besar yang baru ini digerakkan oleh Golkar dan PDIP partai yang dianggap besar dalam hal jumlah pengikut. Dalam konteks ini, Golkar dan PDIP seolah-olah dianggap menjadi penggerak koalisi Blok Kebangsaan padahal keputusan final diantara keduanya belum dipastikan.</p>
--	--

Frame seleksi: Realitas yang ingin diangkat yaitu mengenai kesepakatan koalisi antara Golkar dan PDIP walaupun belum menemui kesepakatan untuk posisi capres-cawapres. Pernyataan dari Megawati dan JK, kedua-duanya ditampilkan padahal inti dari pernyataan mereka tidak jauh berbeda, yaitu sepakat membangun pemerintahan yang kuat (koalisi) tetapi belum sepakat mengenai posisi capres-cawapres. Pernyataan ini memenuhi bagian awal hingga body berita. Kemudian munculnya

pilihan Prabowo sebagai figur cawapres yang pas untuk Blok Kebangsaan pada bagian akhir seperti menguatkan bahwa antara JK dan Mega memang belum ada yang mengalah mengisi posisi cawapres. Paragraph akhir ditampilkan pernyataan pertarungan akan berimbang antara SBY dengan koalisi yang dimotori Golkar dan PDIP. Ini untuk menggambarkan bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai besar yang jika bersatu akan cukup kuat melawan SBY. Media Indonesia juga memilih narasumber di luar parpol, yang sikapnya pro terhadap koalisi Golkar-PDIP.

Frame saliansi: koalisi antara Golkar, PDIP dan Hanura ditampilkan seolah-olah akan benar terbentuk dengan adanya beberapa kata sepakat yang dipakai beberapa kali serta pemakaian kata 'dimotori' yang seakan-akan yakin bahwa Golkar dan PDIP bergabung dalam satu koalisi besar. Padahal kesepakatan mengenai posisi capres dan cawapres antara Golkar dan Mega belum juga diputuskan karena posisi intrinsik Golkar dan PDIP yang berbeda. Munculnya Prabowo sebagai figure cawapres yang kuat untuk keduanya membuat ketidakpastian antara Golkar dan Mega semakin terlihat karena semakin membuktikan tidak ada dari mereka yang mengalah mengambil posisi menjadi cawapres. Walaupun begitu, koalisi Golkar dan PDIP digambarkan mampu mengalahkan blok SBY pada pilpres mendatang.

Frame Media : Media Indonesia ingin menonjolkan bagaimana pergerakan Golkar pasca berpisah dengan Demokrat dengan menggambarkan kesepakatan koalisi besar antara Golkar, PDIP dan Hanura. Walaupun keduanya (JK-Mega) belum menemui kesepakatan mengenai posisi capres-cawapres karena sama-sama ingin menduduki posisi capres. Koalisi Blok Kebangsaan ini disebutkan mampu menyaingi kubu SBY.



**AKHIRNYA GOLKAR DAN PDIP ;  
SEPAKAT KOALISI BESAR**

29 April 2009

	UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
<b>SELEKSI</b>	1. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah Media Indonesia menampilkan realitas mengenai Golkar dan PDIP yang akhirnya menyepakati rencana pembentukan koalisi besar yang bertujuan membangun pemerintahan yang kuat dan stabil dengan melibatkan Hanura, Gerindra, PAN, dan PPP walaupun belum sampai tahap memutuskan capres-cawapres.</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hanura, dimunculkan karena menjadi salah satu partai anggota koalisi besar yang sedang dibentuk.</li><li>2. Gerindra, dimunculkan karena juga salah satu partai yang menjadi anggota koalisi besar.</li><li>3. PAN dimunculkan karena masih belum ada kepastian dari para elite-elite di dalamnya apakah PAN akan bergabung dalam koalisi besar.</li><li>4. PPP dimunculkan juga karena belum ada kepastian apakah ikut dalam koalisi besar.</li></ol> <p>Pelantun wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pramono Anung, anggota tim enam PDIP. Pramono menyatakan hasil pertemuan antara Golkar dan PDIP baru sebatas menyamakan persepsi koalisi yang akan</li></ol>

	<p>dibangun. Soal siapa yang akan menjadi nomor satu atau dua belum diputuskan. Beliau juga menambahkan butuh kebesaran hati untuk duduk bersama dan menyatukan visi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jusuf Kalla, mengatakan saat ini Golkar sedang dalam proses menuju koalisi dengan parpol lain. Walaupun belum ada keputusan pasti mengenai capres dan cawapres.</li> <li>3. Taufiq Kiemas, menyatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah terbentuknya koalisi PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura dan PPP. Penentuan capres akan dibahas bertiga antara Megawati, JK dan Prabowo</li> <li>4. Amien Rais, Ketua Majelis Pertimbangan PAN menyatakan imbauan agar PAN berkoalisi dengan partai pemenang pemilu legislative. Karena berkoalisi dengan pihak yang kalah adalah kemubaziran.</li> <li>5. Bachtiar Chamsyah, Ketua Majelis Pertimbangan PPP menilai PPP tidak akan mendukung Prabowo sebagai capres karena menurutnya suara Gerindra yang mengusung Prabowo lebih sedikit daripada PPP dalam legislative.</li> </ol>
6. Tematis	Wacana: Menurut Taufik Kiemas, penentuan capres-cawapres sebaiknya dibahas setelah koalisi lima partai benar-benar terbentuk.(par.9)

	<p>Wacana: PAN dan PPP belum kompak dalam menentukan arah koalisi partainya masing-masing.(par10-13).</p>
<p>7. Sintaksis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lead: Partai Golkar dan PDIP akhirnya menyepakati rencana pembentukan koalisi besar dengan melibatkan Hanura, Gerindra, PAN dan PPP. Koalisi itu bertujuan membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.</li> <li>• Body: dalam 5 paragraf awal diisi dengan pernyataan Pramono Anung yang membenarkan adanya koalisi besar walaupun belum menghasilkan keputusan yang mengikat. Golkar dan PDIP pun juga disebutkan telah bertemu sebelum dan sesudah pemilu legislatif dan keduanya sepakat membangun pemerintahan yang kuat. Karena itulah para ketua umum yang akan berkoalisi direncanakan untuk bertemu. Pramono juga menyatakan tetap optimis bahwa pertemuan para ketua umum tersebut akan berhasil menyepakati satu nama yang akan dijagokan sebagai capres. Jusuf Kalla dalam 2 paragraf selanjutnya membenarkan pertemuan intens dengan PDIP yang membahas soal koalisi dan menurut JK negosiasi masih dalam tahap tawar-menawar mengenai posisi capres cawapres.</li> <li>• Penutup: Dalam 4 paragraf akhir menampilkan mengenai PAN dan PPP yang belum menetapkan arah koalisi yang jelas karena masih ada perpecahan suara</li> </ul>

<p><b>SALIANSI</b></p>		<p>dalam tubuh partai masing-masing.</p> <p>Pada bagian lead secara umum ditampilkan beberapa partai politik yang telah menyepakati rencana koalisi. Kemudian sebanyak 5 paragraf menyampaikan pernyataan dari Pramono yang dalam hal ini menjadi wakil dari PDIP saat pertemuan tim enam partai Golkar dan PDIP. JK hanya diberi porsi 2 paragraf kemudian lanjut pernyataan Taufik kiemas yang juga wakil PDIP menanggapi rencana koalisi besar. Sampai pada bagian body berita, semua mengarah kepada sikap atau ungkapan setuju atas terjalannya koalisi besar dan untuk keputusan caprs-cawapres masih dalam tahap pembahasan. Bagian akhir baru menjelaskan keadaan PAN dan PPP yang ternyata sebenarnya belum sepakat untuk menentukan arah koalisi.</p>
	<p>8. Retoris</p>	<p>Judul: Akhirnya Golkar dan PDIP ; sepakat koalisi besar</p> <p>Pemilihan judul menggambarkan harapan Media Indonesia akan terwujudnya koalisi besar.</p> <p>Keyword: ada satu frase yang disebutkan secara berulang dalam teks ini yaitu <b>'koalisi besar'</b>. Koalisi besar yang dimaksud disini adalah koalisi antara Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PAN, dan PPP. Dan kesepakatan bergabungnya partai-partai dalam koalisi besar</p>

inilah yang menjadi topik besar dalam teks ini. Walaupun PPP dan PAN belum memastikan arah koalisinya.

Elemen catchphrases dalam teks:

**“Salah satu pihak harus mengalah. Tidak mungkin dua-duanya menjadi capres”.**

(par.3 kalimat 5) Kalimat ini menarik tanpa menyebut nama pun (hanya menyebut ‘salah satu’, ‘dua-duanya’) pikiran kita langsung mengarah ke nama Megawati dan Jusuf Kalla.

**“Nama akan muncul dalam satu hingga dua hari,”** (par.3) kalimat ini menggambarkan rasa optimis Pramono akan koalisi besar yang sedang dibangun.

**‘Bagi Amien, berkoalisi dengan pihak yang kalah merupakan kemubaziran’** (par.11 kalimat 2) Kalimat ini sangat jelas mengarah pada keinginan Amien untuk bergerak membentuk koalisi dengan pihak yang menang pada pileg yaitu Demokrat. Dalam arti lain Amien menganggap koalisi dengan pihak yang kalah adalah sia-sia karena tidak akan menghasilkan apa-apa alias kekalahan dan itu berarti PAN tidak akan mendapat jatah dalam kabinet.

Elemen depiction dalam teks:

**‘ ...belum menghasilkan keputusan yang mengikat’** (par.3 kalimat 1) Frase ‘keputusan yang mengikat’ dalam kalimat diatas berarti belum ada keputusan pasti atau perjanjian

hitam diatas putih yang mengikat antar partai-partai dalam koalisi besar.

‘...para **pucuk pimpinan partai...**’ (par.5 kalimat 1). Frase ini mengarah pada pimpinan partai tertinggi atau dalam kalimat ini mengarah kepada Megawati dan Jusuf Kalla yang masih belum mengalah dalam memutuskan posisi capres.

‘...dalam negosiasi selalu ada **tawar-menawar**’(par.8 kalimat 3). Kata ‘tawar-menawar disini maksudnya adalah saling meminta, mengurangi atau dalam hal ini berarti pihak JK dan Megawati masih berunding mengenai posisi capres dan cawapres. Frase ini semakin menguatkan fakta JK-Mega yang sama-sama bersikeras menjadi capres.

Elemen metaphor dalam teks:

‘**pintu ke arah koalisi tetap terbuka lebar**’ (par.3 kalimat 3). Maksudnya adalah kemungkinan untuk berkoalisi masih sangat besar dan masih ada kesempatan walaupun keputusan untuk capres-cawapres belum menemui titik temu.

‘...koalisi besar itu membutuhkan **kebesaran hati** dari para pucuk pimpinan partai untuk **duduk bersama** dan menyatukan visi’ (par.5 kalimat 1). Frase ‘kebesaran hati’ dalam kalimat ini berarti keikhlasan, mengalah ada unsur kerelaan. JK dan Megawati diharapkan mampu berbesar hati untuk memilih siapa capres dan cawapres dan tidak saling bersikukuh.

Dan frase ‘duduk bersama’ untuk menggantikan istilah negosiasi namun dalam artian

		yang lebih kekeluargaan, ada unsur ke-arifan di dalamnya bukan negosiasi dalam arti formal sebagaimana 2 pihak bernegosiasi untuk sebuah kepentingan pribadi.
--	--	---

Frame seleksi: kesepakatan koalisi besar yang terjadi antara Golkar, PDIP dengan melibatkan Hanura, PAN dan PPP baru sebatas kesepakatan ingin membangun pemerintahan yang kuat namun didalamnya belum ada keputusan mengikat satu sama lain. Koalisi ini juga ternyata belum diyakini sepenuhnya oleh masing-masing partai yang terlibat didalamnya seperti PAN dan PPP yang masih belum memutuskan kemana arah koalisi mereka. Permasalahan capres-cawapres masih menjadi ganjalan Golkar dan PDIP melanjutkan arah koalisi. Pemilihan realitas ini mungkin untuk menguatkan artikel sebelumnya dimana Golkar di sebutkan tengah gencar mengadakan komunikasi politik dengan PDIP.

Frame saliansi: PDIP memiliki keinginan yang besar atas terwujudnya koalisi besar ini. Koalisi besar akan benar-benar terwujud jika salah satu dari Mega dan JK mengalah mengenai posisi capres cawapres. Perpecahan dalam tubuh PAN dan PPP yang dimunculkan tidak lantas membuat rencana koalisi berubah.

Frame media: negosiasi yang baik antara Mega dan JK akan menjadi ujung tombak terwujudnya koalisi besar lima partai ini. Rupanya Media Indonesia sangat berharap kesepakatan koalisi ini akan terwujud, dengan digambarkan secara jelas dalam judul.



**KOMUNIKASI PDIP-DEMOKRAT**

## BERJALAN KIAN KENCANG

12 Mei 2009

	UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
<b>SELEKSI</b>	1. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah adanya perseteruan dalam tubuh PDIP, sejak PDIP dan Demokrat menjalin komunikasi politik dengan intensif..</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mega tidak memberi pernyataan apapun, dia hanya sebagai pihak dikunjungi dalam urusan komunikasi antara Demokrat dan PDIP dan dia juga dikatakan sebagai pihak yang mengutus Puan Maharani untuk membalas kunjungan dari pihak Demokrat.</li><li>2. Puan Maharani selaku pihak yang diutus oleh Megawati untuk mengunjungi Demokrat.</li><li>3. Tjahjo Kumolo, juga pihak yang diutus mengunjungi pihak Demokrat.</li><li>4. Boediono, disebut-sebut sebagai calon wapres alternattif SBY</li><li>5. Prabowo, salah satu cawapres yang mendapat dukungan dari faksi pendukung Megawati.</li><li>6. Gerakan Penyelamat Indonesia (GPI), dimunculkan karena organisasi ini</li></ol>

berunjuk rasa sehubungan rencana koalisi PDIP dan Demokrat.

Pelantun wacana:

1. Hatta Rajasa (selaku utusan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) mengatakan bahwa kunjungannya ke kediaman Megawati untuk melakukan komunikasi melanjutkan apa yang selama ini sudah terjalin, suatu komunikasi yang sangat baik antara dirinya selaku utusan SBY.
2. Ketua Dewan Pembina Demokrat, SBY. Beliau membenarkan adanya komunikasi antara PDIP dan Demokrat. Menurut SBY ada jalan yang cukup terbuka antara PDIP dan Demokrat serta kemungkinan untuk bisa bersama melanjutkan pembangunan bangsa.
3. Pramono (selaku pihak PDIP), yang mengakui adanya komunikasi yang berjalan kencang antara Demokrat dan PDIP namun PDIP sama sekali belum tertarik dengan pembicaraan yang terkait dengan urusan bagi-bagi kursi menteri. Pramono juga memberikan pernyataan terkait Prabowo bagi PDIP, menurutnya politik itu sangat fleksibel.
4. Taufiq Kiemas yang menyampaikan pada public bahwa Demokrat akan menyerahkan kepada PDIP untuk memilih posisi dalam cabinet
5. Pengamat Politik, J Kristiadi. Menurut Kristiadi sikap PDIP dinilai didominasi

**SALIANSI**

	<p>oleh kepentingan pragmatis dan dapat melunturkan budaya oposisi di parlemen.</p>
2. Tematis	<p>Wacana: perseteruan di tubuh PDIP meruncing. Selain menjalin komunikasi politik yang berjalan kencang dengan Demokrat, PDIP juga tetap merangkul Gerindra.</p> <p><b>...selain menjalin komunikasi dengan Demokrat, pada saat bersamaan PDIP kembali menjalin komunikasi dengan Gerindra...(par.10)</b></p> <p>Wacana: ada jalan yang cukup terbuka antara PDIP dan Demokrat untuk kemungkinan bisa bersama dalam upaya lanjutkan pembangunan bangsa.(par.5)</p> <p>Wacana: sikap PDIP yang didominasi kepentingan pragmatis akan melunturkan budaya oposisi di parlemen.(par.13)</p>
6. Sintaksis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lead: Perseteruan antarfaksi dalam tubuh PDIP kian meruncing. Karena itu selain menjalin komunikasi politik yang berjalan kencang dengan partai Demokrat, PDIP juga tetap merangkul Gerindra.</li><li>• Body: berisi mengenai komunikasi antara PDIP dengan Demokrat yang berjalan intens dengan disertai pernyataan dari SBY, Pramono dan Taufiq Kiemas menanggapi komunikasi (Demokrat-PDIP) yang sedang dijalin. Selain</li></ul>

	<p>itu juga berisi tentang keadaan PDIP yang terpecah menjadi 3 faksi karena masing-masing memiliki pilihan koalisi sendiri-sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penutup: 2 paragraf akhir yang menampilkan unjuk rasa sebuah organisasi mengenai koalisi PDIP-Demokrat lalu paragraf terakhir yang memuat mengenai pendapat pengamat politik yang menilai sikap PDIP yang didominasi kepentingan pragmatis akan melunturkan budaya oposisi di parlemen. Kedua paragraf ini intinya menyatakan ketidaksetujuan atas koalisi Demokrat-PDIP.</li></ul> <p>Judul teks ini adalah 'komunikasi PDIP-Demokrat berjalan kian kencang. Namun menarik saat wacana yang ditampilkan dalam lead adalah mengenai persetujuan yang meruncing ditubuh PDIP akibat komunikasi PDIP dan Demokrat namun dilain pihak PDIP juga masih tetap menjalin hubungan dengan Gerindra. Realitas mengenai terjalannya hubungan antara PDIP-Demokrat baru dijelaskan pada paragraf 2-6. Pada paragraf 6 ada dua pernyataan yang bertolakbelakang saat Pramono menyatakan PDIP sama sekali belum tertarik dengan pembicaraan terkait kursi menteri, sedang kalimat selanjutnya disampaikan bahwa Taufik Kiemas sudah membocorkan bahwa Demokrat menyerahkan kepada PDIP untuk memilih posisi dalam kabinet. Namun pada paragraf 8, 9, 10 ditampilkan kembali keadaan internal PDIP</p>
--	---

	<p>yang terpecah menjadi beberapa faksi terkait arah koalisi.</p> <p>Pada paragraph 10 ditekankan kembali keadaan yang terpecah antara menjalin komunikasi dengan Demokrat dan tetap menjaga hubungan dengan Gerindra sekalipun Prabowo disebut oleh Taufik Kiemas sebagai masa lalu padahal hal itu sudah disampaikan dalam lead. Pada paragraf 11 ditampilkan pernyataan dari Pramono mengenai kejelasan hubungan PDIP dengan Prabowo. Hal ini seakan menjadi dua hal yang bertolak belakang saat ditampilkan pernyataan Taufik Kiemas bahwa Prabowo adalah masa lalu dengan pernyataan Pramono yang belum dapat memberi kepastian bagaimana hubungan PDIP dengan Prabowo.</p> <p>Dalam paragraf ditampilkan mengenai sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Indonesia yang berunjuk rasa menolak koalisi PDIP-Demokrat. Dan wacana ini seakan dikuatkan dengan pernyataan dari pengamat politik J.Kristiadi pada paragraph penutup yang menilai sikap PDIP didominasi kepentingan pragmatis yang akan melunturkan budaya oposisi.</p>
7. Retoris	<p>Judul: Komunikasi PDIP-Demokrat berjalan kian kencang</p> <p>Keyword:</p> <p><b>‘komunikasi berjalan kencang’</b></p> <p>Kata ‘komunikasi berjalan kencang’ dipakai sebanyak tiga kali dalam teks dan</p>

diletakkan di judul, lead dan dan body berita. Komunikasi kencang disini berarti adanya hubungan antara dua pihak atau komunikasi politik yang dilakukan dengan intens oleh PDIP dan Demokrat.

Elemen catchphrases dalam teks:

**'Koalisi pragmatis melunturkan budaya oposisi di parlemen'** (sub judul dalam teks dan ditampilkan lagi dalam paragraf akhir). Kalimat ini dilontarkan oleh seorang pengamat politik yang menilai sikap PDIP. Koalisi pragmatis disini adalah koalisi yang sepertinya akan terjalin antara PDIP dan Demokrat yang dianggap akan melunturkan budaya oposisi karena jika berkoalisi dengan partai pemerintah maka PDIP otomatis tidak lagi berada dalam posisi oposisi.

**'perseteruan antarfaksi dalam tubuh PDIP kian meruncing'** (par.1 kalimat1) dengan **'tarik-menarik kepentingan antarfaksi makin kencang'** (par.10 kalimat1) kedua kalimat ini sama-sama menggambarkan bagaimana keadaan internal PDIP yang sedang tidak utuh karena perbedaan kepentingan terkait arah koalisi

**'Dalam satu minggu terakhir, sudah dua kali Hatta Rajasa selaku utusan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal, komunikasi diantara dua tokoh itu putus sejak 2004.'**(par.2) Kalimat ini menarik karena menunjukkan ada dua hal

yang bertentangan yaitu saat terjadi komunikasi intens dalam 1 minggu antara SBY-Mega padahal keduanya sudah tidak lagi melakukan komunikasi sejak 2004. Seakan memperlihatkan bahwa hubungan Demokrat-PDIP yang sedang berlangsung saat ini adalah suatu keanehan atau kemustahilan.

**‘..melanjutkan apa yang selama ini sudah terjalin...’** (par.4 kalimat 1) kalimat ini juga terasa aneh mengingat hubungan keduanya yang sudah lama tidak terjalin.

**‘...Taufik Kiemas sudah membocorkan kepada publik bahwa Demokrat menyerahkan pada PDIP untuk memilih posisi di kabinet’** (par.6 kalimat 2). Frase ini dapat diartikan sebagai posisi menteri dalam susunan kabinet mendatang. Itu menunjukkan tingkat kedekatan atau keseriusan komunikasi yang dijalin antara Demokrat dan PDIP karena ternyata sudah mencapai tahap membahas posisi dalam kabinet

Elemen depiction dalam teks:

**‘perseteruan** antarfaksi dalam tubuh PDIP...’(par.1 kalimat1). Kata ‘perseteruan’ menggambarkan keadaan yang tidak harmonis, ada perpecahan. Jadi PDIP digambarkan sedang dalam keadaan tidak harmonis.

**‘...komunikasi di antara dua tokoh itu putus** sejak 2004’ (par.2 kalimat 2). Kata

'putus' untuk menjelaskan bahwa sudah sekian tahun tidak terjalin lagi komunikasi antara SBY dan Megawati.

'apakah Prabowo bagi PDIP **masa lalu**...'(par.11 kalimat1). Frase 'masa lalu' ini untuk menggambarkan hubungan Prabowo dengan PDIP yang pernah terjalin sebelum adanya komunikasi antara PDIP-Demokrat.

'**di-update**'(par.11 kalimat 2). Kata 'update' dalam bahasa Indonesia artinya memperbaharui. Dalam hal ini 'update' untuk menjelaskan bahwa hubungan yang pernah terjalin antara satu partai dengan partai lain akan tetap terjalin asalkan diperbaharui lagi.kata ini menunjukkan bahwa PDIP dan Prabowo masih menjalin hubungan.

'**last minutes yang menentukan**' (par.11 kalimat 3). Frase ini untuk menjelaskan keadaan beberapa hari sebelum pendeklarasian capres-cawapres.

Elemen metaphor dalam teks:

'...**melunturkan**..'(sub judul). Istilah 'melunturkan' untuk mengganti kata 'menghilangkan'. Melunturkan disini menggambarkan keadaan menghilangkan sesuatu yang menyebabkan tidak indah, terlihat aneh, tidak wajar. Jadi koalisi pragmatis antara Demokrat dan PDIP dianggap menghilangkan suatu budaya oposisi dan itu tidak wajar.

	<p>‘...<b>meruncing</b>’ (par1 kalimat 1). Kata ‘meruncing’ dalam konteks ini menjelaskan situasi internal PDIP yang terganggu dan semakin genting karena beberapa faksi yang terpecah terkait arah koalisi.</p> <p>‘...<b>komunikasi yang berjalan kencang</b>...’(par.1 kalimat 2) Frase ini untuk menjelaskan intensnya komunikasi yang dilakukan oleh PDIP dan Demokrat.</p> <p>‘...PDIP juga tetap <b>merangkul</b> Gerindra’ (par.1 kalimat 2). Kata ‘merangkul’ dalam hal ini berarti PDIP tetap mendekati, melakukan komunikasi yang baik untuk berkoalisi dengan Gerindra.</p> <p>‘<b>membocorkan</b>’ (par.6 kalimat 3). Kata ‘bocor’ dalam konteks ini artinya adalah tersiar keluar atau ke pihak lain. Biasanya mengenai sesuatu hal yang bersifat rahasia. Jadi kata ‘membocorkan’ dapat diartikan sebagai menyiarkan atau memberitahu secara sengaja hal yang sebenarnya rahasia ke pihak lain. Dalam hal ini, perihal bahwa Demokrat menyerahkan kepada PDIP mengenai posisi dalam kabinet harusnya masih rahasia namun Taufik Kiemas telah memberitahukan secara terang-terangan kepada publik.</p>
--	--

Frame seleksi: Hatta Rajasa dan SBY ditampilkan sebagai narasumber Demokrat kemudian Pramono Anung dan Taufik Kiemas yang dipilih sebagai pihak dari PDIP. Pemilihan narasumber dari PDIP menarik, karena dilihat dari pernyataan keduanya yang selalu bersebrangan. Menjadi suatu penguatan atas wacana yang ditampilkan dalam lead berita. Kemudian

pemilihan pihak dari GPI menunjukkan penolakan terhadap koalisi PDIP Demokrat. Pengamat politik dimunculkan untuk menguatkan sikap sebagian orang yang tidak menyetujui koalisi PDIP-Demokrat.

Frame saliansi : Penekanan dan pemilihan kata dan kalimat dalam berita terlihat bahwa wartawan lebih menonjolkan adanya perseteruan dalam tubuh PDIP akibat menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan Demokrat. Reaksi negative juga keluar dari pihak diluar parpol menilai koalisi dua partai ini.

Media Frame: Media Indonesia ingin menyampaikan bahwa komunikasi yang berjalan kencang dan hubungan yang cukup dekat antara PDIP-Demokrat adalah sesuatu hal yang aneh mengingat posisi PDIP sebagai oposisi dalam parlemen ditambah lagi hubungan SBY-Megawati yang putus sejak tahun 2004. Kedekatan yang mengarah ke arah koalisi ini menimbulkan masalah dalam tubuh PDIP sendiri. Koalisi ini juga dianggap hanya akan memberi efek buruk dalam parlemen.

*serviens in lumine veritatis*

**PARTAI PENDUKUNG SBY**  
**SIAPKAN POROS BARU**

13 Mei 2009

	UNSUR FRAMING	YANG DIAMATI
<b>SELEKSI</b>	2. Skrip	<p>Realitas yang diangkat adalah reaksi empat partai pendukung SBY terkait informasi bahwa SBY memilih Boediono sebagai cawapresnya</p> <p>Pelibat wacana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. M Najib, DPP PAN. Dalam hal ini beliau tidak memberikan pernyataan beliau hanya sebagai salah satu pihak yang ikut dalam rapat yang menggagas pembentukan poros baru.</li><li>2. Abu Bakar Al Habsyi, Sekretaris F-PKS DPR. Beliau disini juga tidak</li></ol>

mengeluarkan pernyataan tetapi hanya salah satu pihak yang ikut dalam pertemuan para partai pendukung koalisi SBY.

3. Roma Hurmuzy, Wakil Sekjen PPP. Sama halnya dengan Abu Bakar, Roma Hurmuzy pun tidak memberi pernyataan.

Pelantun wacana:

1. Mahfudz Siddiq, Ketua fraksi PAN. Mahfudz memberi pernyataan mengenai keterkejutan para partai pendukung SBY mengenai informasi SBY memilih Boediono sebagai Boediono. **“Kami terkejut dengan informasi itu karena tidak ada pembahasan sebelumnya”**. Mahfudz juga menyatakan akan mempertimbangkan alternatif koalisi yang lain bila SBY tidak merivisi cawapresnya.
2. Annis Matta, Sekjen PKS. Annis menjadi narasumber yang paling banyak diberi porsi untuk setiap pernyataan-pernyataannya. Pernyataannya tersebar dari paragraph 4, 7, 15, 17. Annis menjadi pihak yang banyak memberikan pernyataan mewakili PKS salah satu partai peserta koalisi. Dan dalam setiap pernyataannya mengarah pada keinginan untuk ‘membentuk satu sikap bersama’.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Imam Nachrowi, Wakil Sekjen PKB. Pernyataannya mengingatkan agar partai-partai koalisi diajak berbicara dulu sebelum keputusan diambil.”Sebelum pilpres saja sudah seperti itu, apalagi nanti. Karena itu kami inginkan adanya komunikasi sebelum deklarasi.</li> <li>4. Lukman Hakim Saefuddin, Ketua fraksi PPP. Lukman Hakim berpendapat bahwa masalah cawapres mamng kewenangan capres tetapi sebaiknya tetap berasal dari kalangan parpol dan yang memiliki akses yang baik ke parpol.</li> <li>5. Zulkifli Hasan, Ketua fraksi PAN dan Sekjen PAN. Zulkifli juga berpendapat bahwa cawapres dari nonparpol menurunkan militansi parpol-parpol yang saat ini tergabung dalam koalisi.</li> <li>6. Hatta Rajasa, Mensesneg. Pernyataan Hatta diletakkan pada paragraf 18-22 atau dibagian akhir teks. Beliau seperti memberi klarifikasi bahwa pemilihan Boediono sebagai cawapres sudah melauai proses dan sebelumnya juga sudah dibicarakan dengan beberapa kawan-kawan koalisi lain. Hatta juga menjelaskan bahwa PKS juga diundang namun tidak hadir di malam saat penentuan Boediono sebagai cawapres. Hatta menyampaikan bahwa SBY tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena sibuk dan hanya menunggu di Istana Negara.</li> </ol>
7. Tematis	Wacana: pemberitahuan dari utusan SBY soal pilihannya kepada Boediono sebagai

	<p>cawapres belum ada dibahas sebelumnya dengan anggota koalisi lainnya.</p> <p><b>“Kami terkejut dengan informasi itu kaarena tidak ada pembahasan sebelumnya”</b> (par.3)</p> <p><b>‘...apabila putusan soal cawapres itu terus dipaksakan tanpa berbicara dengan anggota koalisi lainnya’</b> (par.5)</p> <p>Wacana: Sikap Demokrat dinilai tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik.</p> <p><b>‘Sikap Partai Demokrat dan capres Susilo Bambang Yudhoyono yang secara serta-merta memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi SBY, dinilai tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik’</b> (par.13)</p> <p>Wacana: SBY tetap memilih Boediono.</p> <p><b>Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan SBY tidak akan menarik keputusannya berdampingan dengan Boediono.</b>(par.18)</p> <p><b>Pemilihan Boediono, kata Hatta sudah memlalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang.</b>(par.20)</p>
--	--

**SALIANSI**

<p>8. Sintaksis</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lead: Informasi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih Boediono sebagai cawapresnya berembus kencang, kemarin. Empat partai pendukung SBY pun langsung menggelar rapat dan menggagas pembentukan poros alternatif.</li><li>• Body: berisi tentang pernyataan-pernyataan sikap dari para anggota koalisi Demokrat yang menanggapi kabar mengenai Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih Boediono sebagai cawapresnya.</li><li>• Penutup: berisi tentang pernyataan-pernyataan Hatta selaku utusan SBY mengenai pencalonan Boediono sebagai capres adalah benar adanya. Kemudian pada paragraf terakhir menampilkan pernyataan Hatta yang menegaskan SBY tidak hadir dalam pertemuan karena kesibukan sebagai Presiden dan hanya menunggu di Istana Negara.</li></ul> <p>Seruan penolakan dan protes dari sejumlah partai pendukung SBY menyusul adanya informasi bahwa SBY memilih Boediono sebagai cawapres, ditampilkan di sebagian besar teks. Dari jumlah total 22 paragraf, ada 14 paragraf yang intinya tidak setuju dan protes menyikapi informasi tersebut. Dan itu tersebar mulai dari lead hingga body berita. Di pihak lain, pada bagian akhir teks, ditampilkan pernyataan dari pihak SBY dalam hal ini Hatta Rajasa yang</p>
---------------------	--

	<p>menganggap pencalonan Boediono sudah melalui proses yang cukup panjang dan sudah dipertimbangkan. Sehingga SBY tidak akan menarik keputusannya. Dan bagian ini hanya diberi porsi dalam teks sebanyak 5 paragraf.</p>
<p>9. Retoris</p>	<p>Judul: Partai pendukung SBY siapkan poros baru.</p> <p>Keyword:</p> <p><b>‘poros baru’, ‘poros alternatif’, ‘alternative koalisi’.</b> Frase-frase ini mengacu pada satu pengertian yaitu sebuah koalisi baru diluar koalisi SBY karena kekecewaan para partai pendukung SBY atas keputusan memilih Boediono.</p> <p><b>‘mengusung satu sikap’, ‘menyusun sikap bersama’.</b> Sikap yang dimaksud disini adalah adanya sikap yang mengarah pada sebuah bentuk koalisi yang baru diluar koalisi SBY.</p> <p>Elemen catchphrases dalam teks:</p> <p><b>‘...Boediono yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia’.</b>(par.3 kalimat1) Kalimat ini menarik karena penjelasan mengenai jabatan Boediono sebagai Gubernur Bank BI seakan menampilkan fakta bahwa Boediono memang bukan dari kalangan partai politik seperti yang dipermasalahkan para partai pendukung SBY.</p>

**‘PKS bersama partai-partai pendukung SBY lainnya merasa perlu mengusung satu sikap...’** (par.4 kalimat 1). Kalimat ini menarik karena PKS ditempatkan seolah sebagai pihak diluar partai pendukung SBY atau mungkin PKS dianggap sebagai partai yang ‘memimpin’ atau mengatur partai pendukung lainnya untuk menyikapi putusan SBY.

**‘Tokoh empat partai itu sepakat untuk mempertimbangkan alternative koalisi yang lain bila SBY tidak merevisi cawapresnya’.** (par.8 kalimat 1) Dari kalimat ini terlihat para tokoh partai pendukung sepertinya memberikan suatu ancaman bila SBY tidak segera memikirkan ulang keputusannya untuk memilih Boediono sebagai cawapres.

**‘Sebelumnya, Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan SBY tidak akan menarik keputusannya berdampingan dengan Boediono’** (par.18 kalimat 1). Dalam keadaan dan suasana panas, SBY tetap teguh pada keputusannya.

Elemen depiction dalam teks:

**‘...kami terkejut’** (par.3 kalimat 2). Kata ini untuk menggambarkan rasa kaget para partai pendukung SBY terkait informasi dipilihnya Boediono menjadi cawapres SBY.

**‘...terus dipaksakan tanpa berbicara...’** (par.5 kalimat 1) artinya jika keputusan SBY mengangkat Boediono tetap diteruskan dengan tidak ada pemberitahuan atau

	<p>diskusi terlebih dahulu dengan para anggota koalisi lain ditengah-tengah panasnya suasana para partai pendukung yang tidak setuju dengan keputusan tersebut.</p> <p><b>‘menurunkan militansi’</b> (par. 12 kalimat 1). Militansi jika diartikan adalah semacam perjuangan dan lebih menunjukkan suatu semangat, spirit juang. Menurunkan militansi berarti dapat menurunkan semangat para partai pendukung politik untuk berjuang demi mendukung SBY dalam pilpres.</p> <p><b>‘...dinilai tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik’</b>(par.13 kalimat 1) dalam arti dalam berpolitik tentunya ada sopan santun atau aturan yang tidak tertulis yang harusnya dipatuhi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini menyangkut keputusan yang diambil SBY yang tidak terlebih dahulu dirundingkan dengan peserta koalisi lainnya dan itu dianggap tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik.</p> <p>‘saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan...’ (par.18 kalimat 1) kalimat yang disampaikan ini ingin membantah tuduhan dari para partai pendukungnya bahwa belum ada pembicaraan sebelumnya mengenai putusan SBY.</p> <p><b>“Tidak ada titipan.”</b> (par.20) Pernyataan Mensesneg ini ingin menegaskan bahwa keputusan memilih Boediono menjadi cawapres adalah bukan karena permintaan dari salah satu pihak demi suatu kepentingan tertentu.</p>
--	--

	<p>Elemen metaphor dalam teks:</p> <p><b>'rontok'</b> (sub judul) secara harafiah kata ini berarti jatuh, gugur, lepas, terpisah. Dalam konteks ini berarti partai-partai peserta koalisi SBY terancam terpisah. Namun penggunaan kata ini seolah terasa melebih-lebihkan dengan efek yang negative.</p> <p><b>'berembus kencang'</b>(par1 kalimat 1) frase ini untuk menjelaskan bahwa informasi tersebut cepat beredar dari satu pihak ke pihak lain atau sedang banyak dibicarakan.</p> <p><b>'poros'</b> artinya sumbu, ujung puncak. 'poros' untuk menggambarkan posisi SBY (Demokrat) dalam koalisi ini menjadi sumbu tengah disisi lain para peserta koalisi ingin mencari alternative poros untuk koalisi.</p>
--	--

Frame seleksi: Ingin mengangkat realitas bahwa para partai politik pendukung koalisi SBY bereaksi atas pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY. Reaksi ini ditunjukkan wartawan dari pemilihan sebagian besar narasumber berasal dari wakil partai pendukung SBY dan memnuhi sebagian besar porsi berita dengan satu sikap yaitu penolakan dan ungkapan tidak setuju atas keputusan SBY. Dilain sisi, wartawan tetap menampilkan Hatta Rajasa dari Demokrat, dengan porsi yang kecil, namun justru terlihat seperti menguatkan apa yang menjadi alasan para partai pendukung SBY bereaksi.

Frame saliansi: wartawan ingin menonjolkan bahwa putusan SBY mengangkat Boediono yang notabene orang nonpartai sebagai cawapresnya adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi tata krama berpolitik sehingga menyebabkan para parpol pendukungnya mengambil suatu sikap menggagas poros alternative selain SBY (Demokrat). Di sisi lain, memperlihatkan bahwa SBY tidak terlalu peduli dan ambil pusing atas ancaman mitra koalisinya karena merasa memiliki

kewenangan penuh memilih cawapresnya sendiri dan proses yang dilewati untuk itu dirasa cukup karena sebelumnya sudah mengadakan komunikasi dengan peserta koalisi.

Media Frame: Media Indonesia ingin memperlihatkan ternyata para partai pendukung SBY mampu mengambil sikap penolakan atas keputusan yang dianggap mengecewakan dan merugikan mereka sekalipun SBY memiliki posisi tawar yang tinggi karena menang saat pileg lalu. Bahkan PKS berani mengancam untuk membentuk poros baru padahal yang kita tahu, PKS adalah partai yang paling berambisi untuk berkoalisi dengan Demokrat. Dilain pihak, SBY digambarkan tidak terpengaruh oleh kecangganya sikap protes dari para mitra koalisinya.

## Interview via Email dengan Gaudens Suhardi 13 April 2011

1. MI sepertinya ingin koalisi besar antara Golkar-PDIP terjadi pada saat itu?
  - MI sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk mendorong terciptanya koalisi besar antara Golkar dan PDIP. Akan tetapi, jika diperhatikan berita-berita yang ditampilkan MI, nara sumber berita-berita itulah yang menghendaki koalisi besar itu, Framing yang dilakukan oleh peneliti itu *postfactum*, dilakukan setelah fakta terjadi, Itu artinya, sah saja ada kesimpulan bahwa MI seperti ingin koalisi besar itu terwujud. Kesimpulan itu selaras dengan sikap MI di dalam editorial. Dalam beberapa kali editorial, MI berpendapat bahwa perlu ada koalisi besar antara PDIP dan Golkar untuk menyeimbangi Demokrat yang keluar sebagai pemenang Pemilu 2009.
2. MI menggambarkan Golkar sebagai korban dari pemerintahan SBY pada tahun (2004 hingga 2009) sehingga memang lebih baik untuk berpisah saja?
  - Sekali lagi saya tegaskan bahwa MI tidak pernah menggambarkan seperti itu. Akan tetapi, narasumber yang dimuat dalam berita itulah yang menempatkan Golkar sebagai korban. Bukan MI. Kesimpulan peneliti sah, sebab yang diteliti itu struktur berita di dalam framing. Seakan-akan MI mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu.
3. MI menggambarkan Demokrat sebagai partai yang tidak pantas diperebutkan walaupun jumlah suara paling tinggi. ini dapat dilihat dari ditonjolkannya suara-suara penolakan oleh sebagian Golkar. begitu juga ditonjolkannya beberapa rekan koalisi Demokrat yang tidak segan-segan berani mengancam membentuk poros baru. Hasil Pemilu 2009 menempatkan perolehan kursi DPR, Demokrat lebih tinggi daripada Golkar disusul PDIP. Bagaiaman menurut bapak?
  - Situasi politik ketika itu adalah SBY tidak mau lagi bergandengan dengan Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Golkar. Sementara PDIP sudah menetapkan capresnya Megawati Soekarnoputri. Adalah fakta yang terang benderang bahwa internal Golkar juga tidak

menghendaki JK bersatu dengan SBY.  
Penonjolan berita oleh MI tidak sama dengan sikap MI sebagai institusi.  
Sikap MI sebagai institusi ada di editorial.

### **Interview Via Email dengan Maya Puspita 15 April 2011**

#### **Pertanyaan :**

Untuk data tambahan, saya butuh informasi pada saat mbak maya kuliah, aktif dalam organisasi apa saja dan sejauh mana ketertarikan mbak maya dalam dunia politik, sebelum menjadi wartawan rubrik polkam dan setelah menjadi wartawan rubrik Polkam. Terima Kasih

#### **Jawaban :**

Sewaktu kuliah saya aktif di Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas. Saya berorganisasi untuk mengasah kemampuan *soft skill* saya seperti kemampuan berkomunikasi dan manajerial. Ketika itu saya tidak terlalu tertarik dengan dunia politik nasional. Setelah terjun di dunia jurnalistik dan diamanatkan sebagai wartawan Polkam, mau tidak mau saya “dipaksa” untuk menyelami perpolitikan nasional. Apalagi saya ditempatkan di DPR. Saya diajari untuk melihat suatu permasalahan politik tidak secara *ansih* tapi *beyond the actual problem*. Siapa ini menguntungkan siapa..Apalagi pernyataan politisi kerap seperti pisau bermata dua. Kalau sekarang ditanya apakah saya suka politik? Jawabannya tetap tidak tetapi saya berusaha bersikap profesional terhadap profesi saya. *Hehehe...*

## **Editorial Media Indonesia**

Edisi : 1 Mei 2009

Halaman : 01-05

Rubrik : Editorial

### **‘Koalisi Besar dengan Figur Baru’**

GERAKAN koalisi kiranya mengarah kepada dihasilkannya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada pemilu presiden mendatang. Penyebabnya yang utama adalah karena pembentukan koalisi besar yang hendak dibangun Golkar dan PDI Perjuangan menghadapi rintangan besar. Inilah ambisi besar dengan persoalan besar.

Persoalan yang paling besar tentu saja menyangkut siapa yang akan menjadi calon presiden dan siapa pula yang akan menjadi calon wakil presiden. Bukankah sebagian besar parpol yang akan bergabung dalam koalisi besar itu sudah memiliki calon presiden yang ditetapkan dalam mekanisme internal partai masing-masing?

Partai Golkar, misalnya, sudah menetapkan ketua umumnya Jusuf Kalla sebagai calon presiden. PDI Perjuangan jauh hari sebelum pemilu legislatif digelar telah lebih dahulu menetapkan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, untuk bertarung menjadi RI-1.

Begitu pula dengan Gerindra. Partai ini pun gamblang mengusung Prabowo Subianto untuk maju menjadi calon presiden. Apalagi Hanura, yang didirikan antara lain memang untuk kendaraan politik yang membawa Wiranto untuk menjadi presiden.

Persoalan lain yang tidak kalah besarnya adalah jeleknya kekompakan internal partai untuk merapatkan barisan dalam koalisi besar. Golkar masih terbelah. Sebagian elitnya masih mencari-cari lorong menuju kekuasaan di Cikeas. Sementara PPP dan PAN belum menentukan arah koalisi kendati majelis

pertimbangan kedua partai itu sudah ngebet menyatukan diri dengan SBY, sang incumbent.

Masih ada persoalan besar lainnya, yaitu terbatasnya waktu. Membangun kesepakatan besar jelas memerlukan semacam kesabaran bernegosiasi. Diperlukan dada yang lebar untuk saling memberi dan menerima. Padahal, itu semua telah menjadi kemewahan. Koalisi besar itu sekarang harus dibangun berpacu dengan waktu. Tepatnya dalam tekanan waktu. Pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum berlangsung 10 Mei hingga 16 Mei. Itu berarti koalisi besar harus menemukan wujudnya dan isinya dalam sepekan ini.

Tidak ada cara lain, para pucuk pimpinan partai peserta koalisi besar harus segera duduk bersama untuk melahirkan kesepakatan. Mereka mesti menyepakati satu nama yang diunggulkan sebagai calon presiden dan satu nama lain untuk menjadi calon wakil presiden yang diusung bersama. Kesepakatan bersama hanya bisa dicapai jika para pucuk pimpinan partai dengan jiwa besar melepaskan egoisme mereka. Melepaskan egoisme untuk menanggalkan banderol calon presiden yang sudah ditetapkan partai masing-masing.

Calon presiden dan calon wakil presiden yang disepakati itu mestinya figur yang mengagetkan lawan. Mengagetkan karena tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah masuk bursa, padahal berpeluang besar untuk meraih simpati pemilih. Inilah sosok yang mampu memberi alternatif pilihan, sehingga pemilu presiden kelak berlangsung dengan seru. Tidak seperti suasana yang berkembang sekarang seakan incumbent sudah pasti menang karena menghadapi calon dari stok lama.

Kita percaya, sangat percaya, para pemimpin partai yang mau bergabung dalam koalisi besar itu memiliki jiwa besar untuk mengalahkan egoisme mereka masing-masing. Mereka tahu benar mana yang penting, kurang penting, dan tidak penting

bagi bangsa dan negara ini.

Teaser: Inilah sosok yang mampu memberi alternatif pilihan, sehingga pemilu presiden kelak berlangsung dengan seru. Tidak seperti suasana yang berkembang sekarang seakan incumbent sudah pasti menang.

Edisi : 2 Mei 2009

Halaman : 01-ED

Rubrik : Editorial

### **‘Koalisi Besar Risiko Besar’**

KOALISI besar yang digagas di tengah skeptisisme publik yang tidak kalah besar akhirnya dideklarasikan juga. Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra menjadi pilar utama kesepakatan itu. Keempat partai itu menguasai sekitar 37% kursi di DPR.

Koalisi besar yang hanya menyepakati kerja sama di parlemen itu juga menggandeng beberapa partai kecil yang tidak lolos ambang batas 2,5% kursi di DPR.

Karena hanya bersepakat di parlemen, sesungguhnya inilah koalisi besar setengah hati. Karena setengah hati, risikonya besar. Besar karena yang dipertaruhkan adalah kredibilitas politik itu sendiri.

Dengan hanya berkoalisi di parlemen berarti dari koalisi besar itu sangatlah mungkin akan hadir lebih dari satu calon presiden. Dengan demikian, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah dua atau lebih calon presiden yang disodorkan oleh anggota koalisi masih mencerminkan atau bagian dari kesepakatan substantif koalisi? Bukankah itu berarti mencerminkan kegagalan koalisi itu sendiri?

Kalau cuma bersepakat di parlemen, koalisi besar kehilangan harapan yang besar pula. Karena ini, kalau boleh disebut koalisi setengah hati, mengandung risiko yang amat besar. Tidak semata besarnya risiko akan kalah dalam pertarungan kursi presiden, tetapi juga risiko kehilangan kredibilitas terhadap politik itu sendiri. Kredibilitas partai politik dan kredibilitas politikus juga.

Kredibilitas itulah yang terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Karena koalisi besar itu adalah koalisi setengah hati, risiko terbesarnya adalah pengingkaran terhadap koalisi itu sendiri. Politik kita adalah pentas yang memamerkan inkonsistensi sikap secara telanjang dan tidak malu-malu. Politik dan para politisi dengan gampang berargumentasi bahwa perubahan, termasuk inkonsistensi sikap, adalah bagian yang wajar dan tidak terelakkan dari proses politik. Apologi yang mengerdilkan.

Tatkala para petinggi partai dalam koalisi besar hanya bersepakat dalam kerja sama di parlemen, itu adalah koalisi yang longgar. Longgar karena mereka tidak mau mengorbankan ego individu masing-masing. Mereka tidak mau menjadi negarawan, tetapi tetap bertahan sebagai politikus.

Egoisme individu terlihat sekali ketika mereka tidak menganggap penting survei tentang elektibilitas masing-masing yang tergolong rendah. Egoisme juga diperlihatkan pada keyakinan yang tinggi bahwa mereka selalu menjadi muara dari aspirasi rakyat dalam pencarian pemimpin dari waktu ke waktu. Seakan-akan tidak ada lagi manusia di bumi Indonesia ini yang pantas dan mampu menjadi pemimpin negeri.

Ketika politik diperankan para politikus yang tidak bisa memegang komitmen, yang tergoda oleh pragmatisme murahan, yang berkoalisi sebatas kata, politik yang memegang peran vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kehilangan nilai yang amat penting, yaitu kredibilitas. Ketika rakyat kemudian terus mencibir politik dan politikus karena inkonsistensi sikap, pertanyaan yang menyesak

dada yakni untuk apa semua proses demokratisasi yang digulirkan dengan biaya yang sangat-sangat mahal?

Edisi : 25 April 2009

Halaman : 01-ED

Rubrik : Editorial

### **‘Membangun Koalisi Kelembagaan’**

BERCERAINYA JK dan SBY ternyata membawa implikasi yang bagus bagi tegaknya etika politik. Setidaknya hal itu tampak dari respons dua tokoh.

Pertama adalah respons Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan legowo dan tunduk pada putusan Rapimnas Khusus Golkar yang mengajukan JK sebagai calon presiden tunggal. Sultan yang sebelumnya menyatakan diri maju sebagai calon presiden tak akan maju lagi. Sultan bukan hanya patuh kepada keputusan Rapimnas Khusus Golkar. Lebih dari itu, ia menilai keputusan rapimnas khusus itu menunjukkan Golkar telah kembali ke identitasnya sebagai partai besar.

Sikap Sultan itu menuai pujian karena menunjukkan kematangan politik. Ia pun patut dicontoh karena menjunjung tinggi etika politik dan menjaga keutuhan partai. Ia pun layak dihormati karena jujur mengakui bahwa peluang dirinya untuk menjadi presiden toh kecil.

Kedua yang patut dipuji adalah respons SBY yang mengatakan dia tidak akan mengambil calon wakil presiden dari Golkar. Itu menunjukkan SBY pun menjunjung tinggi etika politik. Ia tak ingin memecah belah Golkar dengan mengambil orang Golkar menjadi cawapres. Sikap yang juga layak dihormati.

Akan tetapi, etika politik itu mestinya tak hanya berhenti di situ, yaitu hanya

ditunjukkan dalam konteks pencalonan wakil presiden. Etika politik mestinya juga dibawa secara konsisten sampai membentuk koalisi di kabinet. Dengan demikian, tidak ada lagi kabinet abu-abu, kabinet hasil politik dagang sapi. Tidak ada lagi kabinet hasil koalisi yang rapuh, yang dibentuk dengan cara membagi-bagi kursi kepada banyak orang dari banyak partai agar pemerintah aman di DPR.

Tegasnya, SBY pun mestinya tidak akan mengambil orang Golkar dalam pemerintahan yang baru bila ia dipilih kembali menjadi presiden. Sikap tegas itu sangat penting ditunjukkan dari sekarang agar tegas pula kelak siapa yang berkuasa, siapa pula yang menjadi oposisi.

Arah yang demikian itu sangat jelas tampak dari pertemuan JK dan Megawati bahwa Golkar dan PDI Perjuangan bersepakat untuk membangun pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat yang juga dibangun bersama Gerindra dan Hanura dalam koalisi berkaki empat bila koalisi inilah yang memenangi kursi RI 1.

Begitulah, koalisi partai yang memerintah di satu pihak, dan koalisi partai yang menjadi oposisi di lain pihak, akan tampak sangat jelas dan gamblang secara kelembagaan. Secara kelembagaan, bukan secara personal sehingga tidak terjadi kebijakan pemerintah ditentang di DPR oleh partai yang memiliki menteri di kabinet.

Hal itulah yang sekarang terjadi di Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan, ada menteri yang berasal dari suatu partai, tetapi tidak diakui partainya sebagai orang partai yang ditempatkan di kabinet.

Berdasarkan peta koalisi yang dibangun secara institusional itu dapat dibayangkan terjadinya keseimbangan kekuasaan yang sehat. Siapa pun yang menjadi presiden kelak, dia akan mendapat kontrol yang dahsyat di parlemen.

TEASER: Siapa pun yang menjadi presiden kelak, dia akan mendapat kontrol yang dahsyat di parlemen.

Edisi : 16 Mei 2009

Halaman : 01-ED

Rubrik : Editorial

### **'Kesepakatan Teuku Umar'**

KEDIAMAN Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4) menjadi salah satu tempat paling penting dalam konstelasi politik pascapemilu legislatif.

Penting, karena di sana berkumpul sejumlah tokoh nasional dan pemimpin partai. Penting pula, karena di sana dihasilkan penyikapan yang tegas terhadap pelaksanaan pemilu legislatif yang telah berlangsung.

Yang tidak kalah pentingnya adalah di sana lahir Kesepakatan Teuku Umar yang menghasilkan pernyataan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 adalah pemilu terburuk sejak reformasi. Bahwa pemilu ini telah diwarnai kecurangan dan kesalahan administrasi dan substansi yang sistematis sehingga mengakibatkan buruknya kualitas pemilu. Mereka mendesak KPU, Bawaslu, serta pemerintah agar menindaklanjuti semua laporan kecurangan pemilu dan menegakkan hukum terhadap kecurangan yang terjadi.

Pernyataan dan kesepakatan Teuku Umar sejatinya tidak hanya mewakili suara kaum politik yang tengah melakukan komunikasi menjelang berlangsungnya pemilihan presiden, Juli mendatang. Pernyataan dan kesepakatan itu juga menyuarakan keprihatinan anak bangsa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena busuknya daftar pemilih tetap (DPT). Pernyataan dan kesepakatan itu juga mewakili hati rakyat yang kecewa karena banyaknya pemungutan suara ulang, penghitungan ulang, dan beragamnya kasus anomali yang muncul di

banyak sekali daerah pemilihan.

Hal itu mengkhawatirkan, karena kredibilitas yang dipertaruhkan tidak lagi sebatas rezim pemilu, tetapi jauh lebih luas menjadi pertarungan atas kredibilitas bangsa yang sudah diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia. Karena itu dapat dipahami dan perlu didukung bila kelompok Teuku Umar menyuarakan keprihatinan itu.

Kesepakatan Teuku Umar adalah sebuah gerakan politik yang sekaligus menghasilkan upaya untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dengan jalur hukum. Ini didambakan semua orang yang menghormati demokrasi dan tegaknya hukum.

Kesepakatan Teuku Umar juga telah melahirkan sekurang-kurangnya dua makna penting dalam proses politik menjelang pemilihan presiden.

Pertama, terlihat dengan gamblang, betapa di sana ada upaya serius dari banyak kalangan untuk melahirkan pengelompokan politik yang lebih kental dan lebih solid untuk menghadapi incumbent. Bahkan, peristiwa langka pun terjadi, yaitu menyatunya dua jenderal, Prabowo dan Wiranto yang menunjukkan hebatnya kemauan untuk menyatukan kekuatan.

Berhimpunnya berbagai kekuatan di Teuku Umar itu jelas dapat melahirkan blok baru yang berkemampuan untuk memenuhi syarat mencalonkan presiden. Gabungan kekuatan PDI Perjuangan yang meraih sekitar 14,5% suara dengan Gerindra yang mendapatkan 4,1% dan Hanura yang meraih 3,6% ditambah partai-partai lain adalah lebih dari cukup untuk menandingi kekuatan Partai Demokrat.

Kedua, Kesepakatan Teuku Umar jelas merupakan langkah yang serius dalam konteks membangun kekuatan oposisi yang lebih jelas, lebih kuat, lebih tegas, dan

lebih berani. Inilah koalisi yang bila terus solid akan menjadi kekuatan pengawas dan penyeimbang kekuasaan yang sangat dihormati rakyat.



## Interview via Email dengan Wartawan Media Indonesia

-Mustain-

1. Apa dasar pemilihan narasumber dalam berita yang anda tulis?
  - Pertimbang pertama adalah penguasaan masalah dari berita yang akan kita tulis, dan nara sumber utama adalah pihak dengan kewenangan besar dalam sebuah lembaga/organisasi. Dalam konteks koalisi parpol, tentu semakin tinggi kedudukan akan membuat berita kita semakin akurat. Namun, tentu tidak mengesampingkan faktor kedekatan personal, sehingga informasi yang kita dapatkan benar-benar riil yang terjadi, bukan hanya pernyataan retorik dari para politisi tersebut.
2. Apa pertimbangan dalam memilih judul?
  - Pemilihan judul sebenarnya merupakan kewenangan penuh dari editor. Namun, reporter juga dalam tulisan masing-masing. Dalam pemilihan judul sebenarnya pertimbangan utamanya adalah kalimat yang menaungi isi keseluruhan berita, dan paling utama adalah menyesuaikan dengan *angle* berita. Dan biasanya *angle* berita ini ada arahan dari editor.
3. Menurut anda, apa sebenarnya pedoman yang baku seorang wartawan MI dalam peliputan maupun menulis berita khususnya untuk berita-berita terkait isu politik?
  - Tidak ada pedoman khusus, editor hanya memberikan proyeksi terkait isu-isu yang akan terus di *running* oleh Media Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan halaman pemuatan berita. Kecuali memang ada isu baru yang lebih menarik dari proyeksi editor.
4. Apakah anda memang tertarik dengan isu politik?
  - Iya saya memang tertarik dengan isu politik, namun bagi seorang jurnalis dituntut untuk mendalami berbagai isu. Karena, dalam sebuah berita tidak tertutup kemungkinan keterkaitan dengan isu-isu bidang lain. Misalkan antara isu ekonomi dan politik sebenarnya kaitannya sangat erat, contoh yakni pada isu Dana Aspirasi yang pernah digulirkan oleh DPR.
5. Bagaimana pendapat anda mengenai *manuver* para parpol dalam melakukan koalisi?

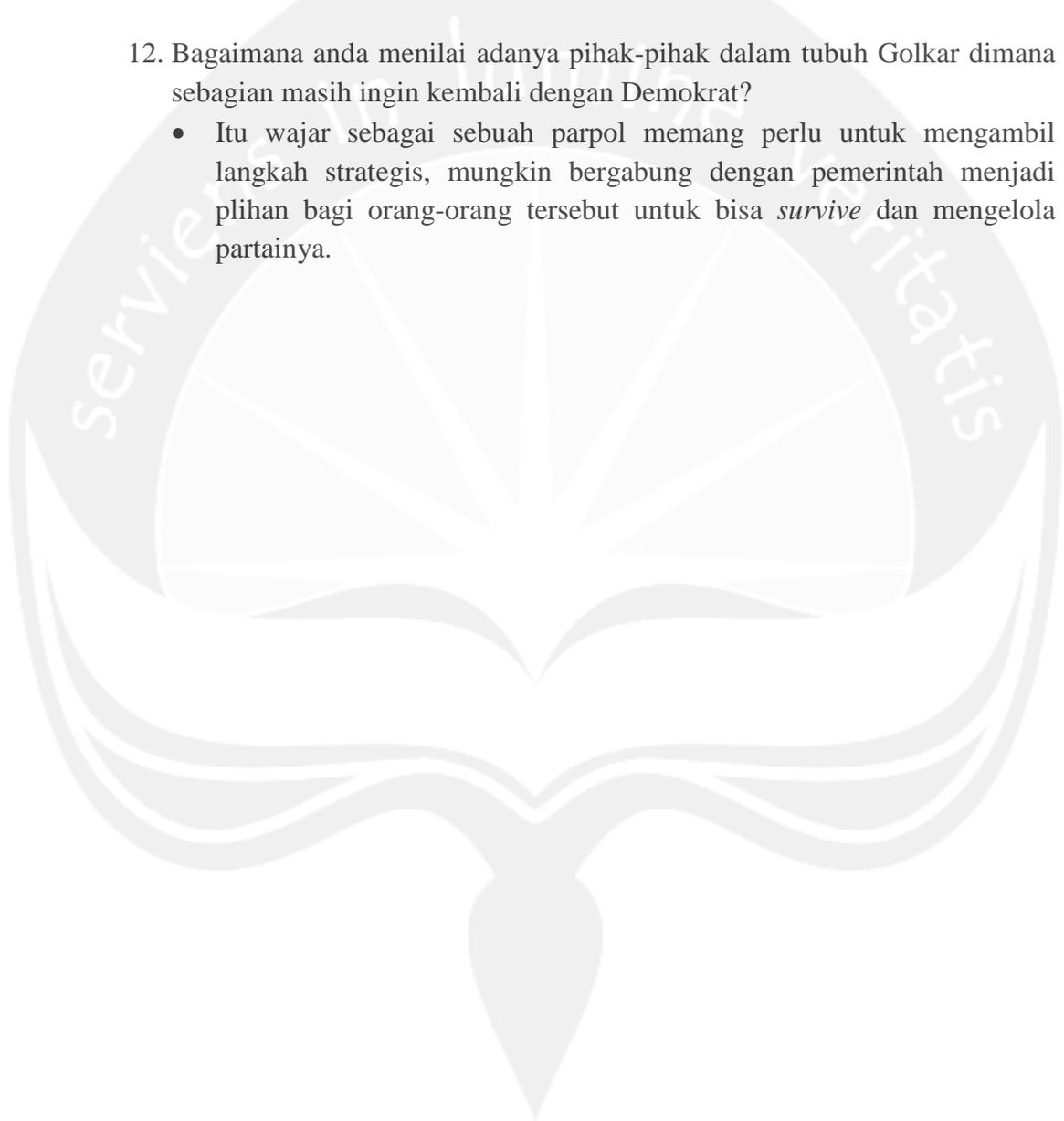
- Selama ini *manuver* parpol dalam melakukan koalisi cenderung pada kecocokan personal para elitnya. Pertimbangan kesamaan ataupun kecocokan ideologi sangat minim terjadi. Dan banyak yang terjadi antara parpol hanya bersifat pragmatisme.
6. Apa kendala anda saat meliput isu ini? kesulitan menemui para petinggi parpol?
    - Dalam mendalami sebuah isu, terutama mengenai koalisi parpol, yang dibutuhkan sebenarnya bukan sumber para pimpinan puncak parpol, namun tim dibelakang para pimpinan inilah yang mempunyai informasi sangat besar. Dan selama ini, memang untuk pucuk pimpinan parpol jarang dijadikan narasumber utama, karena mereka juga sedikit untuk berbicara kepada media terkait *manuver-manuver* partainya.
  7. Apa yang pakem dalam penulisan berita/pemberitaan di MI ?
    - Tidak ada yang pakem khusus di MI, yang jelas 5 w 1 H itu harus dipenuhi.
  8. Apakah ketika anda menulis berita, anda juga memposisikan diri sebagai pembaca? Artinya, apakah anda mempertimbangkan reaksi apa yang kira-kira muncul dari pembaca jika anda menulis “begini”? Atau anda memang sengaja menulis “begini” supaya reaksi pembaca juga “begini”?
    - Sebagai seorang wartawan, membaca juga merupakan bagian dari pekerjaan. Tentu memposisikan sebagai pembaca akan banyak membantu kita dalam pemilihan *angle*, sehingga kita bisa menelaah yang menarik bagi pembaca.
  9. Apakah ada instruksi khusus dari redaktur sebelum Anda meliput dan menulis?
    - Di MI, setiap hari ada proyeksi untuk melanjutkan berita-berita hari sebelumnya. Ini penting, karena pola isu yang dikelola di MI tidak bergantung pada peristiwa. Ini pun membantu bagi wartawan untuk menuntaskan isu-isu yang telah dikembangkan sebelumnya.
  10. Bagaimana anda menentukan *angle* peliputan atas suatu isu?
    - Pertama yakni pertimbangan menarik tidaknya berita, dan kedua terkait dengan proyeksi yang telah diberikan oleh editor. Pertimbangan menarik disini yakni tentu *human interest*.

11. Bagaimana menurut anda jika pada masa itu, Golkar ternyata memilih kembali bergabung dengan Demokrat ?

- Tidak masalah, politik sangat dinamis, kita menyikapinya juga harus dari sudut pandang jurnalis. Dan memang, sebelum Jusuf Kalla lengser, Golkar masih terus abu-abu, dan baru ditegaskan bergabung dengan pemerintah ketika Aburizal Bakrie menjadi ketua umum.

12. Bagaimana anda menilai adanya pihak-pihak dalam tubuh Golkar dimana sebagian masih ingin kembali dengan Demokrat?

- Itu wajar sebagai sebuah parpol memang perlu untuk mengambil langkah strategis, mungkin bergabung dengan pemerintah menjadi pilihan bagi orang-orang tersebut untuk bisa *survive* dan mengelola partainya.



## Interview dengan Wartawan Media Indonesia

-Maya Puspita-

Ini beritanya memang mbak yang *nulis* ya?soalnya setiap berita ada nama kayak *gini*..

- Media Indonesia memang pake *by line* atau *by name*. Cuma dalam penulisan keseluruhan berita, nama itu Cuma 70%, lainnya ada kontribusi dari koresponden. Misalnya untuk berita ini 'PKS Ancam....' kita mengambil pernyataan dari koresponden di NTT.

Kenapa memilih narasumber A atau B atau memakai judul ini?

- Biasanya *gini*, ada proyeksi berita di kantor waktu saya di Polkam. Misalnya kita mau *follow up* isu apa yang lagi *rame*, kebetulan karna saya dulu *nge-pos* di DPR. DPR itu kan memang politikus-politikus semua dari berbagai partai. Ya udah, misalnya kita mau *follow up* masalah 'PKS ANCAM TINGGALKAN DEMOKRAT BILA MERANGKUL JK', ya udah.. yang pasti kita *cover both side*. Dari PKS kita wawancara, dari Demokrat juga. Terus dari kubu JK juga dan terakhir dari pengamat yang melihat isu itu secara keseluruhan.

Kenapa menurut anda, kubu JK juga perlu ditampilkan disini (dalam judul ini)?

- *Ya kan* relevan ya. Maksudnya, itu kan ada tiga pihak yang dilibatkan. Kubu JK juga. Kita harus *tanya* juga *emang bener udah ditawarin sama* Demokrat untuk jadi Wapres, terus JK sendiri *emang* mau atau JK mau berdiri sendiri.

Kalau untuk nulis judul?

- Jadi biasanya kita ada sistem GPRS. Jadi untuk *ngirim* berita *gak* perlu ke kantor, bisa kirim lewat GPRS. Cuma untuk *angle*, kadang *ya gitu*..redaktur sama ASKADIV yang lebih berkuasa dalam menentukan sudut pandang berita. Mau *nyorotin* mana, untuk kebijakan penulisan berita segala macamnya. Kita (wartawan) tetap menulis berita dalam artian *pake* judulnya juga atau berita seutuhnya. Cuma nanti *dijait* lagi sama mereka (redaktur), *digabungin* sama berita dari koresponden tadi yang saya bilang baru kemudian jadi layak terbit. Mereka yang *ngedit* berita, terus biasanya *kalo* halaman luar biasanya ASKADIV (Asisten kepala divisi pemberitaan). Jadi untuk berita yang luar biasanya mereka yang mengarahkan.

Kalau untuk mbak sendiri memang tertarik dengan isu politik?

- Sebenarnya *background* pendidikan dulu di Pertanian, teknologi pangan. Jadi sebenarnya saya tidak teralalu awas dengan politik. Tapi jaman kuliah aktif di organisasi. Terus pas masuk sini (Media Indonesia) langsung di *taro* di desk Polkam. Mau *gak* mau *kan* harus belajar cepat *kan*.

Kenapa tertarik ke media?

- Seneng aja *si*. Kayaknya kok seru ya.. bisa ketemu sama orang baru terus banyak *previllage*, ke tempat-tempat baru. *Gak nyangka aja* dan *gak* pernah memplotkan menjadi wartawan.

Ada kendala *gak* selama melakukan peliputan?

- Biasanya kalau orang DPR itu tipikalnya hobi *ngomong*. Maksudnya berita inikan beritanya *talking news*, berita yang dari pernyataan orang bukan yang investigasi. Relatif lebih mudah *si*. Kita *cuma ngejar* narasumber dan tinggal merangkai kata-kata menjadi bentuk berita.

Ini saya lihat dari judul-judul kecil, beberapa mengambil dari pernyataan narasumber. Kenapa?

- *Ooo...kalo* itu tanya ke redaktur. Ini namanya *taiching*. Jadi dalam berita itu misalnya ada satu kalimat atau frase yang menarik itu biasanya *di keatasin*. Misalnya terlalu panjang buat judul cuma karna menarik, jadi *di keatasin*.

Kategori menarik?

- *Nah itu..ditanyain* ke redaktur *deh..soalnya kalo* reporter *gak bikin taiching*, yang *bikin* editor. Wartawan *cuma* isi berita kadang judul kecil.

Dalam judul berita 'PKS ANCAM TINGGALKAN DEMOKRAT BILA MERANGKUL JK', kata-kata ancam memang ada atau kesimpulan dari mbak?

- Kita *si* sebisa mungkin *gak mlintir* berita *si*. *Kalo* kita mau bikin judul 'ancam' itu kita harus dapat statement ancam dari PKS. Soalnya *kalo* kita bikin judul itu tapi ternyata *gak* ada kalimat itu kan berarti *melintir*. Bisa diprotes juga sama pihak yang bersangkutan.

Saat mbak menulis berita, memposisikan diri sebagai pembaca *gak*? Maksudnya, saya mbak *nulis* ini *biar* pembaca bereaksi seperti ini?

- Sebenarnya *kalo* untuk berita politik *si ya* memposisikan diri sebagai wartawan *ato* jurnalis. Kita memberitakan apa adanya kepada khalayak dan pastinya filter-filter itu ada. *Cuman kalo* saya *si* sebisa mungkin di lapangan itu saya *gak* memfilter itu. Biar pihak kantor *ato* kebijakan kantor untuk pemilihan kata, yang kontroversial atau yang *soft* itu biarkan kantor yang memilih. Karna dari berita saya itu kan *gak* langsung ke khalayak kan.

Berapa lama *nulis* berita tentang Politik?

- Hampir dua tahun lebih.

Ada yang pakem *gak* dalam *nulis* berita di Media Indonesia?

- 5W 1H dan disarankan banget bahasanya bertutur, yang enak dibaca dan *gak* loncat-loncat.

Sebelum liputan, ada instruksi dari redaktur?

- *Kalo* narasumber diserahkan kepada wartawan. Biasanya arah berita *aja*. Kita mau *follow up* isu apa. Pagi rapat proyeksi, dari situ *ketauan* mau liput apa, dari situ baru disebar ke wartawan. Tetapi *gak* jarang juga redaktur nanya ke wartawan, isu yang lagi marak apa. *Kayak* saya di DPR, ada isu apa di DPS. Ya dua pihak lah. Tetapi kebanyakan dari redaktur.

Wartawan *gak* punya kebijakan dalam redaksi?

- Dalam hal apa?

Konten?

- Untuk konten sebenarnya kita yang menghimpun dari lapangan, data-data dari lapangan. *Cuma* ketika sudah masuk sini, kita mau *ngangkat* soal apa. Tapi *si* biasanya gini ya, *kalo* kita (wartawan) udah *nge-pos* di satu tempat, dari pihak redaktur *tu ngasih tau*, kebijakan kita dalam pemberitaan *kayak gimana*.
- Ya media itu kan *gak* hitam putih. Ada abu-abunya juga kan. Pasti ada keberpihakan terhadap misalnya pihak-pihak tertentu. Apalagi *kalo* untuk rubrik politik ya. *Kalo* hukum *si* kita relatif keras, *gak* menutup-nutupi. *Cuma kalo* politik *gak* bisa dipungkiri. Apalagi *kalo* menyangkut pemilik. Kita juga mesti.....rata-rata semua koran kayak gitu mbak..

Berarti bisa dibilang pemilik memiliki pengaruh terhadap pemberitaan?

- Iya, bisa dibilang seperti itu. Itu berpengaruh. *Kayak* waktu persaingan Surya dengan Ical. Itu pasti *ngaruhlah*, ada *ngaruhnya* terhadap pemberitaan.

## Interview dengan Editor Media Indonesia

-Gaudensius Suhardi-

1. Apakah ada rapat redaksi rutin dalam Media Indonesia?
  - Berita itu sebelum dimuat di halaman berapa, masing-masing wartawan membudget, kami istilahnya membudget, untuk menentukan berita apa masuk halaman berapa.
  - Rapat setengah tiga atau rapat *checking* menentukan berita utama atau *headlinenya* apa di setiap halaman. Bahkan kalau untuk *Headline* halaman 1, menentukan sampai judulnya atau anglenya apa.
2. Berarti belum dalam bentuk berita?
  - Ini saya cerita dari pagi ya..
  - Malam harinya bentuk desain berita atau mungkin ada undangan dari mana..dan ini di tingkat redaktur kompartemen yang menentukan *angle* berita.
  - Pagi jam 9, ada rapat Proyeksi. Dihadiri oleh masing-masing pemimpin kompartemen. Untuk memproyeksi berita besok itu apa saja. Misalnya jam 9 pagi tadi, temen-temen kompartemen rapat, besok siapa mengerjakan apa, kompartemen ini mengusulkan apa untuk halaman luarnya.
  - Rapat siang jam 12 itu membahas berita-berita yang dipoles wartawan dari pagi itu ya..masuk ke halaman berapa, apakah kolom headline. Misalnya ini (sambil menunjukkan contoh *soft copy* berita), ini akan dimasukkan di halaman 1 atau 12. Disini belum menentukan berita utamanya apa.
  - Baru pada rapat setengah tiga rapat *Checking*, menentukan *Headline* yang mana, berita utama yang mana. Pertimbangannya adalah nilai berita tentunya, kecenderungan berita kemana, arah politik nasional kemana.
3. Bapak disini sebagai Editor?
  - Iya

4. Saya mengamati ada beberapa berita serupa, namun ada yang masuk jadi *Headline* ada yang masuk rubrik Polkam. Itu bagaimana pak?
  - Pengertian *Headline* itu, masing-masing hal mempunyai *Headline*. Setiap halaman punya *Headline*. (sambil menunjukkan contoh).
  - Pertimbangannya teknis. Bahannya banyak . tidak semua cukup dimasukkan dalam halaman 1.nanti ada sambungannya lagi di rubrik Polkam. Karna Media Indonesia tidak menganut mahzab berita halaman bersambung. Tetapi berita terkait ada di halaman lainnya.
5. Wartawan yang ada disini posisinya di *rolling*?
  - Iya
6. Ada ga wartawan yang memang terlihat kompeten di bidang ini, dan diminta untuk meliput ini?
  - Itu kalo udah masuk spesialisasi. Kalo pemula ya 1 tahun pertama di wajib *rolling* dulu baru kita liat kecenderungannya gimana
7. Apakah Surya Paloh sebagai pemilik memiliki pengaruh dalam kebijakan redaksional?
  - Kalo Surya Paloh si gak pernah hadir
8. Jadi sama sekali gak berpengaruh ya?
  - Sama sekali gak.
9. Bagaimana tanggapan anda mengenai *image* Media Indonesia menonjolkan parpol tertentu terkait Surya Paloh sebagai pemilik media?
  - Partai tertentu ya..*sebetulnya enggak*. Karena kalo Media Indonesia berafiliasi pada satu partai, pasti udah lama ditinggalin pembacanya. *Gak* mungkin dia hidup sampai sekarang. Kami hidup dari kepercayaan orang. Bagaimana mungkin orang mau memasang iklan kalo koran ini gak dipercaya orang atau hanya untuk kelompok tertentu atau afiliasi politiknya.
  - Kami memproklamasikan diri kami sebagai koran independen. Kami mengambil jarak yang sama pada tiap parpol. Bahwa dalam praktek jurnalistik selalu ada yang kami tonjolkan adalah apa yang penting. Kami tidak pernah menjual berita karna parpolnya tetapi karna isunya.

- Dalam konteks yang anda tanyakan tentang koalisi, pasti isunya akan kesana. Karna ketika itu isu koalisi setelah Pileg terkait dengan siapa yang menjadi Capres karna pada saat itu tidak 1 partai pun yang bisa mencalonkan sendirian.

### **Interview via Email :**

-Gaudens Suhardi-

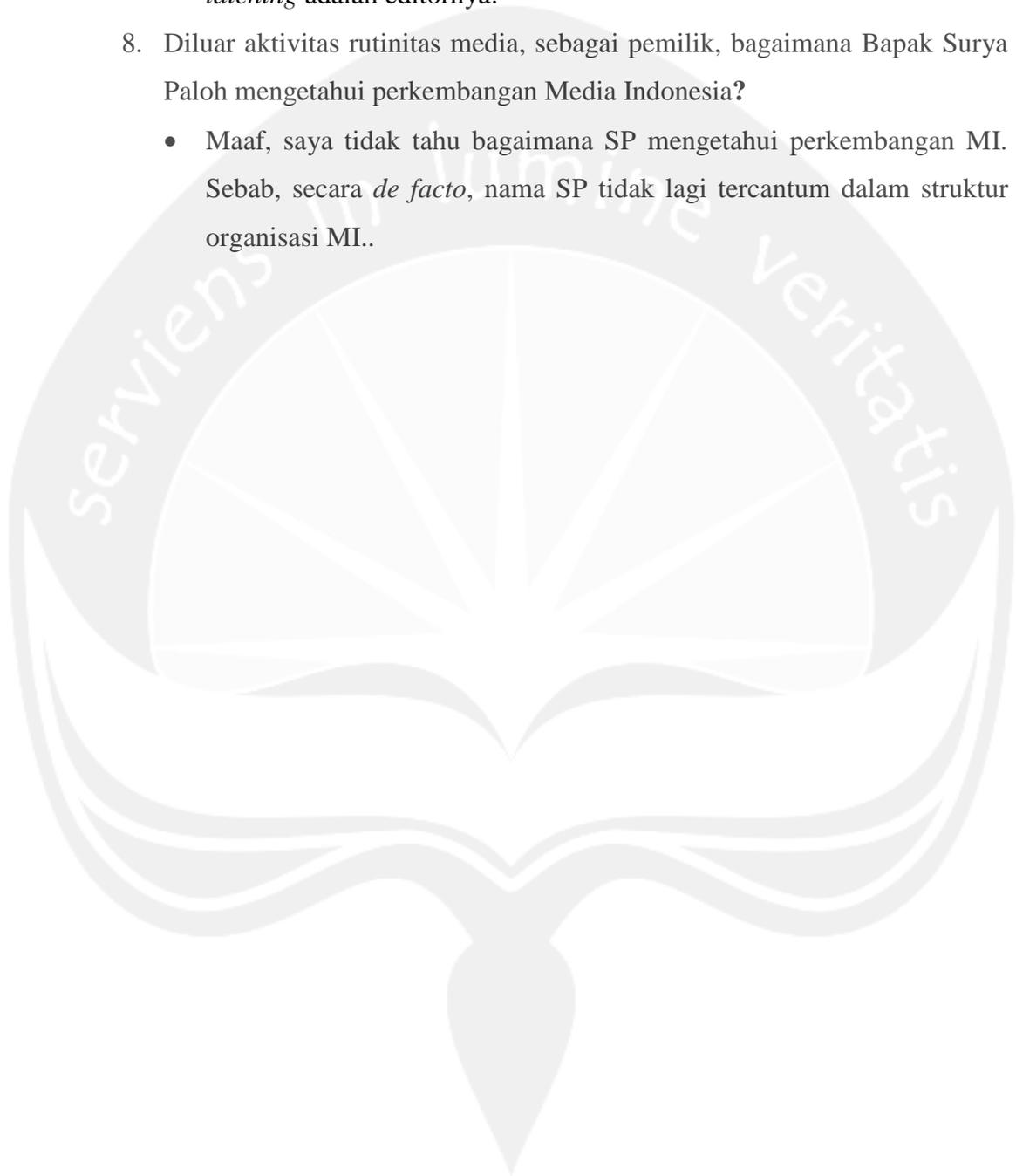
Beberapa waktu lalu bapak menjelaskan mengenai rutinitas media. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai rapat redaksi yang diadakan sebanyak tiga kali di Media Indonesia.

1. Pada rapat pagi jam 09.00, seperti yang sudah di jelaskan, masing-masing pemimpin kompartemen memproyeksikan berita. Siapa mengerjakan apa dan kompartemen ini mengusulkan apa untuk halaman luar. Dengan kata lain, selain menentukan *angle* berita apakah siapa yang menjadi narasumber juga ditentukan dalam rapat ini? Ada berapa kompartemen dalam Media Indonesia? Kompartemen di Media Indonesia yang mengikuti rapat adalah Polkam, Megapolitan, Nusantara, Weekend, Opini, Ekonomi, Olahraga, Internasional, Foto, dan Suplemen.
  - Siapa yang menjadi narasumber kadang-kadang ditentukan dalam rapat pagi tersebut.
2. Dalam rapat *budget* (jam12.00), apakah berita yang dibahas didalamnya adalah berita mentah dari wartawan?dalam artian belum di edit sama sekali?
  - Ya, rapat budget itu hanya membahas berita mentah yang sudah didapat maupun akan didapat oleh wartawan.
3. Masih dalam rapat *budget*, untuk menentukan suatu berita masuk halamn tertentu, selain tekhnis, pertimbangan apa lagi yang dipakai?misalnya ada berita A topiknya sama dengan berita B atau dengan rubrik yang sama,

panjangnya juga relatif tidak jauh berbeda, pertimbangan apa yang menguatkan anda memilih penempatan halaman?

- Ada beberapa pertimbangan penempatan berita. Pertama, berita yang masih menjadi trend. Misalnya, berita terkait demo di Mesir selalu ditempatkan di halaman luar bahkan menjadi berita utama. Kedua, kebaruan. Ada hal yang baru dari berita tersebut. Ketiga kemanusiaan. Berita-berita yang menyangkut kemanusiaan seperti kelaparan. Keempat, tragedi, misalnya kecelakaan pesawat.
4. Rapat terakhir (*Checking*) untuk menentukan *headline* yang mana, berita utama yang mana. Bahkan kalau untuk *headline* halaman 1 sampai menentukan judul atau *anglenya* apa. Itu kenapa? maksudnya, sepenangkapan saya teks yang masuk dalam rapat *checking* adalah sudah berbentuk berita otomatis sudah memiliki *angle*. Tetapi kemudian kenapa ada penentuan *angle* lagi dalam rapat *checking*? begitupun dengan judulnya.
    - Penentuan *angle* dalam rapat *checking* untuk memberi koridor kepada editor tentang arah pemberitaan. Sebab, *angle* yang dibuat reporter belum tentu sama dengan kebijakan redaksi.
  5. Masih mengenai *headline*, bapak pernah mengatakn, pertimbangan menentukan *headline* salah satunya adalah kecenderungan berita. Bias dijelaskan lagi gimana maksudnya pak?
    - Yang dimaksud kecendrungan berita menyangkut *trend*. Misalnya, demo di mesir masih menarik perhatian orang.
  6. Jika ada proses edit atas sebuah berita, itu lalu masuk dalam rapat mana?
    - Proses *editing* dilakukan oleh editor. Seusai rapat *cheking* ditentukan editornya. Editor halaman luar biasanya diserahkan kepada kepala divisi dan asisten kepala divisi yang kode *editing* mereka diawali huruf X.
  7. Mengenai judul kecil atau *taiching* itu siapa yang membuat? karna terkadang diambil dari pernyataan narasumber. Pertimbangannya apa?

- *Taiching* itu kutipan yang menarik. Itu bukan *lead*. Sebab, kalau *taiching dicabut* tidak merusak keutuhan berita. Yang menentukan *taiching* adalah editornya.
8. Diluar aktivitas rutinitas media, sebagai pemilik, bagaimana Bapak Surya Paloh mengetahui perkembangan Media Indonesia?
- Maaf, saya tidak tahu bagaimana SP mengetahui perkembangan MI. Sebab, secara *de facto*, nama SP tidak lagi tercantum dalam struktur organisasi MI..



## Interview Tahap ke II dengan Editor dan Wartawan Media Indonesia

-Gaudensius-

1. Bagaimana kiprah partai Demokrat menurut Bapak?
  - Kalau kita memperhatikan sejumlah penelitian ya..hasil survey, terutama survey yang dilakukan oleh LSI..kalau kita perhatikan popularitas SBY lebih tinggi daripada popularitas Demokrat. Artinya tanpa Demokrat pun, SBY pada saat itu keterpilihannya itu sangat tinggi dan itu terbukti di dalam Pemilu 2009 itu SBY mendapat dukungan suara sebanyak 80% lebih.
2. Berarti bukan karna Demokratnya tapi SBY..?
  - Karna SBY..itu kalau kita berpijak pada penelitian LSI, dari 2004 misalnya dia tidak banyak berperan karna memang suaranya dia tidak mutlak. Artinya pada 2004 sampai 2009 Demokrat sebagai partai masih berada di dalam bayang-bayangnya Golkar, JK karna perolehan suaranya tinggi di dalam hasil Pemilu 2004 dibandingkan dengan Demokrat. Akan tetapi Demokrat mampu melakukan peran mengawal kebangkitan JK-SBY walaupun saat-saat akhir 2009, pernyataannya Mubarak ketika itu mulai pecah koalisi sampai akhirnya Demokrat memutuskan untuk mengusung sendiri tanpa lagi bersama dengan Golkar.
3. Pandangan pribadi SBY sebagai pemimpin Demokrat?
  - *Hmm....*pada Pemilu 2009 kalo memperhatikan pemberitaan MI, condongnya lebih ke Golkar walaupun sebgai berita..sebagai Koran dia independen, tapi kecenderungan pemberitaan lebih ke Golkar.  
SBY justru tadi saya katakan, bahwa dia itu tingkat keterpilihannya atau popularitasnya melebihi Demokrat. Artinya SBY itu langsung atau tidak langsung mampu *manage* keperluan partai untuk kepentingan dirinya sehingga yang lebih terkenal itu SBY daripada

Demokratnya. Dengan kata lain SBY memang memanfaatkan Demokrat untuk kepentingannya.

4. Saat setelah Pileg kemarin, partai lain gencar mencari rekan koalisi. Sedangkan Demokrat *nggak*. Gimana menurut anda?

- ketika itu demokrat dan SBY adalah *incumbent*. Demokrat dan SBY adalah juara bertahan dalam kompetisi Pilpres 2009. Karena itu, demokrat dan SBY tidak proaktif menyusun koalisi. Koalisi justru digagas Golkar bersama PDIP. SBY dan Demokrat baru giat menyusun koalisi setelah keluar sebagai pemenang Pilpres

Itu tidak terlepas dari gonjang-ganjing politik pada saat itu *ya...* ketika SBY memilih untuk maju sendiri tanpa mengajak Golkar, ketika itulah Golkar berkecenderungan, karna Golkar sendiri itu sudah memutuskan untuk mengajukan Capres *ya...* sementara PDIP juga sudah mengajukan Capres.

- Memang dalam perjalanannya mungkin pengaruh tokoh-tokohnya juga ada kesejajaran, ada kesejajaran, atau ada jalan seiring antara PDIP dan Golkar menghadapi Pemilu di satu sisi dengan SBY di sisi lain. Itu bias siliat misalnya dalam beberapa kali jauh hari sebelum Pemilu, Ketua Dewan Pertimbangan Golkar mengajak Ketua Dewan Pertimbangan PDIP jalan bersama-sama ke daerah, bersilaturahmi bersama-sama. Itu memang sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Ketika itu Ketua Dewan Pertimbangan Golkar itu Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan PDIP itu..*hmm....*Taufik Kiemas. Mereka bersama-sama melakukan komunikasi politik dan berada di acara yang sama di Sumut, Medan dan kota-kota lain. Jadi memang ada keinginan untuk bersama-sama mungkin...*ya..* mungkin keinginan itu didasari pada ideology yang sama. Sama-sama nasionalis.

5. Mungkin bisa dikatakan sama-sama memiliki ambisi yang sama untuk mengalahkan SBY?

- Pada saat itu *si* mereka sadar gitu, karna jauh hari sebelumnya itu sejumlah penelitian itu memang *ya*. popularitas tinggi ada di SBY..*ya*...sama-sama orang yang mungkin mempunyai peluang terlalu kecil.
6. Tapi kemudian JK dan Mega akhirnya gak sepakat karna masing-masing ingin menjadi Capres.
- *Ya*..itu persoalannya. Karna masing-masing partai memutuskan didalam mekanisme organisasinya untuk memajukan mereka sebagai capres bukan wapres. Itu persoalannya. Akan tetapi kalau kita liat misalnya, sebelum maju ke pencalonan Presiden setelah hasil Pileg, sejumlah partai diluar Demokrat sudah melakukan kegiatan bersama-sama menandatangani kesepakatan untuk berkoalisi.
7. *Golden Triangle* itu *ya*?
- *Iya*..itu fakta bahwa memang mereka itu ada sama-sama ingin bersatu..*cuman*, *problem* terbesar itu ego masing-masing partai untuk membagi posisi atau dengan kata lain tidak ada kesepakatan dalam pembagian posisi sehingga merkapun maju masing-masing.
8. Bagaimana dengan ancaman PKS yang ditujukan kepada Demokrat jika Demokrat merangkul Golkar kembali?
- *Ya* memang itu *si* hal biasa dalam politik *ya*...ancam mengancam. Tepatnya berhitung tentang kekuatan. PKS tau persis bahwa tingkat keterpilihannya SBY itu tinggi. Karna itu orang mengatakan, SBY dengan siapapun dia bias maju. *Nah* kemudian menjadi *problem* di kemudian hari di koalisinya SBY adalah bagaimana menentukan Wapres disitu. Disitu semapt terjadi kemacetan komunikasi politik antara SBY dengan PKS. Karna PKS tetap menghendaki agar Wapres itu bukan Boediono tetapi harus orang partai yang berjasa.
9. PKS dengan jumlah suara yang tidak seberapa berani mengancam Demokrat yang notabene partai *incumbent*?
- Bukan mengancam *si*...di dalam politik itu, itu yang dinamakan *bargaining position* atau posisi tawar-menawar. Dia memanfaatkan

sebagai parpol Islam yang bisa sedikit banyak bisa menarik pemilih Islam untuk memilih SBY. Karna SBY inikan terkesan orang sebagai partai tengah..ya..partai nasionalis ya...bukan partai kanan...

10. Kiprah PDIP sendiri gimana menurut anda?

- Ada sesuatu yang menarik tentang PDIP ya...menariknya begini...Megawati udah maju pada Pemilu 2004 dan kalah...dan juga tetap maju pada Pemilu 2009 dan kalah juga. *Nah* persoalan utama PDIP itu tidak ada figure diluar Megawati atau inilah partai *paternalistic*. Partai yang tergantung sama pemimpinnya. Ketika pemimpinnya tidak lagi mempunyai peluang, atau tingkat keterpilihannya kecil, tapi dia tidak bisa langsung berbalik arah untuk melakukan pembenahan. Jadi Megawati dijual di 2004 kalah, di 2009 juga kalah dan tidak ada orang lain lagi.

11. Kekalahan itu kira-kira penyebabnya apa?

- Ya orang tidak suka dengan Mega tentunya. Tidak suka, karna hasilnya *njomplang* sekali dengan SBY. SBY itu menang satu putaran *lho*. Bahwa kemudian ada persolalan pada daftar pemilih, iya. Tapi kan tidak terlalu signifikan.

12. Kalau untuk Megawati sendiri sebagai pemimpin PDIP gimana?cara memimpinya, pemikiran-pemikirannya?

- Megawati itu seorang Ibu Rumah Tangga. Yang dibentuk oleh situasi karna ia ditekan oleh Orba..pemimpin Orba..sehingga mendapat simpati dari masyarakat dan itu bisa terlihat dalam Pemilu 1999, PDIP keluar sebagai pemenang Pemilu. Akan tetapi karna dia itu memang ibu rumah tangga, tidak..kurang menerapkan manajemen pemerintahan yang baik sehingga kalah di 2004. Megawati pada 2004 *incumbent* tapi kalah.

13. Berarti Mega belum cocok dan kuat untuk menjadi figur pemimpin partai yang besar?

- Disatu sisi bisa dibilang seperti itu. Tapi disisi lain bisa dikatakan bahwa rakyat memang udah pintar, tidak melihat lagi pada figur atau

seperti yang dikatakan oleh Megawati memang pesaingnya itu (SBY) pandai bersolek. Jadi ketika itu masyarakat lebih terpatri, terpukau pada figur. Kalo kita misalnya *flashback* ke 2004 kenapa SBY bisa menang, sedikit banyak karna komunikasi politik yang jelek dari PDIP. Misalnya menyebut SBY sebagai Jendral kanak-kanak, sehingga muncul simpati masyarakat pada SBY.

14. Tetapi kemudian kenapa Megawati tetap menjadi pemimpin PDIP?

- Setidaknya sampai 2009 itu masih ada krisis kepemimpinan didalam PDIP..Megawati salah satu Ketua Partai yang terus-menerus dipilih *lho*...itu berarti regenerasinya gagal. Baru sekarang dimunculkan anaknya.ya itu berarti diakui atau tidak diakui PDIP sedang memelihara politik berdasarkan trah atau politik Dinasti.

15. Bagaimana tanggapan anda mengenai Mega yang sempat ingin menggandeng JK? padahal PDIP itu oposisi sedang JK itu identik dengan kekuasaan atau pemerintah?

- Oposisi...di Indonesia sebenarnya kalo kita menganut sistem politik di Indonesia, tidak ada oposisi. Karna kita menganut Presidensial, bukan parlementer. Oposisi didalam teori Ilmu Politik hanya ada di sistem pemerintahan Parlementer. Tetapi praktek bernegara kita menggunakan system parlementer sesungguhnya, mengadopsi..sehingga dikenal oposisi. Tetapi politik mengajarkan kepada kita bahwa yang abadi itu kepentingan. Karna itu begitu cairnya ketika Megawati ingin atau bersahabat dengan JK misalnya, tidak ada *gab* disana karna cair sesungguhnya politik itu. Yang abadi adalah kepentingan.

16. Kalo untuk PDIP dengan Demokrat?

- Itu partai yang sangat menarik. Hubungan PDIP dengan Demokrat itu sangat menarik. Menariknya gini, ketika Megawati masih Presiden, SBY menjadi Menkopolkam. Pada saat itu SBY menjalin infrastruktur yang dipimpinnya membentuk partai yang namanya Demokrat. Itu berarti memang ada hubungan personal antara Mega dan SBY yang

kurang baik. Mega merasa ditikam dari belakang oleh SBY pada saat dia masih Menkopolkam mentrinya Megawati dia berbuat *membikin* partai sendiri.

17. Berkhianat gitu istilahnya?

- Iya betul..Karna itulah sebabnya sampai sekarang susah sekali menemukan dua orang ini. Lebih kepada personal. Kemungkinan Megawati tidak akan memaafkan SBY yang telah berkhianat. Itu....jadi persoalan pribadi mereka ini. Karna itu utnuk adanya keinginan, anjuran, harapan agar PDIP masuk kedalam koalisinya Demokrat susah sekali. Susahnya karna apa? Karna PDIP itu masih tergantung pada Megawati. Disisi lain, Taufik Kiemas dengan anaknya Puan Maharani tetap berkeinginan untuk bisa masuk ke dalam karna Puan pun ingin menjadi Menteri. Tetapi seluruh keputusan politik itu ada pada Ketua Umum *gitu kan*..Ketum itu adanya pada Mega. Jadi susah sekali bersatu, *ga* mungkin.

18. Kalaupun jadi masuk ke dalam koalisi, kira-kira efek negatifnya apa?

- Kecil sekali si kemungkinan itu *ya*...tapi efek negatifnya pada persepsi publiknya atau dengan kata lain publik bisa menilai bahwa PDIP itu pragmatis bukan lagi partai ideologi.

19. Kalo untuk Pemerintah sendiri?

- *Oh*...pemerintah tidak punya efek negatif kalau dia bisa menggandeng PDIP. Pemerintah justru mendapat nilai positif. Nilai positif yang didapat SBY bahwa SBY itu tidak pernah dendam, ingin merangkul semuanya. Nilai positif itulah yang didapat dari dia.

20. Bagaimana dengan kiprah partai Golkar?

- Golkar itu partai yang dalam sejarahnya adalah partai memerintah atau partai yang bagian dari pemerintahan. Karena itu tentu Golkar tidak akan pernah berada diluar pemerintahan. Atau dengan kata lain, Golkar itu tidak bisa punya pendirian selain berorientasi pada kekuasaan...*gitu*...Lewat kekuasaanlah dia berkilah atau

berargumentasi bahwa dengan kekuasaan yang ada itu dia bisa memakmurkan rakyat.

21. Kalau begitu kenapa sempat ada wacana *Golden Triangle*? Bersama dengan PDIP juga?

- Bersama-sama PDIP didalam pemerintahan, kalo bisa mengalahkan pemerintahan...*gitu*....

22. JK sendiri selaku pemimpin partai bagaimana menurut anda?

- *Yah*...semakin membenarkan tesis lain lagi bahwa Presiden memang harus orang Jawa. JK itu tidak kurang. Orangnya baik. Kepemimpinannya ada, tetapi tetap kalah...apa yang mau kita katakan dari kekalahan seorang JK yang didalam pemerintahan orang menyebut ketika dia masih menjadi Wapres, orang menyebut *the real President*. karena dia berani mengambil keputusan-keputusan pada saat dibutuhkan. Dia berani mengambil keputusan. Mustinya dengan *tagline* nya dia lebih cepat lebih baik mustinya dia terpilih. Buktinya kan tidak. Tentu bisa saja orang mengatakan bahwa keberhasilan SBY meredam lajunya JK. Bisa.....tapi saya melihatnya bahwa memang bangsa ini belum sepenuhnya rela memilih Presiden di luar Jawa.

23. Ada perbedaan cara memimpin atau..?

- 60% pemilih di Indonesia itu adanya di Jawa. Hampir 60% pemilih itu orang Jawa. Kalo kita liat, kemenangan JK itu di luar Jawa. Itu berarti memang masih butuh waktu lama orang luar Jawa bisa memimpin. Bahwa tragedi sejarah juga terjadi pada saat Habibie bisa menjadi Presiden itu bukan dipilih, bukan atas kehendak rakyat. Tapi ya...berkah dari sejarah.

24. Pada saat Golkar memutuskan berpisah dari Demokrat, gimana menurut anda? Memang harus seperti itu atau ?

- Ya...Golkar berpisah itu dalam tragedi Mubarak ya..jadi dalam sebuah statement persnya, Mubarak itu menyebut untuk tidak lagi bersama Golkar. JK memberi tanggapan sampai akhirnya terjadi kehebohan.

SBY lalu memutuskan untuk maju sendiri. Ketika dia maju sendiri itulah baru Golkar mengambil sikap.

25. Berarti semua berawal dari Demokrat ?

- Iya. Hubungan kurang harmonis antara JK-SBY itu berakibat pada Golkar memilih untuk maju sendiri. Padahal ya...hasil-hasil survey sebelum itu ya elektabilitas SBY itu tinggi sekali.

26. Apakah Mubarak menjadi satu-satunya alasan Golkar dan Demokrat berpisah?

- ya, pernyataan mubarak itulah pemicunya. Selain itu, hubungan SBY-JK pun kurang harmonis.

27. Lebih baik maju sendiri atau..?

- Karena kita bicara *postfactum*, setelah terjadi, tentu saja saya harus katakan bahwa tidak bagus buat Golkar maju sendiri. Karena buktinya kalah.

28. Didalam teks berita yang saya teliti ada kalimat 'Golkar hanya menjadi budak politik Demokrat'. Apa artinya?

- Ya..itu juga hasil penelitian. Bahwa untungnya kesuksesan pemerintah selama 2004 itu dipetik oleh SBY. Tetapi ketika ada kegagalannya , ya kegagalan partai Golkar, partai koalisi. Itu jeleknya. Inikan penjelasan orang Golkar yang ada di daerah. Itu taiching namanya. Hal yang menarik. Tapi tulisannya tidak tentang itu sebenarnya. Ini cerita tentang perlawanan. Jadi suasana pada bulan April ketika belum mengajukan calon ya...
- Internal Golkar ketika berita ini diturunkan seperti yang dikutip dalam media itu adalah tidak menginginkan dia (Golkar /JK) bersatu dengan Demokrat. Patah arang istilahnya dengan Demokrat. Dia ingin sebagai parpol, apalagi punya perolehan suara yang signifikan terlalu rendah buat dia jika hanya menjadi wapres. Apa *si* tujuan parpol? kalau kita lihat dalam UU Parpol, tujuan utama dari parpol itu adalah tidak hanya saja menyalurkan aspirasi masyarakat tetapi untuk merebut kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia menyejahterakan rakyat. Itu format dalam

UU Parpol. *Nah* kalo dia hanya merebut sebagai Wapres, terlalu rendah buat dia (Golkar). Dia tidak bisa menentukan arah perjalanan bangsa lima tahun ke depan.

-Maya Puspita-

1. Bagaimana kiprah PDIP menurut mbak Maya?

- Sebenarnya pasca Megawati lengser..tidak lagi menjadi Presiden, sebenarnya kan PDIP memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. *Cuman* pada perjalanannya sebenarnya karna di satu sisi mungkin karna di parlemen dia sendirian sebagai oposisi (untuk yang saat ini) jadi tidak terlalu efektif *gitu lho....*
- Dalam artian, koalisinya pemerintah kan terlalu gendut sementara dia (PDIP) Cuma sama Gerindra ya *kalo gak* salah. Sebenarnya agak timpang. Kalo mo dibilang partai oposisi , sebenarnya gak oposisi-oposisi banget. Karna menjelang SBY bentuk kabinet itu kan sempat ada gonjang-ganjing pertemuan antara SBY dengan Taufik Kiemas. Mungkin ada *deal-deal gitu ya..* yang akhirnya bisa dapat jatah jadi ketua MPR. Kayak gitu kan mungkin ada *deal-deal* dibalik itu semua. *Cuman* yang pasti peran PDIP sebagai oposisi, dia tidak terlalu kelihatan. Apalagi *kalo* di parlemen ya sekarang. Contohnya hak angket kemarin (terlepas dari PKS dan Golkar ya..) itu juga kandas. Karna memang koalisinya pemerintah terlalu besar dan itu menumpulkan. Seharusnya kan parlemen itu dia bisa jadi lembaga yang mengontrol pemerintah..tapi karna mayoritas anggota parlemen itu anggota koalisi pemerintah jadinya ya tumpul peran mereka.

2. Mengenai figure Mega sebagai pemimpin PDIP?

- Sebenarnya *kalo* mau dibilang, dia masih punya kharisma ya dikalangan simpatisan PDIP yang akar rumput. Mungkin dia masih punya kharisma, terlepas dari orang-orang disekelilingnya yang

membelot..misalnya kayak suaminya sendiri. *Cuma* tetap ujung-ujungnya Megawati iniah yang punya partai. Kalopun mau *ngajak* koalisi, ya *ngajaknya* Mega. Maksudnya kalo SBY mau *ngajak* kolaisi segala macem, *kalo* Mega *gak* mau, ya *gak* bisa. Mega masih pemimpin yang kuat.

3. Salah satu berita yang saya teliti adalah 'PDIP pastikan koalisi dengan tiga partai'. Tetapi ada wacana lain yang menyinggung soal Mega yang mengeluhkan masalah Pemilu yang kacau seakan ingin mengkritik pemerintah. Bagaimana itu mbak ?

- Inikan sebenarnya membahas pertemuan antara Megawati dengan Prabowo ya...*hmmm.....lead* yang diangkat tentang koalisi karna itu yang menarik. Terus yang dibawahnya soal pembicaraan lainnya...ya *gak* masalah juga kan ?

4. *Gak* masalah juga *si* mbak...*cuman* maksudnya sebagian besar porsi berita sesuai *lead*, membahas mengenai koalisi tapi diakhir berita ditampilkan mengenai pemilu yang kacau.

- Karna sebenarnya kalo untuk kayak gini ya..koalisi *segala macem*, biasanya orang-orang itu (tokoh-tokoh partai) biasanya *gak* mau secara eksplisit *ngomong kalo* misalnya belum ada kepastian. Pasti kita (wartawan) membaca dari gerak-gerik terus dari pertemuan..itu kemudian *dibikin* berita.

5. Bisa dibilang sedikit menyimpulkan sendiri ?

- *Gak* juga *si*..kita memaparkan fakta kan sebenarnya. Ada pertemuan antara Mega dan Prabowo, apa saja yang dibicarakan. Kemudian *kalo* kita tidak mendapat pernyataan dari Mega dan Prabowo, kita kan juga....disini kan juga pasti ada tokoh-tokoh orang partai keduabelah pihak pasti kan....Pramono Anung PDIP, terus PPP tu Irgan Fairul Mahfiz.

6. Saat waktu itu, sempat ada wacana Mega menggandeng JK tanggapannya?

- Itu tidak terlepas dari tabiat Golkar *si* sebenarnya...ya maksudnya agak susah juga *si kalo* misalnya...*dia pake itung-itungan* ya..kalo Golkar

sama Mega. Sebenarnya mungkin bisa....bisa dilakukan, *cuman* nanti pasti ada.....waktu itu JK sama Mega sempet ketemu *gak* si?

7. Iya, sempat..awalnya bentuk *Golden Triangle* terus dekat, terus *gak* jadi karna masing-masing pengen jadi Presiden. Ya sebenarnya *gak* masalah..*cuman* itu..itung-itungan Golkar pasti dia akan realistis apakah sosok Mega ini masih diterima di masyarakat, menang atau *gak*. Kalo misalnya peluangnya kecil....karna kan sebenarnya kan tabiat Golkar itu kan *pengen* tetap berkuasa, dekat sama pemerintah. Itu *gak* bisa lepaslah..itu udah dari jaman dulu kan..agak sulit *kalo* kemudian Golkar jadi oposisi itu agak sulit. Dan ternyata terbukti kan...walaupun ketika Golkar mencalonkan Capres-Cawapres mereka, *cuman* ujung-ujungnya ada *deal* dan akhirnya mereka (Golkar) dapat jatah kursi menteri.
8. *Kalo* untuk wacana Demokrat ingin mendekati PDIP atau sebaliknya?
  - *Kalo* PDIP sama Demokrat *si* sebenarnya hasil dari lobi-lobinya Taufik Kiemas *kali ya*...Taufik Kiemas sama Cahyo Kumala ketika itu dikabarkan bertemu dengan Sudi Silalahi, orang dekatnya Presiden. Ya mungkin ada lobi. *Cuma* kemudian hmmm.....Taufik Kiemas sendiri kan menyerahkan kepada Megawati. Mungkin ada komunikasi politik, mungkin ada keinginan SBY untuk merangkul semua partai sehingga kekuasaannya mutlak di parlemen segala macam...*cuman ya*....mungkin sekali lagi Megawatinya *gak* mau. Masih *ngambek* sama SBY atau gimana.
9. *Kalopun* misalnya gabung, ada efek negatifnya *nggak*?
  - *Oh* pasti..pasti ada efek negatif di parlemen khususnya. Tidak akan ada lagi suara-suara kritis *segala macem*. Dengan kondisi yang sekarang *aja* dia udah tumpul, apalagi *gak* ada oposisi sama sekali. *Gak* bisa *kebayang* dan aneh..itu jadi Presidensial mutlak dan *balik* ke jaman Soeharto.
10. Pandangan mengenai kiprah Golkar seperti apa?
  - Ya..partai Golkar itu kan sebenarnya identik dengan partai penguasa, pemerintahan, karna memang sejak dulu, sejak jaman Soeharto *kan*

memang jadi partai pemerintah, penguasa. Dan sampai sekarang *image* itu masih melekat. *Image* cari aman, asal berkuasa, seperti itu....dan memang politik di dalam Golkar sendiri juga untuk pemilihan Ketua dan segala macam itu *kan...hmmmm...apa ya....*tidak terlepas dari *money politic* sampai sekarang. Sebenarnya *gak* hanya Golkar. Mungkin partai-partai lain juga seperti itu cuman yang sangat kuat aroma *money politicnya* memang Golkar. *Sapa* yang punya uang, itu yang berkuasa di Golkar. Gak akan bisa jadi partai yang besar *kalo* masih seperti itu.

11. Kalau untuk JK sendiri sebagai pemimpin Golkar ?

- *Kalo* untuk sosok JK *si* sebenarnya saya, sosok secara pribadi *ya*, saya memandangnya *si* jadi korban sebenarnya Karena ketika dia memimpin Golkar saya melihat dia sosok sebagai Wapres. Sebagai Wapres itu dia kinerjanya sangat bagus. Dalam artian dia melengkapi SBY yang sifatnya lamban, susah membuat keputusan, sementara JK kan dia *tek..tek..tek...tegas*, terus dia tau apa yang harus dilakukan jangka panjang *segala macam*. Pikirannya simpel tapi sistematis dan solutif. Itu sebenarnya yang membuat pemerintahan SBY-JK kemarin efektif. Dan secara tidak langsung mempengaruhi *image* SBY di masyarakat sampai akhirnya dia (SBY) terpilih kembali.
- *Nah* di Golkar sendiri kan ada faksi-faksi. Faksi JK, faksi Ical. Ketika itu kan JK secara tegas sama Surya Paloh secara tegas berposisi dengan pemerintah. Sementara Ical ingin merapat dengan pemerintah..itu...*ya udah..kuat-kuatan aja...kuat-kuatan* pengaruh dan kuat-kuatan itu tadi yang saya bilang, *money politic*. Dan ternyata disini JK kalah. JK kan ketika itu mendukung Surya Paloh.

12. Keberhasilan SBY-JK 2004 tidak terlepas dari JK?

- Iya, tidak terlepas dari JK

13. Menurut mbak Maya, Golkar lebih baik jalan sendiri atau kembali dengan Demokrat?

- Pertanyaannya agak susah ya *kalo itu...hahaa....gak*, maksudnya...soalnya mungkin ada ego tersendiri ya dari Golkar. Dia itu partai besar dibandingkan Demokrat *kan. Terus* suara Golkar *kan kalo gak* salah lebih besar dibanding Demokrat Pemilu 2004, tapi justru ketika itu Golkar jadi Wapres, Demokrat jadi Presiden.
14. Didalam teks berita yang saya teliti ada kalimat ‘Golkar hanya menjadi budak politik Demokrat’. Apa artinya?
- Itu *kan* suara Golkar *kan* lebih mayoritas atau lebih besar daripada Demokrat. Tapi kenapa posisinya hanya sebagai Wapres. Sementara Demokrat, partai baru, jumlah perolehan suaranya juga masih sedikit tapi jadi Presiden.
15. Berarti terkesan merendahkan?
- *Ya kalo* di Pemilu 2009 terjadi lagi *ya* itu *Cuma* jadi budak politik *aja gitu....*budak politiknya Demokrat.
16. Dan untuk koalisi daur ulang itu maksudnya gimana?
- Koalisi daur ulang itu *ya* maksudnya yang *udah* ada terus diulang lagi. Mengulang kegagalan dan kekecewaan.
17. Berarti keputusan untuk lepas dari Demokrat itu bener?
- Iya
18. Kiprah Demokrat sendiri gimana menurut mbak Maya?
- Menurut saya *si* ketika Pemilu 2004 dia termasuk partai yang bagus *ya...dalam* artian dia membawa...dia dicitrakan sebagai partai reformis. Karena *kan* dia pasca kelengseran Soeharto *kan*.dan rakyat Indonesia sangat berharap banyak dari partai ini. belakangan setelah 2009 ini..*kan* memang..*ya apa ya...mungkin emang* tabiatnya seperti itu *ya...kalo udah* kelamaan...penguasa *kalo udah* terlalu lama berkuasa, pasti ada penurunan kualitas. Dan *kalo* sekarang, yang saya *lihat* memang popularitas dan penerimaan masyarakat terhadap Demokrat dibanding tahun 2004 menurun drastis. Dari kinerja pemerintah...kinerja itu tolok ukurnya dari kemiskinan, pengangguran yang *stag*. Kemudian dari pentas politiknya juga dari sosok SBY

sendiri *sih* yang dicitrakan sebagai pemimpin yang suka mengeluh dan masyarakat akhirnya jadi *ilfil* kan. Terus juga blunder. Jadi orang-orang disekitar SBY juga membuat *blunder*. Maksudnya menjatuhkan *image* Demokrat di mata masyarakat. Jadi *kalo* bisa dibilang kiprah Demokrat dari tahun 2004 itu menurun.

19. *Kalo* untuk SBY sendiri?

- Sama. SBY itu Demokrat begitu juga sebaliknya.

20. *Kalo* untuk soal ancaman PKS untuk Demokrat itu bagaimana *si*?

- Sebenarnya ini masalah pengaruh *aja ya...* memang ketika itu *kan* PKS mengincar posisi Wapres gitu *kan..dan kalo* misalnya Demokrat sampai merangkul Golkar lagi, otomatis peluang mereka (PKS) menjadi Wapres tergeser. Wajar saja ketika mereka mengancam *si*. *Ya* namanya politik. Gertak-gertakan wajarlah. dan sebenarnya untuk meningkatkan *bargaining position aja si*.

## Dokumentasi Naskah

## MEDIA INDONESIA

Edisi: 12 April 2009  
Halaman: 01-01

Penulis: (X-6) [mustain@mediaindonesia.com](mailto:mustain@mediaindonesia.com)  
Rubrik: UMUM

### PDIP Pastikan Koalisi ; dengan Tiga Partai

Dalam waktu dekat ada pertemuan dengan pimpinan Partai Golkar. (taiching) Akhmad Mustain ---penulis SETELAH hasil Pemilu 2009 diketahui, partai-partai politik bergerak membangun komunikasi sekaligus menjajaki koalisi. PDIP sebagai salah satu dari tiga partai papan atas menggalang koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua pendatang baru, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas memastikan koalisi tersebut kemarin di Jakarta seusai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya, Jumat (10/4), Megawati juga mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Hanura Wiranto.

"Dengan Gerindra dan Hanura pasti," kata Taufiq. Ketika ditanya bagaimana dengan Partai Golkar, Taufiq mengelak. "Besoklah. Rabu (15/4) depan sudah jadi koalisinya," sambungnya lagi.

Sekjen PDIP Pramono Anung menambahkan, bukan hanya dengan Gerindra dan Hanura, PDIP juga sudah berkoalisi dengan PPP. "Dengan Gerindra pasti, Hanura pasti, serta PPP," kata Pramono.

Saat ini PDIP juga sedang melakukan komunikasi dengan beberapa parpol lain. Bahkan dalam waktu dekat ada pertemuan dengan Golkar.

Pertemuan elite partai politik sudah berlangsung sebelum Pemilu 9 April. Pada pertemuan 12 Maret lalu, Megawati dan Kalla sepakat membentuk pemerintahan yang kuat. Pertemuan Megawati dengan Prabowo berlangsung pada 18 Maret dan Megawati dengan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali pada 19 Maret 2009. Suryadharma bahkan mewacanakan koalisi *golden triangle*, antara PDIP, Golkar, dan PPP.

Isyarat kepastian koalisi sebenarnya sudah pula dikemukakan Wiranto. Menurut mantan Panglima TNI itu, Hanura dan PDIP berada dalam koridor yang sama, yaitu harus ada perubahan di negeri ini. PDIP dan Hanura juga sudah membicarakan langkah politik yang dilakukan untuk mencapai tujuan politik bersama itu.

Koalisi PDIP, Gerindra, Hanura, dan PPP mengantongi minimal 27% suara. Berdasarkan hasil *quick count*, PDIP meraih sekitar 14,5% suara, PPP mendapat 5%, Gerindra 4,5%, dan Hanura 3,5% suara.

Sementara itu, Partai Demokrat unggul dalam Pemilu 2009 ini dengan mengantongi sekitar 20% suara. Adapun Partai Golkar mendapat 14% suara.

Koalisi PDIP, PPP, Gerindra, dan Hanura sudah cukup untuk mengajukan calon presiden. Namun, koalisi itu akan menjadi lebih kuat jika Golkar ikut bergabung sesuai komitmen awal membentuk pemerintahan yang kuat. Komitmen tersebut bisa berarti sebaliknya. Jika kalah, akan menjadi oposisi yang juga kuat.

Namun, koalisi itu masih menyisakan pertanyaan karena sikap internal PPP. Sebelumnya Sekjen PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan lebih realistis PPP merapat ke Partai Demokrat.

Di sisi lain, meski memperoleh suara terbesar dalam pemilu, Partai Demokrat tetap memerlukan koalisi untuk mengajukan calon presiden. Hal itu karena persyaratan dalam UU bahwa calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan suara minimal 25%.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan partainya akan menjalin komunikasi dengan partai lain. SBY menambahkan bahwa koalisi harus dinyatakan dalam kontrak politik secara tertulis dan dijelaskan kepada masyarakat sehingga

publik bisa mengontrolnya (*Media Indonesia*, 11/4).

*Prihatin*

Selain komunikasi politik yang bermuara pada koalisi, pertemuan Megawati dan Prabowo kemarin juga membahas keprihatinan mengenai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang terjadi di mana-mana. "Kami mempunyai keprihatinan yang sama, bahwa proses demokrasi tidak dijalankan sebagaimana mestinya," kata Prabowo didampingi Megawati usai pertemuan. "Ini adalah pemilu terburuk dan paling kacau."

Hal senada diungkapkan Megawati. Menurut dia, pemilu yang tadinya sangat diharapkan berjalan lebih baik ternoda dengan persoalan daftar pemilih tetap. "Banyak aduan yang masuk dan rasa ketidakpuasan masyarakat karena tidak bisa memilih," tukasnya.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## Dokumentasi Naskah

## MEDIA INDONESIA

Edisi: 23 April 2009  
Halaman: 01-01

Penulis: (Tim/X-8)emir@mediaindonesia.com  
Rubrik: umum

## Golkar Tinggalkan Demokrat

Demi martabat partai, 'tidak bersama kita bisa'.

Emir Chairullah SLOGAN 'bersama kita bisa' yang dikumandangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sejak 2004 kini tinggal menjadi kenangan. Sejak kemarin keduanya resmi berpisah. Partai Golkar meninggalkan Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2009.

"Setelah melakukan komunikasi yang intensif dengan Partai Demokrat, ternyata kita tidak menemukan titik temu. Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak mencapai mufakat," kata Sekjen Soemarsono dalam konferensi pers seusai rapat DPP Partai Golkar, kemarin.

Rapat yang dipimpin JK itu berlangsung sekitar 2 jam, berakhir pukul 11.55 WIB. Tim negosiasi Golkar menjelaskan pertemuan mereka dengan tim Demokrat. Negosiasi buntu karena Golkar dipaksa mengajukan nama cawapres lima orang. Selain itu, Golkar diminta untuk tidak melancarkan kritik kepada pemerintah. Permintaan itu dianggap sebagai intervensi sehingga Golkar meninggalkan Demokrat.

Karena itulah, rapat juga memberi mandat kepada Ketua Umum Golkar untuk melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai politik. Akan tetapi, keputusan final arah koalisi Golkar baru diputuskan pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) khusus yang berlangsung hari ini. "Mengenai koalisi, capres, cawapres dibahas besok (hari ini). Masalah akan merangkul siapa akan diputuskan semuanya besok (hari ini)," kata Sumarsono.

Tadi malam JK mengadakan pertemuan dan makan malam dengan pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar yang mengikuti rapimnas khusus Golkar hari ini. Pertemuan diadakan di Posko Slipi 2 Jalan Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itu merupakan konsolidasi menjelang rapimnas khusus. Selain pengurus DPD I Golkar, pertemuan juga dihadiri sejumlah pengurus harian DPP dan anggota Dewan Penasihat Partai Golkar.

Bersamaan dengan itu Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menggelar pertemuan dengan Tim Sembilan Partai Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor.

SBY yang sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan pers menanggapi keputusan DPP Golkar, akhirnya batal dan menugaskan Ketua DPP Demokrat bidang politik Anas Urbaningrum menggantikannya.

Anas menjelaskan Demokrat tidak menduga dengan sikap Golkar yang menyatakan tidak berkoalisi dengan Demokrat. SBY, kata Anas, mengarahkan agar masalah yang belum disepakati diendapkan terlebih dahulu untuk dibicarakan kembali pada pertemuan berikutnya.

"Namun, PD menghormati sepenuhnya keputusan Partai Golkar. Itu adalah hak politik Golkar meskipun disayangkan karena itu disampaikan secara sepihak," kata Anas.

*Daerah dukung*

Keputusan DPP Golkar yang bercerai dengan Demokrat terus mendapat dukungan daerah. Ketua DPD II Golkar Kabupaten Sleman, Purwanto, menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak nyaman bagi Golkar bila berkoalisi dengan Demokrat. Ketua DPD II Golkar Grobogan, Jawa Tengah, Icek Baskoro juga memberi apresiasi atas sikap tegas DPP. "Keputusan itu merupakan langkah maju," katanya.

Partai lain pun memberikan apresiasi. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menerima Golkar dengan tangan terbuka. PDIP segera menggelar pertemuan dengan Golkar, Gerindra, dan Hanura.

Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo menyatakan, saat ini kedua partai sebenarnya sedang menjajaki kemungkinan untuk melanjutkan koalisi. Namun, dengan keputusan Golkar itu, Demokrat siap berkompetisi dengan Golkar. Ia tetap optimistis SBY menang.

Sejarah mencatat tidak ada korelasi antara pemilu legislatif dan pilpres. Presiden terpilih 2004 bukan dari partai pemenang Pemilu 2004.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## Dokumentasi Naskah

## MEDIA INDONESIA

Edisi: 25 April 2009  
Halaman: 01-01

Penulis: (MP/NJ/Che\*/X-6) Mahfud  
Rubrik: POLKAM

## JK-Mega belum Sepakat soal Capres-Cawapres

Prabowo Subianto menjadi cawapres paling kuat untuk berpasangan dengan JK ataupun Megawati.

Mahfud CALON presiden dari Partai Golkar Jusuf Kalla terus bergerak lebih cepat lebih baik. Setelah kemarin pagi bertemu Ketua Umum Hanura Wiranto, tadi malam JK menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Ketiga pemimpin partai itu sepakat membangun koalisi dalam pemilihan presiden dan memperbesar koalisi dengan partai-partai lainnya.

Meski sepakat berkoalisi, Megawati mengakui masih ada kendala di antara kedua partai untuk mengusung pasangan capres-cawapres yang sama. "Proses koalisi sedang berjalan, tetapi ada kendala. Kami dari dua partai dengan posisi yang intrinsik berbeda," tegas Mega dalam konferensi seusai pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu.

Saat tiba di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, JK didampingi Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh, Sekjen Soemarsono, Burhanuddin Napitupulu, dan Ketua Fraksi Golkar DPR Priyo Budi Santoso.

Adapun yang menyambut Kalla adalah Megawati didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Taufiq Kiemas, Puan Maharani, Sekjen Pramono Anung.

Mega juga mengakui pihaknya kesulitan mencari sosok cawapres. Padahal, hari Sabtu ini Rakernas PDIP menentukan pasangan capres-cawapres.

Meski masih ada kendala, Megawati menegaskan kedua partai sepakat membangun pemerintahan yang kuat demi kemajuan bangsa dan negara.

Mega berharap partai-partai lain bergabung dengan PDIP dan Golkar.

Hal senada juga dikemukakan JK. Menurut Ketua Umum Golkar yang juga wakil presiden itu, Golkar dan PDIP telah sepakat membahas lebih lanjut prinsip pokok untuk membangun pemerintahan yang kuat di masa mendatang. "Kami sepakat membangun kebersamaan dan mengutamakan bangsa dan negara. Kedua hal tersebut mengalir pada tujuannya untuk membangun melalui pilpres yang akan datang," kata Kalla.

Saat menanggapi pertanyaan wartawan apakah PDIP dan Golkar sepakat membagi posisi capres dan cawapres, Kalla menyatakan akan dibahas lebih lanjut. "Ini dalam tahap pembicaraan awal, pada waktunya akan tercapai kesimpulan," elak Kalla.

Kemarin pagi, JK dan Wiranto juga membahas koalisi yang lebih besar. Wiranto membenarkan pertemuannya dengan JK telah menemukan kesamaan tujuan untuk membangun koalisi. "Kita akan bangun koalisi yang lebih besar lagi agar terbangun pemerintahan yang lebih kuat lagi," katanya.

Koalisi tiga partai itu sudah memenuhi syarat mengajukan capres, yaitu memperoleh minimal 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara secara nasional. Gabungan suara tiga partai itu sejauh ini mencapai 32,6%. Perolehan suara Golkar 14,6%, PDIP 14,2%, dan Hanura 3,8%.

Menjelang pemilu presiden yang digelar pada 8 Juli, partai-partai politik semakin giat menjajaki koalisi. Tadi malam, PPP mengadakan pertemuan di Bogor, Jawa Barat, juga untuk menentukan koalisi.

*Punya peluang*

Baik koalisi Partai Demokrat dengan PKS dan PKB maupun koalisi Blok Kebangsaan (Golkar, PDIP, Hanura), belum diketahui figur cawapres.

Di Blok Kebangsaan, figur cawapres yang paling kuat adalah Prabowo Subianto. "Dari data

kita, Prabowo akan menjadi rebutan. Peluangnya 40% baik sebagai cawapresnya JK maupun cawapresnya Megawati," kata Direktur Puskaptis, Husain Yazid, kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Adapun SBY, kata dia, tidak memiliki cawapres yang benar-benar kuat. Untuk Hidayat Nur Wahid hanya sebesar 18%, Akbar Tandjung hanya 1,43%, dan Sri Mulyani 8%.

Di mata pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Bachtiar Effendy, koalisi baru yang dimotori Golkar dengan PDIP berpeluang memenangi pemilihan presiden (pilpres).

"Pertarungan akan menjadi menarik karena kekuatan bisa berimbang," ungkap Bachtiar di Jakarta, kemarin.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## Dokumentasi Naskah

## MEDIA INDONESIA

Edisi: 12 Mei 2009

Penulis: (Mahfud/Rin/AO/X-8)  
mahfud@mediaindonesia.com

Halaman: 01-01

Rubrik: Umum

Komunikasi PDIP-Demokrat  
Berjalan kian Kencang

Koalisi pragmatis melunturkan budaya oposisi di parlemen.

PERSETERUAN antarfaksi dalam tubuh PDIP kian meruncing. Karena itu, selain menjalin komunikasi politik yang berjalan kencang dengan Partai Demokrat, PDIP juga tetap merangkul Gerindra.

Dalam satu minggu terakhir, sudah dua kali Hatta Rajasa selaku utusan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Padahal, komunikasi di antara dua tokoh itu putus sejak 2004.

Hatta pertama kali mendatangi kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, pada Rabu (6/5). Kunjungan Hatta itu dibalas. Megawati mengutus putrinya, Puan Maharani, Sekjen PDIP Pramono Anung, dan Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menemui SBY di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, pada Jumat (8/5). Kemarin, Hatta kembali menyambangi kediaman Megawati.

"Saya berkunjung ke Teuku Umar, melakukan suatu komunikasi, melanjutkan apa yang selama ini sudah terjalin, suatu komunikasi yang sangat baik antara saya sebagai yang diutus oleh Pak SBY untuk melakukan komunikasi politik dan Pak Taufiq, Ibu Mega, dan Mas Pram," kata Hatta.

Komunikasi menuju koalisi di pemerintahan dan parlemen antara Demokrat dan PDIP diakui SBY. "Saya rasakan komunikasi berjalan (dengan PDIP). Ada jalan yang cukup terbuka untuk kemungkinan bisa bersama-sama dalam upaya lanjutkan pembangunan bangsa," kata SBY.

Pramono pun mengakui komunikasi yang dilakukan PDIP dan Demokrat berjalan kencang. Dia mengatakan PDIP sama sekali belum tertarik dengan pembicaraan terkait dengan urusan bagi-bagi kursi menteri. Akan tetapi, Taufiq Kiemas sudah membocorkan kepada publik bahwa Demokrat menyerahkan kepada PDIP untuk memilih posisi di kabinet.

*Semakin sempit*

Waktu untuk membicarakan koalisi semakin sempit. Penutupan pendaftaran capres pada 16 Mei, sementara pada 15 Mei SBY mendeklarasikan pencalonannya sebagai presiden.

Sejauh ini, ada tiga faksi di PDIP, yaitu pendukung koalisi PDIP-Demokrat, faksi yang masih menginginkan Megawati berpasangan dengan Prabowo, dan faksi yang ingin Megawati menyerahkan posisi capres kepada Prabowo.

Faksi pendukung koalisi PDIP-Demokrat menjagokan Puan Maharani menjadi cawapres bagi SBY sekalipun SBY cenderung memilih Boediono. Puan juga dijagokan sebagai cawapres bagi Prabowo oleh faksi PDIP pendukung Prabowo capres. Sementara itu, faksi pendukung Megawati sebagai capres tetap menghendaki Prabowo pada posisi cawapres.

Tarik-menarik kepentingan antarfaksi semakin kencang. Untuk menjaga kekompakan internal PDIP, selain menjalin komunikasi dengan Demokrat, pada saat bersamaan PDIP kembali menjalin komunikasi dengan Gerindra sekalipun Taufiq Kiemas pernah menyebut Prabowo sebagai masa lalu. Tadi malam utusan PDIP menemui Gerindra.

Saat ditanya apakah Prabowo bagi PDIP sebagai masa lalu, Pramono menjawab, "Namanya politik. Masa lalu bisa menjadi masa sekarang kalau di-update sehingga dengan demikian sangat fleksibel dan sangat terbuka peluangnya. Bahwa kemudian bagaimana, di politik itu ya itu *last minutes* yang menentukan."

Di sisi lain, sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Penyelamat Indonesia (GPI) mendatangi kediaman Megawati, kemarin. Mereka berunjuk rasa menolak rencana koalisi PDIP dengan Demokrat.

Pengamat politik J Kristiadi pun menilai sikap PDIP yang didominasi kepentingan pragmatis akan melunturkan budaya oposisi di parlemen.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## Dokumentasi Naskah

Edisi: 13 Mei 2009

Halaman: 01-01

# MEDIA INDONESIA

Penulis: (Maya Puspita Sari/MP/Rin/AO/RK/X-8)  
mayapuspita@mediaindonesia.com

Rubrik: Umum

## Partai Pendukung SBY Siapkan Poros Baru

Koalisi partai pendukung SBY terancam rontok.

INFORMASI bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah memilih Boediono sebagai cawapresnya berembus kencang, kemarin. Empat partai pendukung SBY pun langsung menggelar rapat dan menggagas pembentukan poros alternatif.

Rapat partai pendukung SBY itu digelar di salah satu ruangan Fraksi PKS di Gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Peserta rapat adalah Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, Sekjen PKS Anis Matta, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin, Ketua Fraksi PAN yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPP PAN M Najib, serta Wakil Sekjen PKB Imam Nachrowi.

Mereka menggelar rapat setelah mendapatkan pemberitahuan dari utusan SBY soal pilihannya kepada Boediono yang kini menjabat Gubernur Bank Indonesia. "Kami terkejut dengan informasi itu karena tidak ada pembahasan sebelumnya," ujar Mahfudz dalam konferensi pers sesuai rapat.

Anis Matta menambahkan, pihaknya sudah mendapat undangan untuk menghadiri deklarasi koalisi pendukung SBY pada 15 Mei mendatang meski masalah cawapres belum jelas. Menurut rencana, SBY mengumumkan pasangan cawapres dalam sebuah deklarasi di Bandung, Jawa Barat.

Karena itulah, PKS bersama partai-partai pendukung SBY lainnya merasa perlu mengusung satu sikap apabila putusan soal cawapres itu terus dipaksakan tanpa berbicara dengan anggota koalisi lainnya.

### *Turunkan militansi*

Empat partai yang berencana berkoalisi dengan Demokrat itu masing-masing mengusung cawapres. PKS mengusulkan tiga nama dan figur yang terkuat adalah Hidayat Nur Wahid. PAN mengusung Hatta Rajasa sebagai pendamping SBY dan PKB mendukung Muhaimin Iskandar. PPP disebut-sebut mendukung Bachtiar Chamsyah. Empat partai itu berbasiskan Islam.

"Sebenarnya kombinasi antara Islam dan nasionalis itu cukup bagus untuk memimpin negara ini. Kombinasi ini bisa menyatukan perbedaan dan meningkatkan elektabilitas. Tapi kemudian tiba-tiba muncul hal seperti ini dan karena itu, kami ingin menyusun sikap bersama," ujar Anis Matta.

Tokoh empat partai itu sepakat untuk mempertimbangkan alternatif koalisi yang lain bila SBY tidak merevisi cawapresnya. Menurut Mahfudz, alternatif-alternatif koalisi tersebut banyak, bisa saja ditambah Partai Golkar dan Partai Hanura.

Hal yang sama juga ditegaskan Imam Nachrowi yang mengingatkan agar partai-partai anggota koalisi diajak berbicara sebelum keputusan diambil. PKB, ujarnya, menghendaki adanya hubungan yang harmonis sebelum pilpres. "Sebelum pilpres saja sudah seperti itu, apalagi nanti. Karena itu, kami inginkan adanya komunikasi sebelum deklarasi."

Adapun Lukman Hakim mengatakan masalah cawapres merupakan kewenangan capres. Namun, PPP telah tegas mengusulkan agar cawapres itu sebaiknya berasal dari kalangan parpol dan mempunyai akses yang baik ke parpol.

Di sisi lain, Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan mereka itu akan segera ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan tingkat ketua umum parpol pendukung koalisi.

Ia mengatakan munculnya nama Boediono yang merupakan tokoh nonparpol dikhawatirkan

dapat menurunkan militansi parpol-parpol yang saat ini tergabung dalam koalisi. Ia pun mengaku pihaknya telah mendapat pemberitahuan dari Hatta Rajasa selaku utusan SBY bahwa sangat mungkin SBY akan memilih Boediono sebagai cawapresnya.

SIKAP Partai Demokrat dan capres Susilo Bambang Yudhoyono yang secara serta-merta memilih Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi SBY, dinilai tidak menjunjung tinggi tata krama komunikasi politik. Padahal, dalam koalisi, hal yang paling krusial adalah komunikasi dan koordinasi di antara peserta koalisi.

Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers yang dihadiri Sekjen PKS Anis Matta, Ketua F-PKS DPR Mahfudz Siddiq, Sekretaris F-PKS DPR Abu Bakar Al Habsyi, Wakil Sekjen PPP Roma Hurmuziy, dan Fungsi PAN M Najib di Hotel Nikko Jakarta, tadi malam.

"Kita bersyukur sudah ada konfirmasi dari Partai Demokrat bahwa rencana penandatanganan kontrak politik di antara partai-partai koalisi yang sedianya dilakukan besok (hari ini), ditunda," ungkap Anis Matta.

Namun, Partai Demokrat tidak memberikan alasan penundaan waktu penandatanganan kontrak politik tersebut. Ke depan, katanya, nota kesepahaman hanya ditandatangani secara multilateral, tidak bilateral seperti kesepakatan sebelumnya.

Setelah pertemuan tadi malam, lanjut Anis, pimpinan setiap partai akan segera menggelar pertemuan untuk menentukan sikap bersama terkait pola pengambilan keputusan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai tidak semestinya.

Sebelumnya, Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan SBY tidak akan menarik keputusannya berdampingan dengan Boediono. Persiapan deklarasi sudah dibereskan. "Saya sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan. Dengan Pak Suryadharma Ali (Ketua umum PPP), Zulkifli Hasan (Sekjen PAN), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), dan Pak Hadi Utomo berbicara apa yang menjadi pilihan presiden," ujar Hatta se usai melakukan rapat di Istana Negara, Jakarta, tadi malam.

Hatta juga menjelaskan PKS sudah diundang, namun tidak hadir dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma negara. "Kita berdiskusi, bisa dipahami. Oleh sebab itu saya kira kuncinya adalah komunikasi menjelaskan itu," tukasnya.

Pemilihan Boediono, kata Hatta, sudah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang. "Tidak ada titipan," ujar Hatta. langkah itu dilakukan guna menegakan sistem presidensial kabinet.

"Maka sebaiknya wapres atau cawapres itu dipilih capresnya. Karena memang demikianlah kita berkomitmen untuk menegakkan sistem presidensial kabinet," cetus Hatta.

Hatta juga menegaskan dalam pertemuan tersebut SBY tidak hadir karena kesibukan sebagai presiden dan hanya menunggu di Istana Negara.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)

## Dokumentasi Naskah

# MEDIA INDONESIA

Edisi: 29 April 2009  
Halaman: 01-01

Penulis: (Tim/Anj/X-8) mahfud@mediaindonesia.com  
Rubrik: POLKAM

### Akhirnya Golkar dan PDIP ; Sepakat Koalisi Besar

Para ketua umum akan bertemu untuk menentukan capres.

Mahfud PARTAI Golkar dan PDIP akhirnya menyepakati rencana pembentukan koalisi besar dengan melibatkan Hanura, Gerindra, PAN, dan PPP. Koalisi itu bertujuan membangun pemerintahan yang kuat dan stabil.

Kesepakatan itu diambil dalam pertemuan Tim Enam Golkar dan Tim Enam PDIP di Hotel Nikko Jakarta, kemarin. PDIP diwakili Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, dan Sabam Sirait. Golkar diwakili Soemarsono, Burhanuddin Napitupulu, dan Syamsul Muarif.

Pramono mengatakan pertemuan belum menghasilkan keputusan mengikat. Baru sebatas menyamakan persepsi koalisi yang akan dibangun. Tapi, menurut Pramono, pintu ke arah koalisi tetap terbuka lebar. Soal siapa yang akan menjadi nomor satu atau dua belum diputuskan. "Salah satu pihak harus mengalah. Tidak mungkin dua-duanya menjadi capres," kata Pramono.

PDIP telah menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden dan Partai Golkar mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden. Megawati dan Jusuf Kalla sudah bertemu sebelum dan sesudah pemilu legislatif. Keduanya juga sepakat membangun pemerintahan yang kuat. Untuk itulah, hari ini direncanakan para ketua umum partai yang akan berkoalisi itu bertemu.

Pramono mengatakan koalisi besar itu membutuhkan kebesaran hati dari para pucuk pimpinan partai untuk duduk bersama dan menyatukan visi. "Karena saat ini kita sudah pada fase pengambilan keputusan," ujarnya.

Ia tetap optimistis bahwa pertemuan para ketua umum tersebut akan berhasil menyepakati satu nama yang dijagokan sebagai calon presiden. "Nama akan muncul dalam satu hingga dua hari," ujarnya.

#### *Tawar-menawar*

Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan paling lambat pada 3 Mei partainya akan mengumumkan koalisi. "Jadwalnya paling lambat 3 Mei harus diumumkan," katanya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan saat ini partainya sedang dalam proses menuju arah koalisi dengan parpol lain. Menurut dia, tim enam partai itu sedang melakukan pertemuan intensif dengan PDIP. Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar tetap bersikukuh mengajukan calon presiden, sama dengan yang dilakukan PDIP, Kalla mengatakan dalam negosiasi selalu ada tawar-menawar.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mengatakan yang terpenting saat ini adalah terbentuknya koalisi PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, dan PPP. Setelah koalisi lima partai benar-benar terbentuk, baru penentuan capres dibahas bertiga antara Megawati, JK, dan Prabowo. "Jangan belum apa-apa membicarakan capres, bisa bubar rencana koalisi," katanya.

Rencana PAN bergabung dalam koalisi besar itu baru terungkap kemarin setelah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum PAN Soetrismo Bachir. Pertemuan itu berlangsung tertutup.

Padahal, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais sudah mengimbau pimpinan PAN agar melakukan koalisi dengan parpol pemenang pemilu legislatif. Bagi Amien, berkoalisi dengan pihak yang kalah merupakan kemubaziran.

PPP pun belum kompak menentukan arah koalisi. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Bachtiar Chamsyah menilai PPP tidak akan mendukung Prabowo sebagai capres. Alasannya, suara Gerindra yang mengusung Prabowo lebih sedikit daripada PPP dalam pemilu legislatif. Akan

tetapi, sebanyak 28 dari 33 DPW PPP justru mendukung Prabowo untuk menjadi capres.

Sama seperti PAN, PPP pun hingga kini belum menetapkan arah koalisi.

Mengenai kemungkinan PPP bergabung ke Golkar, Bachtiar menyatakan hal itu belum ditentukan.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## Dokumentasi Naskah

## MEDIA INDONESIA

Edisi: 14 April 2009

Penulis: (Maya Puşpita Sari/Tim/X-8)  
mayapuspita@mediaindonesia.com

Halaman: 01-01

Rubrik: Umum

PKS Ancam Tinggalkan Demokrat  
bila Merangkul JK

Golkar hanya menjadi budak politik dalam koalisi daur ulang.

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengancam akan meninggalkan Partai Demokrat bila Susilo Bambang Yudhoyono merangkul Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla. Duet SBY-JK dinilai PKS sebagai koalisi daur ulang yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan.

Sikap tegas PKS itu dilontarkan petinggi partai itu di Jakarta, kemarin, menanggapi keinginan Golkar untuk balik kanan merapat ke Demokrat. Apalagi, Demokrat membuka ruang bersama-sama teman lama.

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid memberi sinyal berpikir ulang mendukung SBY jika ia berduet lagi dengan JK. "Seharusnya bukan koalisi daur ulang yang hanya mengulang kegagalan dan kekecewaan," kata Ketua MPR itu.

Sekjen PKS Anis Matta menambahkan, Golkar sudah keluar dari koalisi sebelum masa pemerintahan SBY-JK berakhir. Ia menegaskan PKS dengan partai koalisi ingin membangun koalisi reformis, nasional, dan religius. "Koalisi yang kuat dan permanen akan sulit dibangun jika setiap orang bisa sesuka hati datang dan pergi dari koalisi tanpa komitmen yang jelas," katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat enggan menanggapi ancaman PKS. "Itu belum terjadi," ujar Hadi se usai rapat tertutup membahas koalisi di DPP Partai Demokrat, Jakarta, kemarin.

Ia memastikan Partai Demokrat akan membentuk koalisi permanen dengan sejumlah partai sahabat. Sangat mungkin Demokrat menggandeng tujuh parpol yang pernah bertemu sebelum pemilu, yaitu PKS, PKB, PAN, PBB, PKPI, Partai Demokrasi Pembaharuan, dan Partai Pelopor. Namun, Hadi tidak menampik adanya peluang untuk berkoalisi dengan Golkar.

*Perlawanan internal*

Sebelumnya JK siap menjadi calon presiden. Bahkan ia siap *head to head* dengan SBY dalam pemilihan presiden sebab JK sangat yakin bisa lebih baik dan lebih cepat. JK pun bergerak cepat menjalin komunikasi politik dengan sejumlah pemimpin partai termasuk dengan partai oposisi, PDIP.

Setelah hasil penghitungan cepat Pemilu 2009 menempatkan Golkar pada posisi kedua atau ketiga bersama PDIP, ternyata elite Golkar lebih cepat balik haluan dan merapat ke Demokrat sebagai 'pemenang' pemilu. Rencana koalisi itu akan dibahas dalam rapat DPP Golkar pada 16 April dan dimatangkan dalam rapat pimpinan nasional khusus pada 23 April.

Akan tetapi, rencana menduetkan lagi SBY-JK justru mendapat perlawanan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. "DPD Golkar akan boikot," kata Ketua DPD Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman, kemarin.

Gandung mengingatkan DPP jangan terlalu bernafsu mempertahankan SBY-JK. Berdasarkan pengalaman koalisi selama ini, kata dia, Demokrat tidak memperlakukan Golkar secara adil. "Kalau kita pertahankan duet SBY-JK, kita hanya jadi budak politik," katanya.

Golkar NTT juga menolak duet SBY-JK. Sekretaris DPD Golkar NTT Cyrilus Bau Engo menjelaskan hingga kini pihaknya tetap konsisten mengusung JK sebagai capres.

Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Utara Max Lumintang juga mengingatkan DPP untuk tidak mengemis kepada Demokrat. Sekalipun kalah dalam pemilu, kata dia, Golkar tidak boleh mengemis untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden.

Selaku juru bicara DPD Golkar se-Indonesia, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Uu Rukmana di Bandung, kemarin, mengatakan kekalahan dalam pemilu tidak harus mengubah pendirian yang telah dibangun, seperti memaksakan JK berduet dengan SBY. "Golkar bukan partai pengemis. Kita tetap konsisten mengukung JK sebagai capres," katanya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qadari juga menyarankan agar JK tetap maju sebagai capres untuk menyelamatkan partai.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, pada pukul 22.00. Setelah bertemu selama 40 menit, JK meninggalkan Cikeas tanpa memberikan keterangan pers sedikit pun.

Copyright ©2009 Media Indonesia. All rights reserved.

Designed and maintained by Media Indonesia Documentation Development Team.  
Comments and suggestions please email to [dokmi@mediaindonesia.co.id](mailto:dokmi@mediaindonesia.co.id)



## **SURAT KETERANGAN**

NO.044/Srt.Penelitian/Sekred/MI/III/2011

Dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta di bawah ini :

**Nama** : Retriantina Marhendra  
**NIM** : 030902280  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi  
Ilmu Komunikasi

Telah melakukan penelitian di redaksi **Media Indonesia** sebagai bahan referensi untuk skripsi dengan judul **"Isu Koalisi Partai di Media Indonesia, Analisis Framing Pemberitaan tentang Koalisi Partai Menjelang PILPRES Pada PEMILU 2009 dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia Edisi 9 April 2009 – 24 Mei 2009"** pada tanggal 17 Januari 2011.

Demikian surat keterangan ini kami buat, harap dipergunakan semestinya.

Jakarta, 11 Maret 2011

Hormat kami,



**Teguh Nirwahyudi**  
Sekretaris Redaksi